

## TIM PENYUSUN

### Penanggung Jawab:

***Drs. Is Fahmin***

(Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bima)

### Editor:

***Ihya Ghazali, S. Sos***

(Kepala Subbagian Humas dan Pemberitaan)

### Penyusun Naskah:

***Diana Fithriah, M. Si***

### Desain Grafis:

***Iffan Elbima***

### Peliput/Pencari Data:

Koordinator:

***Eddy Kurniawan Nur AK***

Anggota:

***Dian Fitriany, S. IP***

***Nunung Andriyani, M. Hum***

***Nurhidayati, S. IP***

***Buana Eka Putra, S.STP***

***Aris Ramdansyah, S. Sos***

***Syamsul Hidayat, S. Sos***

***Ansyarullah, S. S***

***Ruslan Efendi***

***Gunawan***

***Ikang Setiawan***

## Kata Pengantar

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh***

***Salam Sejahtera..***

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, buku “Jejak Kepemimpinan M. Qurais H. Abidin Sebagai Walikota Bima” berhasil kami selesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Ide penyusunan buku ini muncul sehubungan dengan hampir berakhirnya masa jabatan M. Qurais H. Abidin sebagai Walikota Bima selama kurun waktu 2010-2013, yang melanjutkan jejakjuang Almarhum M. Nur Latif.

Sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang bertugas dalam bidang kehumasan dan mendokumentasikan setiap kegiatan beliau, kami merasa perlu membuat sebuah buku yang merekam jejak langkah beliau selama menjabat. Tentunya apa yang termuat dalam buku ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak program, kebijakan, serta pencapaian Walikota selama rentang waktu kurang lebih tiga tahun.

Dalam penyusunan buku ini, kami mereferensi data dari berbagai instansi. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima, serta berbagai Unit Kerja yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan buku ini.

Kami bermaksud menjadikan penyusunan buku Jejak Langkah Walikota sebagai agenda rutin setiap menjelang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, sebagai sebuah persembahan dan penghargaan kepada Kepala Daerah. Buku tersebut kiranya dapat menjadi sebuah dokumentasi

mengenai kepemimpinan dan pemerintahan yang kelak dapat diakses dan dijadikan rujukan bagi banyak pihak.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat.

Bima, Januari 2013  
**Kepala Bagian Humas dan Protokol**  
**Sekretariat Daerah Kota Bima**

**Drs. Is Fahmin**

### *Sambutan Walikota*

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, saya menyambut baik kehadiran buku yang disusun oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bima ini. Saya merasa terharu dengan inisiatif Bagian Humas yang mendokumentasikan sebagian besar kebijakan, program, serta pencapaian yang mampu kita raih bersama selama masa kepemimpinan saya, serta menerbitkannya dalam bentuk buku. Hal ini saya pandang sebagai sebuah penghargaan serta menunjukkan bahwa Bagian Humas bersungguh-sungguh melaksanakan fungsinya sebagai jembatan komunikasi dua arah antara masyarakat dan Pemerintah.

Perlu saya sampaikan bahwa semua pencapaian dan keberhasilan yang tertuang dalam buku ini adalah berkat dukungan dari seluruh masyarakat Kota Bima yang tercinta. Maka perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap masyarakat yang telah membantu pemerintah, baik langsung maupun tak langsung, dalam proses penegakan pemerintahan yang bersih. Hanya dengan dukungan masyarakatlah cita-cita mulia untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Kota Bima, serta segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bima. Tiga tahun ini telah berjalan penuh dinamika. Walaupun kadang terjadi perbedaan pendapat, namun semua itu justru mewarnai proses tumbuh-kembangnya Kota Bima yang kita cintai. Kita semua menyadari, bahwa tujuan kita satu, yaitu mewujudkan Kota Bima yang maju dan sejahtera.

Saya menyadari betul, masih ada kewajiban yang harus kami penuhi terhadap masyarakat Kota Bima. Masih banyak kebutuhan yang harus kami penuhi, antara lain ketersediaan air bersih, pengaspalan jalan, penyediaan tanah atau lahan, serta menyediakan lapangan kerja. Saya tidak lupa hal-hal tersebut, karena memang sudah menjadi kewajiban pemerintah. Tentunya pemerintah dan DPRD Kota Bima akan berusaha keras untuk mewujudkannya. Sesungguhnya saya sangat berterima kasih atas kesabaran dan ketabahan masyarakat selama ini dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Insyaallah, kesabaran itu akan berbuah manis.

Tantangan pembangunan yang kita hadapi memang tidak ringan, dan tidak semakin mudah. Saya mengajak seluruh masyarakat, untuk melanjutkan perjuangan kita membangun Kota Bima dengan semangat kebersamaan yang lebih kokoh, membangun rasa saling percaya, dengan hati yang lebih tegar, dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi, dan dengan optimisme yang semakin kuat. Kita berharap dan tentunya berupaya dengan sungguh-sungguh, agar tahun berikutnya lebih baik dari sebelumnya. Kita berupaya agar tahun-tahun mendatang kita dapat mencapai keberhasilan yang lebih banyak, dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat, daerah, bangsa dan negara. Untuk itu saya tak henti-hentinya mengajak segenap komponen daerah, untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan. Mari melangkah bersama dan bekerja keras untuk mengatasi berbagai permasalahan. Dengan komitmen dan modal utama ini, Insya Allah hari depan akan menjadi tahun-tahun yang penuh harapan. Semoga Allah SWT. senantiasa membimbing segala langkah dan perjuangan kita. Aamiin ya rabbal 'alamiin....

**Walikota Bima,  
M. Qurais H. Abidin**

## *Sambutan Wakil Walikota*

Alhamdulillahrabbi'alamiin. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya, kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan Insya Allah nikmat kesehatan, untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Saya menyambut gembira kehadiran buku "Jejak Kepemimpinan M. Qurais H. Abidin sebagai Walikota Bima" yang disusun oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bima ini. Sebagai satuan kerja yang mendampingi Kepala Daerah dalam hampir setiap kegiatan dan perjalanan, maka Bagian Humas dapat dikatakan memiliki gambaran menyeluruh mengenai segala aspek kepemimpinan beliau. Bagian Humas tentunya memahami dan terlibat dalam berbagai dinamika yang terjadi selama masa pemerintahan M. Qurais H. Abidin sebagai Walikota Bima.

Selain kedudukannya sebagai Walikota, saya mengenal sosok M. Qurais H. Abidin lebih mendalam karena beliau merupakan saudara saya. Sosok yang memiliki hobi *travelling* ini sangat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sejak remaja, ia telah menunjukkan bakat memimpin, terbukti dengan terpilihnya sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Santiang Surabaya periode tahun 1982-1985. Kecintaannya pada olahraga sepakbola mengantarkannya menjadi Ketua Persebi Kabupaten Bima periode Tahun 1987-1993 serta Wakil Ketua PSSI NTB periode Tahun 1993-1997. Kecintaan pada olahraga inilah yang menjadi salah satu motivasinya giat membangun infrastruktur penunjang olahraga di Kota Bima. Kerja besar yang tengah

## Daftar Isi

diperjuangkannya adalah membangun gedung olahraga Manggemaci. Proyek ini kini tengah berjalan.

Selama perjalanan kami menakhodai Kota Bima, banyak dinamika yang memberi warna dan memperkaya khasanah berpikir kami berdua. Kami telah belajar dan mendapat dukungan dari banyak pihak, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, para Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bima, serta berbagai elemen masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Atas berbagai pembelajaran dan dukungan tersebut, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus.

Dengan masa jabatan kami yang akan segera berakhir, kami bertekad untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan yang telah diagendakan, tentunya dengan dukungan seluruh masyarakat Kota Bima.

**Wakil Walikota Bima,**

**H. A. Rahman H. Abidin**

### **Kata Pengantar**

### **Sambutan Walikota**

### **Sambutan Wakil Walikota**

#### **Bagian 1: Pendahuluan**

- Masa Kecil dan Keluarga
- Kiprah Politik

#### **Bagian 2: Selayang Pandang Kota Bima**

- Letak Geografis
- Iklim
- Batas Wilayah
- Wilayah Administrasi
- Demografi

#### **Bagian 3: Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- Capai “Wajar Dengan Pengecualian”
- Keberhasilan Mencairkan Dana BRI
- Genjot Realisasi PAD
- Perda untuk Pajak Kos-kosan
- Fungsi Strategis PAD dalam Otonomi Daerah

#### **Bagian 4: Peningkatan Kinerja dan Kompetensi Aparatur**

- Seleksi CPNSD
- Diklat Prajabatan
- Penetapan Lima Hari Kerja
- Penerapan TKD
- Pelatihan Satuan Linmas Inti Kota Bima
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
- Sosialisasi Pajak untuk Seluruh Bendahara
- Sosialisasi Anjab dan ABK
- Rotasi Pejabat
- Organisasi yang Lebih Mantap

#### **Bagian 5: Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Ekonomi**

- Penurunan Angka Kemiskinan
- Gerakan Bebas Buta Aksara
- Peningkatan Kapasitas Petani
- Rehabilitasi Rumah Sederhana – Tidak Layak Huni (RS – TLH)

- Program KUM Bidang “Tenun Gedongan” Khas Bima
- Pelatihan *Processing* Makanan
- Sosialisasi dan Penyerahan Dana BLM-PUAP
- Pemberian Bantuan bagi IKM dan UMKM
- Pemerintah Kota Bima Siapkan Anggaran Stimulan Rp. 1,5 Milyar
- Dinilai Sukses, Program PUGAR di Kota Bima Berlanjut Hingga 2013
- 16 Karang Taruna Terima Bantuan Dana dari Pemerintah
- Program Pemberdayaan Masyarakat Peserta HKM
- Menkop UKM Buka Kegiatan EKSP0 dan Resmikan Sarana Usaha PKL
- Pemerintah Kota Bima Giatkan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat

**Bagian 6: Peningkatan Pelayanan Publik**

- Berkantor di Kelurahan
- Sistem Pelayanan Terpadu
- Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat

**Bagian 7: Membangun Kehidupan Beragama**

- Kota Bima Berzakat dan Maghrib Mengaji
- Pembangunan masjid dan musholla
- Hafiah Tilawatil Qur’an
- Penataan Zakat Profesi
- Pelantikan Badan Waqaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Bima
- Pemerintah Tetapkan Kelurahan Percontohan Zakat
- MTQ dan Optimalisasi Peran LPTQ

**Bagian 8: Menata Kota Menuju Adipura**

- Pencanaan Program Seribu Taman
- Penataan Taman Terus Digalakkan
- Fungsi Taman Kota
- Pengukuhan TKPSDA WS Bima – Dompu
- Gerakan Satu Milyar Pohon
- Kota Sehat dan Bersih
- Pemasangan Lampu Jalan
- Bangun Gotong Royong melalui Lomba Kelurahan
- Reboisasi Hutan
- Impian Menjadi *Green City*

**Bagian 9: Bidang Pendidikan dan Olahraga, Sarat Prestasi**

- Atlet Kota Bima Raih Lima Besar Nasional

- Pecatur Cilik Asal SDN 11 Kota Bima Raih Juara 1 Tingkat Provinsi NTB
- Siswa MTsN 1 Juarai Lomba Pidato Tingkat Provinsi
- Siswa SDN 5 Kota Bima Jadi Duta NTB Dalam Lomba OSK Nasional
- Juara II Porprov Tahun 2010
- Atlet Kota Bima Meraih Medali Pada *Sea Games* Tahun 2011
- Kontingen O2SN Kota Bima Raih 4 Emas
- Kejuaraan Taekwondo Dunia, Siswa SMAN 2 Kota Bima Sabet Medali Perak
- Atlet Panjat Tebing Kota Bima Raih Medali Emas
- Walikota Sambut Siswa Peserta Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar
- PON XVIII Riau, Atlet Kota Bima Raih Dua Emas dan Satu Perak
- Kelulusan UN Kota Bima, Menggembirakan

**Bagian 10: Membangun Infrastruktur Sebagai Investasi Jangka Panjang**

- Pemugaran Paruga Nae
- Jalan Melayu - Kolo
- Pembangunan Jalan Dua Arah Niu - Ama Hami
- Hotmix Jalan/Gang Lingkungan
- Pembukaan Jalan Dodu – Santangi
- Pembangunan Jalan Padolo III
- Pembangunan 6 Kantor Lurah dan Camat Raba
- Pembangunan Fasilitas Olahraga KONI Manggemaci
- PLTU Bonto
- Pelabuhan Bima
- Terminal AKAP
- Drainase dan Pisanisasi Air Bersih
- Rumah Potong Hewan
- Pentingnya Pembangunan Infrastruktur

**Bagian 11: Kesehatan dan Keluarga Berencana**

- Pencanaan Kampanye Campak dan Polio Tambahan
- Sukseskan Program KB, Kader Dilatih
- Cegah Penyebaran AIDS Melalui PIKARR
- Pelatihan Fasilitator dan Tim Pemicu STBM
- Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
- Kota Bima Canangkan Gerakan Sehari Pelayanan KB
- Pengabdian Bidang Kesehatan Kota Bima Raih Penghargaan

**Bagian 12: Pengembangan Potensi dan Promosi Daerah**

- Tambang marmer

- Pariwisata Kota Bima Berbasis Pesona Alam dan Budaya
  - Hanta U'a Pua Menjadi *Event* Tahunan Wisata NTB
  - Festival dan Pacuan Kuda
  - Mahasiswa UGM Lakukan Pemetaan Ekowisata di Kolo
  - Tenun Ikat
  - *Fashion Show* Tenun Ikat Bima Digelar
  - Stigma Daerah Penerima Bantuan Harus Diubah
- Bagian 13:** **Kerjasama dan Koordinasi**
- Kunjungan Perwakilan Kedubes AS
  - Imam Besar Baltimore Amerika Kunjungi Kota Bima
  - Tuan Rumah Rakor Komwil IV APEKSI
  - Rakor di Kota Bima, Bentuk Penghargaan Pemprov
  - Pemkot Bima - Pemprov DKI Jakarta Teken *MoU*
  - BPBD Kota Bima Kerjasama Dengan OXFAM, Bangun Ketangguhan Bencana
  - Kunjungan Staf Ahli Kedubes Kanada
  - Penanaman Jagung Manis Organik, Kerja Sama dengan LPM Unram
  - Walikota Terima Bantuan dari Kementerian Kelautan RI
- Bagian 14:** **Dukungan dan Peranan Istri**
- Visi dan Misi Gerakan PKK
  - 10 Program Pokok PKK
  - Rapat Evaluasi Program dan Pembahasan Rancangan Program
  - Sosialisasi Rakernas VII dan Cipta Menu 3B dan Gemarikan bersama TP PKK Prov. NTB
  - Berbagai Pembinaan
  - Lomba Rancang Busana Tenun dan Batik Khas NTB serta Seminar Perempuan
  - Lomba Masak Serba Ikan, Gizi Berimbang dan Dekranasda Tahun 2010
  - Lomba Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Gizi Keluarga
  - Dasawisma dari Kelurahan Mande Raih Juara I
  - Lomba-lomba dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK
  - Prestasi
  - Kendala dan Hambatan
  - Harapan untuk Masa Mendatang
- Bagian 15:** **Perencanaan Jangka Panjang**
- Rencana Strategis Wilayah Pesisir
  - Penyusunan Raperpres RTR-KSN KAPET Bima

- Yang Hendak Dituntaskan
- Bagian 16:** **Sikap Politik**
- Bergabung dengan Partai Demokrat
  - Pencalonan Kembali
- Bagian 17:** **M. Qurais di Mata Para Tokoh**

Bagian 1  
Pendahuluan

Muhammad Qurais lahir di Bima, tanggal 5 Juli 1962, sebagai putra dari pasangan H. Abidin Ibrahim (Alm) dan H. Maryam Ahmad, yang merupakan salah satu keluarga pengusaha terkemuka di wilayah Bima. Masa kecilnya sebagian besar dijalani di perantauan.

### **Masa Kecil dan Keluarga**

Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Nagasari Banjarmasin pada Tahun 1968 hingga 1974. Memasuki jenjang pendidikan menengah, ia kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Bima, dan menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Bima pada Tahun 1975 hingga 1977, serta pendidikan menengah atas di SMA Negeri Bima pada Tahun 1978 hingga 1981. Namun, setamat SMA Qurais kembali merantau, kali ini ke Surabaya.

**Foto masa kecil**

Meneruskan jejak sang ayahanda, setamat SMA Qurais berkecimpung dalam dunia usaha dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keseriusan mendalami dunia usaha ditandai dengan ditempatinya posisi Direktur CV. H. Abidin pada tahun 1985. Posisi ini ditempatinya hingga tahun 2000.

Kesungguhan menekuni dunia usaha membuahkan banyak keberhasilan dan pencapaian yang membanggakan bagi Qurais. Tercatat berbagai posisi penting pernah dan masih didudukinya, antara lain: Ketua I Kadin Bima Tahun 1999-2004; Ketua II Kadin Bima Tahun 2004-2009; Wakil Ketua Kadin NTB Tahun 1995-1999; Ketua II Hiswana Migas NTB tahun 2006-2010; Direktur PT. Tegas Budi Utama Tahun 1997-Sekarang; Direktur Operasional PT. Bina Mandiri tahun 2000-2005; Direktur PT Safiry Gas Bima-

Dompu; Direktur SPBU Amahami Bima; Ketua IPHI Kota Bima Tahun 2007-Sekarang; serta Direktur SPBU Panda Bima.

Pada tahun 1986, tepatnya tanggal 22 Februari, M. Qurais H. Abidin menikah dengan Hj. Yani Marlina, putri dari pasangan Asmuin Hadi (Alm) dan Hj. Duriana. Pernikahan ini membuahkan empat orang anak, yaitu: Selvy Novia Rahmayani, M.Ridho Zoelfikar, M. Ryan Kusuma Permadi, dan M. Rayindha Prasatyayang.

Pria yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 27 RT/RW 06/03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat ini dikenal menyayangi keluarga. Ia sering melontarkan pernyataan bahwa ketakutan terbesarnya dalam hidup adalah melihat anak-anaknya tidak bahagia dan terjerumus kedalam pergaulan yang salah.

**Foto keluarga**

### **Kiprah Politik**

Kiprah di dunia politik diawali dengan menjadi Pengurus (Bendahara) partai Golkar Kabupaten Bima periode tahun 1987-1988. Langkah besarnya adalah maju sebagai calon Wakil Walikota mendampingi M. Nur A. Latif pada Pemilukada Kota Bima tahun 2008. Langkah ini mengantarkannya menjabat sebagai Wakil Walikota Bima Periode tahun 2008-2010, dan sebagai Walikota Bima periode 2010 - 2013.

**Foto pelantikan sebagai wakil**

Melalui Pemilukada yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2008, keduanya terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima, untuk masa jabatan periode 2008 hingga 2013. Pasangan ini dilantik pada tanggal 24 Juli 2008.

Visi Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013 yang diusung oleh pasangan ini adalah: "*Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Pendidikan Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri*"

#### Foto lapak di jalan

Untuk mewujudkan visi tersebut, disusunlah misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bima yang didukung oleh pelayanan publik yang prima dan pembangunan keagamaan.
2. Memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada pembangunan ekonomi masyarakat dan penataan kelembagaan di tingkat lokal dan kelurahan.
3. Menyediakan infrastruktur perkotaan dan pengendalian ruang yang mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan dan penataan kota.

Pada tanggal 6 Maret 2010, M. Nur A. Latif wafat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Walikota M. Qurais H. Abidin naik menjadi Walikota melanjutkan masa jabatan hingga 2013. Terhitung mulai tanggal 8 Maret 2010 melalui *Radiogram* Mendagri, Qurais menjabat sebagai Pejabat Walikota Bima. Pada tanggal 28 April 2010, ia dilantik menjadi Walikota Bima.

#### Foto pelantikan sebagai Walikota

Lima bulan kemudian, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2010, H. A. Rahman H. Abidin dilantik sebagai Wakil Walikota mendampingi Qurais. Pasangan ini segera mengawali kerja besar melanjutkan pembangunan Kota Bima dengan melakukan pemetaan secara menyeluruh mengenai kondisi Kota Bima, terkait potensi, tantangan, dan masalah yang tengah dihadapi.

#### Bagian 2

#### Selayang Pandang Kota Bima

Kota Bima adalah sebuah kota kecil yang terletak di ujung timur pulau Sumbawa, dengan luas 222,25 km<sup>2</sup>. Pada tanggal 10 April 2012, Kota Bima genap memasuki usia 10 tahun. Selama sepuluh tahun berdirinya, Kota Bima telah dipimpin oleh lima putra terbaik, yaitu Drs. H. Muhtar yang memimpin Kota Administratif Bima, H. Muhdar Arsyad yang memimpin Kota Madya Bima, M. Nur, SH. sebagai pejabat pelaksana tugas Walikota Bima, M. Nur A. Latif, serta M. Qurais H. Abidin sebagai Walikota.

#### Foto seluruh Walikota

Kota Bima awalnya merupakan kota administrasi Bima, terbentuk pada tanggal 10 April 2002 melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Bima Nomor 13 Tahun 2002. Terdapat berbagai pertimbangan yang mendasari pembentukan Kota Bima yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Kota Bima. Pertimbangan-pertimbangan tersebut pada dasarnya terkait dengan pertimbangan politis dan pertimbangan pengembangan ekonomi dan pembangunan regional dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditinjau dari pertimbangan politis, terdapat dua opsi yang harus dipilih oleh Pemerintah Kota Administratif Bima sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada saat itu. Opsi yang pertama adalah Pemerintah Kota Administratif Bima harus menjadi kota yang otonom, sedangkan opsi kedua adalah dihapuskannya status kota administratif jika Bima tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom.

Memilih opsi yang kedua berarti melupakan sejarah panjang tujuh belas tahun menuju pembentukan Kota Administratif Bima. Oleh karenanya,



masyarakat dan Pemerintah Kota Administrasi Bima harus mempersiapkan proses peningkatan statusnya menjadi daerah kota yang otonom, apalagi batas waktu proses peningkatan status ini pada saat itu hanya sampai bulan Mei 2001.

Melalui serangkaian proses penilaian oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, akhirnya, pada tanggal 10 April 2002 Undang-Undang Tentang Pembentukan Kota Bima Nomor 13 Tahun 2002 di Provinsi NTB disahkan.

Putra-putra terbaik ini menetapkan komitmen untuk berupaya serta berbuat semampunya untuk mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan menuju masyarakat yang maju dan mandiri sesuai dengan visi Kota Bima.

### **Letak Geografis**

Kota Bima terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan memiliki luas wilayah 222,25 km<sup>2</sup>, terletak antara 118° 41' - 118° 48' Bujur Timur dan 8° 30' - 8° 20' Lintang Selatan.

Asakota merupakan kecamatan yang memiliki luas area terbesar, yaitu 69,03 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan tersempit dengan luas wilayah hanya 10,14 km<sup>2</sup>.

Dari 7 (tujuh) sungai yang ada di Kota Bima, Sungai Lampe merupakan sungai terpanjang dengan panjang 25 km.

### **Iklim**

Berdasarkan data statistik dari lembaga Meterologi dan Geofisika, temperatur maksimum pada tahun 2010 kurang lebih 34,0°C, dan temperatur

minimum 23,1°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Maret, dan terendah pada bulan Agustus.

Sebagai daerah tropis, Kota Bima mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu kurang lebih 81,3%.

### **Batas Wilayah**

Di sebelah utara, Kota Bima berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Sebelah timur, Kota Bima berbatasan dengan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Sebelah selatan, Kota Bima berbatasan dengan Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Sebelah Barat, Kota Bima berbatasan dengan Teluk Bima.

**Tampilkan peta Kota Bima**

### **Wilayah Administrasi**

Kota Bima terdiri atas 5 kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Rasanae Barat, dengan ibukota Paruga, terdiri atas 6 kelurahan; (2) Kecamatan Mpunda, dengan ibukota Sadia, terdiri atas 10 kelurahan; (3) Kecamatan Rasanae Timur, dengan ibukota Kumbe, terdiri atas 7 kelurahan; (4) Kecamatan Raba, dengan ibukota Penaraga, terdiri atas 11 kelurahan; dan (5) Kecamatan Asakota, dengan ibukota Melayu, terdiri atas 4 kelurahan.

### **Demografi**

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi 2011, jumlah penduduk Kota Bima mencapai 144.018 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 70.761 jiwa dan perempuan sebanyak 73.257 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak adalah di Kecamatan Raba. Sementara kepadatan penduduk tertinggi adalah di

Kecamatan Rasanae Barat, dengan angka kepadatan 3.101 penduduk per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bima adalah 1,27 persen per tahun.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, pada tahun 2011 pencari kerja yang terdaftar berjumlah 236 orang.

Lebih dari 90% penduduk Kota Bima memeluk agama Islam. Kehidupan beragama di Kota Bima berjalan damai dan penuh toleransi. Hingga kini, belum pernah tercatat kejadian konflik beragama. Saat ini Kota Bima mempunyai sarana peribadatan berupa 116 unit masjid, 117 unit musholla, 78 unit langgar, 4 unit gereja, dan 2 unit pura.

Foto masjid

Bagian 3

Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tantangan pertama bagi M. Qurais H. Abidin saat menjabat sebagai Walikota Bima adalah keluar dari status *disclaimer* yang disematkan BPK bagi pengelolaan keuangan Kota Bima. Seluruh kemampuan pemerintah daerah dicurahkan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Dimulai dengan membenahan manajemen dan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

Sebagai wujud komitmen untuk keluar dari status *disclaimer*, pada hari Senin tanggal 4 April 2011 Walikota menandatangani *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman dengan BPK untuk membenahi manajemen keuangan daerah. Selanjutnya, Pemerintah Kota Bima juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Bima untuk mewujudkan birokrasi yang bersih.

Foto MoU dengan BPK

#### Capai "Wajar Dengan Pengecualian"

Perjuangan tersebut akhirnya mencapai hasil yang memuaskan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menyatakan bahwa Pemkot Bima kini meraih status Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan dengan sendirinya tidak lagi menyandang status *disclaimer*. Kepastian status ini diperoleh setelah Walikota Bima, M. Qurais, menerima hasil audit BPK Perwakilan NTB tentang pelaksanaan kinerja pemerintah tahun anggaran 2011. Status itu diterima pada hari Jum'at, 15 Juni 2012, kurang lebih pukul 15.30 WITA, di aula pertemuan BPK Perwakilan NTB, di Mataram.

Foto penyerahan status WDP → Minta sama Rian???

Penyerahan laporan pelaksanaan kinerja itu dilakukan oleh pejabat yang mewakili Kepala BPK NTB, Nelson, AK, MM, diterima Walikota Bima dengan disaksikan oleh Pimpinan DPRD Kota Bima, Inspektur, Drs H. Ramli, dan rombongan Bupati Dompu. Dari hasil yang dibacakan pihak BPK, pada tahun 2011 Pemkot bisa membenahi status kinerja pemerintah dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kita bersyukur dengan status ini, tetapi target kita tahun depan naik status atau peringkat, menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, ujar Walikota. Ia pun mengapresiasi jajaran aparatur Pemerintah Kota Bima dan masyarakat atas dukungan dan doa terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah, sehingga bisa keluar dari status *disclaimer*.

Menindaklanjuti terbitnya status WDP itu pula, Walikota segera menggelar rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta Camat dan Lurah se-Kota Bima, pada hari Senin, 18 Juni 2012, bertempat di Aula Pemerintah Kota Bima.

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat tindak lanjut rencana aksi yang direkomendasikan oleh pihak BPK Perwakilan NTB terkait perihal yang belum diselesaikan selama pemeriksaan dan proses audit untuk tahun kerja 2011.

Beberapa perihal yang masih belum diselesaikan saat ini adalah melengkapi Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), menyelesaikan masalah aset di setiap SKPD secara berkala, rekapitulasi jumlah aset dan lokasinya, serta tertib pengelolaan barang. Untuk sementara, Pemerintah Kota Bima lebih memantapkan untuk penyelesaian tugas Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) terhadap potensi kerugian Negara sejak tahun 2004-2010. Selanjutnya, akan difokuskan pada penertiban realisasi data dan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian penyelesaian dan penertiban dana bergulir serta penajaman tupoksi masing-masing SKPD.

### **Keberhasilan Mencairkan Dana BRI**

Tantangan berikutnya adalah mencairkan dana Pemerintah Kota Bima sebesar Rp 8 Miliar yang dijadikan jaminan di BRI Cabang Bima. Setelah melalui perjuangan panjang, dana tersebut berhasil dicairkan pada awal bulan November tahun 2011.

#### **Foto dengan pihak BRI di Denpasar**

Pencairan dana agunan itu terjadi setelah pada hari Rabu, 26 Oktober 2011, Walikota Bima, difasilitasi Tim Pengacara Negara dari Kejaksaan Tinggi Mataram dan Kejaksaan Negeri Bima, bertemu Pemimpin Wilayah BRI Denpasar, Irianto, di Aula BRI Denpasar. Dari pertemuan itu dicapai kesepakatan, dana yang jadi agunan sejak tahun 2004 lalu yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp 3 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 5 miliar, akan cair utuh. Kecuali bunganya yang bernilai Rp 1 miliar, tidak akan dicairkan melainkan dikembalikan ke BRI.

Pada pertemuan tersebut juga tercapai kesepakatan bahwa BRI akan menjadi mitra Pemerintah Kota Bima, sama dengan bank-bank lain.

### **Genjot Realisasi PAD**

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima tahun 2011 juga menunjukkan angka yang menggembirakan karena telah mulai memperlihatkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Kota Bima pada tahun 2009 dan 2010 lalu.

Data penerimaan tahun 2011 di Bidang Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima berdasarkan realisasi PAD Kota Bima per Juni 2011 dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 dan 2010 menunjukkan, persentase capaian realisasi penerimaan daerah Kota Bima sampai pada Juni 2011 telah berada pada posisi Rp. 5.731.959.605,- atau 49,90% dari total target PAD Kota Bima senilai Rp. 11.486.427.014,-.

Pada tahun 2009, target PAD Kota Bima sebesar Rp. 9.728.281.200,-, dimana capaian realisasi penerimaan pendapatan daerah per Juni 2009 hanya mencapai angka Rp. 2.934.662.924,- saja atau sebesar 30,17%. Sementara pada tahun 2010, capaian realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Bima per Juni 2010 hanya mampu berada pada Rp. 3.574.356.396,- atau 36,61% dari total target PAD sebesar Rp. 9.763.181.200,-

Membandingkan data penerimaan pendapatan daerah Kota Bima selama semester I (pertama) tahun 2011 dengan penerimaan pendapatan tahun 2009 dan 2010 mulai bulan Januari hingga Juni yang bersumber dari Bidang Pendapatan DPPKAD Kota Bima, maka realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Bima pada semester I tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BIMA						
SEMESTER I TAHUN 2009 - 2010						
Bulan	Tahun					
	2009		2010		2011	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Januari	313.396.805,00	3,22	792.395.125,00	8,12	1.097.183.145,00	9,55
Februari	536.194.867,00	5,41	1.187.335.120,00	12,16	2.235.418.704,00	19,46
Maret	1.175.738.485,00	12,09	1.815.062.290,00	18,59	3.104.327.379,00	27,03
April	1.874.090.267,00	19,26	2.430.069.515,00	24,89	4.086.435.993,00	35,58
Mei	2.408.974.652,00	24,76	3.056.748.662,00	31,31	4.968.881.746,00	43,26
Juni	2.934.662.924,00	30,17	3.574.356.396,00	36,61	5.731.959.605,00	49,90

Total masing-masing realisasi penerimaan PAD Kota Bima pada tahun 2009 adalah senilai Rp. 6.605.360.454,- atau sebesar 67,90% dari target Rp. 9.728.281.200,-.

Total masing-masing realisasi penerimaan PAD Kota Bima pada tahun 2010 adalah senilai Rp. 7.265.696.198,- atau sebesar 74,42% dari target Rp. 9.763.181.200,-. Pada akhir tahun 2011, capaian realisasi PAD 2011 Kota Bima berhasil melebihi nilai 99,80%.

Untuk tahun 2012, target realisasi PAD ditingkatkan 5% dari target tahun 2011, menjadi Rp. Rp12.075.284.100,-. Dengan adanya peningkatan target PAD tersebut, tentunya juga menjadi beban berat Bidang Pendapatan, dalam kondisi terbatasnya sumber-sumber pemasukan daerah. Sementara pada satu sisi, Pemerintah Kota Bima telah menyepakati salah satu Peraturan Daerah (Perda), yaitu Perda Nomor 17 Tentang Retribusi Daerah.

Untuk itu, Walikota meminta DPPKAD Kota Bima melakukan koordinasi lintas sektor, antara lain pendataan penatausahaan rutin PAD oleh Bidang Pendapatan, dan pendataan rumah kos yang dilakukan dengan pihak kelurahan, maupun kegiatan konsolidasi penetapan pajak air tanah terhadap pengguna air tanah untuk kegiatan bisnis.

Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dilakukan juga penetapan zona tanah menyangkut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Koordinasi lain yakni audiensi dengan Dinas Tata Kota, vonder dan pengusaha pembuat reklame, serta kegiatan penataan ulang pasar grosir. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis (bintek) persiapan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta monitoring dan evaluasi (monev) penerimaan daerah atas PAD 2011 dan awal tahun 2012.

#### **Perda untuk Pajak Kos-Kosan**

Minat masyarakat Kota Bima terlihat sangat antusias dalam menginvestasikan modalnya untuk mendirikan kamar kos-kosan. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya berdiri bangunan kamar kos-kosan di hampir seluruh kelurahan yang ada pada empat kecamatan, yakni Kecamatan Asakota, Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba. Empat dari lima Kecamatan yang ada di wilayah Kota Bima tersebut kian dipadati oleh penghuni kos-kosan dari luar daerah. Penghuni kos-kosan nampaknya lebih didominasi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa.

Untuk pemungutan pajak kos-kosan ini, Pemerintah Kota Bima selanjutnya menyusun Peraturan Daerah, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya dua hal penting.

*Pertama*, pajak air tanah tidak ditarik pada kos-kosan yang berjumlah 5 kamar keatas, dan banyaknya tarif pajak pada kos-kosan yang berjumlah 5 kamar keatas sebesar 5%. Jika jumlahnya kurang dari 5 kamar, maka dianggap sebagai tempat tinggal keluarga saja. *Kedua*, bagi kos-kosan yang berjumlah 10 kamar keatas, selain dikenakan pajak maka akan ditarik pula pajak

penggunaan air tanah. Sebagai langkah awal, Bidang Pendapatan DPPKAD Kota Bima bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan mulai melakukan pendataan jumlah kos-kosan pada masing-masing kelurahan pada awal Februari 2012.

#### **Fungsi Strategis PAD dalam Otonomi Daerah**

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (*social control*).

Masalah yang umum dihadapi oleh daerah otonomi baru adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam penyusunan anggaran, sehingga akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan daerah tersebut sesuai dengan asas desentralisasi.

#### **Foto potensi**

Belanja Operasional atau Belanja Rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber yang mendukungnya selalu menjadi isu yang problematik, tidak saja di masa lampau, tetapi juga di masa sekarang tatkala otonomi daerah menjadi tuntutan untuk dikembangkan secara optimal.

Disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan respon positif atas krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang terjadi sekarang ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan ikhtiar untuk memperluas otonomi daerah, sehingga arus desentralisasi dan dekonsentrasi dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan bukan saja UU Nomor 22 Tahun 1999 dapat menciptakan demokratisasi ekonomi, khususnya persamaan, menggali dan memanfaatkan potensi daerah bagi daerah itu sendiri, namun secara ekonomis, otonomi daerah dapat dipandang sebagai upaya untuk melakukan liberalisasi ekonomi.

Liberalisasi ekonomi yang dimaksud oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dapat terealisasi bila Pemerintah Daerah mampu mengembangkan dan mendayagunakan potensi daerahnya secara optimal, artinya Pemerintah Daerah dengan segala daya upayanya harus terus menggali dan mengembangkan potensi daerah dengan sungguh-sungguh, baik sumberdaya manusianya maupun sumberdaya alamnya.

Sehingga untuk mendukung realisasi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan peran daerah, utamanya dalam penetapan sumber-sumber penerimaan daerah.

#### **Foto potensi**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka struktur pemerintahan

mengenal adanya daerah otonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan titik berat otonomi terletak pada Kabupaten/Kota. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan.

## Bagian 4 Peningkatan Kinerja dan Kompetensi Aparatur

Sukses pembangunan tidak lepas dari kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah, baik dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum maupun pembangunan. Sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian tak terpisahkan dari keseluruhan strategi pembangunan daerah Kota Bima serta dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Pendayagunaan aparatur pemerintah ditujukan untuk menciptakan aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembangunan, dilandasi semangat dan sikap pengabdian bagi daerah, bangsa, negara dan tanah air, bersifat meneladani, mengayomi dan melayani masyarakat, serta sanggup menumbuhkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

Target yang ingin dicapai melalui program pendayagunaan aparatur pemerintah adalah:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
2. Meningkatnya disiplin aparatur pada masing-masing unit kerja;
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur pada masing-masing unit kerja yang akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

### Seleksi CPNSD

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan berbagai administrasi pemerintahan, diperlukan sumber daya manusia atau aparatur yang kompeten. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Bima mengadakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD). Seleksi CPNSD terakhir yang dilaksanakan adalah pada tahun 2011.

Dalam berbagai kesempatan Walikota selalu menegaskan, “prosedur perekrutan pegawai sekarang sudah sangat ketat. Saya buka saja agar jelas dan dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua, satu-satunya cara untuk menjadi pegawai negeri sekarang adalah dengan mengikuti tes CPNS. Tidak ada jalur pintas. Jangan percaya pada oknum calo”.

### Diklat Prajabatan

Para CPNS yang direkrut melalui seleksi penerimaan tersebut, kemudian diberi pendidikan dan pelatihan atau Diklat Prajabatan yang dibuka secara resmi oleh Walikota Bima.

#### Foto Diklat Prajab

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Diklat Prajabatan adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Selain itu diharapkan diklat prajabatan ini juga mampu menciptakan aparatur yang berperan sebagai pembaharu dengan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pengembangan partisipasi rakyat.

Para CPNSD yang telah lulus Diklat Prajabatan selanjutnya dilantik dan diambil sumpahnya, dan dengan demikian resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pengambilan sumpah dilakukan oleh Walikota dan disaksikan oleh

Ketua DPRD Kota Bima, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, rohaniawan, serta para pimpinan SKPD.

Bagi para CPNSD yang tidak dapat menghadiri pelantikan hari ini, akan diagendakan kemudian, karena pelantikan dan pengangkatan sumpah tidak dapat diwakilkan. Penyerahan SK PNS dilakukan setelah yang bersangkutan mengangkat sumpah. Pengambilan sumpah dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang merupakan dokumen yang sama pentingnya dengan SK PNS.

Walikota senantiasa mengingatkan, pelantikan merupakan momentum awal masa pengabdian kepada bangsa dan negara. Pengangkatan sumpah disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Para PNS hendaknya mampu memikul tanggung jawab, baik pada diri sendiri, masyarakat, serta Tuhan.

### **Penetapan Lima Hari Kerja**

Pemerintah Kota Bima menetapkan perubahan jam kerja mulai hari Senin, 16 Mei 2011. Berdasarkan penetapan jam kerja baru itu, hari Senin – Kamis jam kerjanya adalah pukul 07.30 – 14.30 WITA. Hari Jumat pukul 07.30 – 11.30 WITA, dan hari Sabtu pukul 07.00 - 13.00 WITA. Wacana perubahan hari kerja ini sudah digulirkan Walikota sejak beberapa bulan sebelumnya dan direspon positif oleh para pegawai. Hampir seluruh pegawai menyetujui perubahan ini. Dari sisi kinerja, kebijakan ini tidak mengurangi jumlah jam kerja dan waktu pelayanan publik, hanya terjadi pergeseran jam masuk dan pulang.

Perubahan jam kerja ini didasari beberapa hal, antara lain karena selama ini banyak pegawai yang terlambat masuk karena alasan mengurus anak ke sekolah dan macet. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu mengurai simpul kepadatan kendaraan bermotor pada beberapa ruas jalan

utama pada pukul 07.00 WITA. Pertimbangan lain adalah, pada jam 07.00 instansi-instansi yang melayani fungsi pelayanan umumnya belum terlalu ramai didatangi masyarakat.

Untuk melihat kelayakan dan keberhasilan kebijakan ini, akan dilakukan evaluasi per tiga bulan. Jika ternyata kebijakan tersebut efektif, maka pelaksanaannya akan diteruskan. Diharapkan dengan jam kerja yang mulai setengah jam lebih siang, maka apel pagi tidak sepi peserta seperti biasanya. Menyertai kebijakan ini, Pemerintah akan menegur keras pegawai yang masih juga terlambat. Beberapa waktu sebelum mulai diterapkan, surat edaran sudah dilayangkan kepada seluruh SKPD.

### **Penerapan TKD**

Sebagai salah satu bentuk penerapan mekanisme disiplin pegawai, Pemerintah Kota Bima menerapkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah. Dalam sistem Tunjangan Kinerja Daerah, pegawai yang malas akan mengalami pemotongan nilai tunjangan.

### **Pelatihan Satuan Linmas Inti Kota Bima**

Secara rutin, setiap tahunnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Bima menggelar kegiatan pelatihan/pembinaan Satuan Linmas Inti Kota Bima. Kegiatan ini dibuka oleh Walikota dan dihadiri oleh sejumlah pejabat lingkup Kota Bima. Bertindak selaku narasumber adalah dari Kodim 1608 dan Polres Bima Kota.

Tenaga Linmas terlibat bersama masyarakat setiap hari, oleh karenanya mereka perlu memiliki pengetahuan dan wawasan kemasyarakatan dan sistem keamanan. Itulah sebabnya kegiatan pelatihan semacam ini sangat



penting. Linmas merupakan ujung tombak dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kota.

#### Foto pelantikan Linmas

“Saya berharap informasi yang paling cepat tentang situasi kemasyarakatan di kelurahan datang dari para anggota Linmas, karena mereka sehari-hari langsung terjun ke masyarakat. Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 40 Tahun 2001 bahwa Satuan Linmas merupakan kekuatan yang tumbuh dari peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap upaya-upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat, karena anggota Linmas selalu berada dekat dengan masyarakat. Apalagi menghadapi berbagai macam kericuhan yang sering terjadi sekarang ini, peran serta Linmas bersama aparat lainnya sangatlah dibutuhkan yaitu untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam wilayah Kota Bima khususnya”, ujar Walikota

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Linmas dalam melaksanakan tugas, baik tugas-tugas di Kelurahan maupun tugas-tugas dalam lingkup Pemerintah Kota Bima. Dalam membantu Pemerintah Kelurahan, anggota Linmas harus mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang ada di Kelurahan, terutama tugas yang berkaitan dengan pengamanan dan ketertiban, maupun kegiatan-kegiatan lain di tingkat Pemerintah Kota Bima. Anggota Linmas diharapkan dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban kota dengan selalu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk di dalamnya kegiatan penertiban ternak, pencegahan penyakit sosial masyarakat seperti miras, perjudian, narkoba, dan lain-lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, juga ikut serta dengan anggota Satpol PP dan Dinas Kehutanan dalam kegiatan penertiban perladangan liar dan lain-lain dalam upaya penertiban kota.

#### Foto penertiban ternak

#### Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lingkup Pemerintah Kota Bima merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dibuka oleh Walikota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS agar mampu menjalankan tata pemerintahan yang baik dan bersih .

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *good governance and clean government*, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif, serta mewujudkannya dalam bentuk regulasi yang baik dan tidak berpihak pada elemen tertentu serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Sejalan dengan itu, setiap daerah dalam rangka penyelenggaraan otda perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, (2) meningkatkan prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat di daerah, dan (3) menjaga keserasian hubungan antar daerah dan antara pusat dan daerah, serta keserasian kebijakan dalam dan antar daerah.

#### Foto LPSE

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan

pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN maupun APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN dan APBD. Selain itu, pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.

Penataan di bidang pengadaan barang dan jasa, perlu ditempuh langkah-langkah strategis meliputi: (1) memperbaiki dan memperkuat peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa; (2) meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam bidang pengadaan barang/jasa; (3) menata kelembagaan pengadaan barang/jasa; (4)

meningkatkan pelayanan publik secara lebih cepat, mudah, dan transparan; serta (5) mengurangi praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara dalam pengadaan barang/jasa.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini memasuki sebuah babak baru, yaitu dengan mulai diterapkannya pengadaan barang/jasa berbasis elektronik atau *e-procurement* yang efektif berlaku 1 Januari 2012, dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses pelaksanaan pengadaannya, sehingga hal ini merupakan tantangan sekaligus motivasi bagi pengguna maupun penyedia barang/jasa untuk sesegera mungkin dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan regulasi pengadaan barang/jasa. Melalui kesempatan ini pula saya berpesan kepada asosiasi penyedia barang/jasa selaku mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal baik dari sisi taat azas proses pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa, kontrol mutu pekerjaan, tertib administrasi penyelesaian dan serah terima pekerjaan.

### **Sosialisasi Pajak untuk Seluruh Bendahara**

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima, Selasa, 28 Februari 2012, menggelar rapat sosialisasi pajak untuk seluruh bendahara pengeluaran dan bendahara gaji lingkup pemerintah Kota Bima, acara yang berlangsung di Aula Pemkot tersebut dihadiri Plt. Sekda Ir. Muhammad Rum, Kepala Dinas PPKAD, Kepala KKP Pratama, dan seluruh bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji Lingkup Pemerintah Kota Bima.

Dalam pengantar singkatnya, Kepala Dinas PPKAD, Drs. Muhaimin menjelaskan, tujuan diselenggarakan acara ini adalah untuk meningkatkan

pemahaman kita, terutama bendahara pengeluaran dan bendahara gaji, utamanya terkait masalah perpajakan. Acara ini dilaksanakan sebagai bentuk kerja sama antara Pemerintah Kota Bima dengan KPP Pratama yang bertujuan untuk membenahi keadaan perpajakan yang belum sempurna. Oleh karenanya pada kegiatan ini secara khusus KPP Pratama akan memberikan bimbingan atau sosialisasi perpajakan kepada seluruh bendahara gaji.

Kewajiban perpajakan bagi bendahara pengeluaran dan gaji adalah menyampaikan SPT tahunan. Saat ini, di kantor Pajak Pratama sudah disediakan pembimbing pajak (AR) untuk setiap bendahara pengeluaran dan bendahara gaji masing-masing SKPD. Pembimbing Pajak (AR) disediakan tidak hanya untuk bendahara pengeluaran dan bendahara gaji setiap SKPD tetapi juga untuk seluruh wajib pajak.

### **Sosialisasi Anjab dan ABK**

Organisasi birokrasi dihadapkan pada harapan masyarakat yang semakin tinggi. Agar organisasi birokrasi semakin mampu bekerja secara profesional, efektif, dan efisien, maka diperlukan pemetaan yang lengkap dan menyeluruh atas seluruh informasi jabatan dalam organisasi yang dikenal dengan Analisis Jabatan. Melalui pemetaan tersebut akan diperoleh informasi yang akurat untuk menyusun program dan kegiatan penataan manajemen sumber daya aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, serta perencanaan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai suatu posisi jabatan, serta merancang program dan kegiatan penataan jabatan dan peningkatan kompetensi jabatan. Demikian disampaikan Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, saat membuka acara Sosialisasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) bagi Tenaga Anjab dan ABK SKPD

yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur (OPA) Sekretariat Daerah Kota Bima di Aula Pemkot Bima pada hari Rabu, 7 Juni 2012.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh utusan SKPD dinas, badan, kantor, kelurahan dan kecamatan, berjumlah 150 orang. Hadir pada acara itu Walikota Bima, Asisten I, H. Abubakar Ma'alu, SH, MAP, Asisten II, Ir. Hj. Rini Indriati, dan Staf Ahli Bidang Hukum, Syafruddin, SH.

Disampaikan oleh Walikota, analisis jabatan yang dilakukan dengan teliti akan menghasilkan informasi jabatan yang akurat sebagai bahan baku untuk proses pengelolaan SDM seperti evaluasi jabatan, rekrutmen dan seleksi, manajemen kinerja, serta penyusunan kompetensi dan pelatihan.

Sementara itu, Kepala Bagian OPA Setda Kota Bima, Drs. Supratman, dalam laporannya menjelaskan dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah, dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Hasil Anjab dan ABK ini sebagai syarat bagi seluruh Pemerintah Daerah untuk mengajukan formasi CPNS tahun 2013 disertai dengan laporan perhitungan kebutuhan PNS, peta jabatan, laporan rencana redistribusi pegawai, proyeksi kebutuhan pegawai selama lima tahun, serta rencana penataan kelembagaan.

Selain itu, sosialisasi dimaksudkan untuk lebih memahami kebijakan dan implementasi Analisis Jabatan (Anjab) dan ABK (Analisis Beban Kerja) dalam rangka memperoleh informasi jabatan yang berguna untuk penataan

kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan diklat yang berbasis pada kinerja dalam mewujudkan PNS yang berdaya guna dan berhasil guna.

### **Rotasi Pejabat**

Mutasi dan promosi, atau lebih tepatnya rotasi jabatan, merupakan suatu hal yang wajar dan memang harus dilakukan sebagai bagian dari proses penyegaran dan penyesuaian kebutuhan personil dalam sebuah organisasi birokrasi.

#### **Foto pelantikan pejabat**

Sebagai bagian sebuah proses, maka rotasi jabatan seperti ini akan selalu ada selama kebutuhan dan situasi organisasi menghendaknya. “Perlu kita sadari, jumlah sumber daya dan personil yang ada tentu tidak semuanya dapat diakomodir, mengingat jumlah posisi jabatan yang ada terbatas. Baperjakat juga tentunya sangat selektif dalam menempatkan seseorang dalam suatu jabatan, melalui penilaian-penilaian yang proporsional menyangkut berbagai aspek”, ujar Walikota.

Walikota juga mengingatkan, bahwa jabatan sesungguhnya adalah sebuah amanah dan kepercayaan yang diberikan tidak hanya dari atasan dan pemerintah daerah, namun jabatan juga merupakan amanah dan kepercayaan dari masyarakat.

### **Organisasi yang Lebih Mantap**

Dengan berbagai upaya pendayagunaan yang telah dilakukan secara berkelanjutan selama ini, maka kini Pemerintah Kota Bima telah memiliki aparatur pemerintah dengan struktur organisasi yang lebih mantap,

disertai sistem manajemen yang lebih efisien dilengkapi piranti teknologi informasi dan komunikasi yang baik; serta didukung oleh pegawai negeri yang lebih bersemangat pengabdian, memiliki kecakapan teknis dan manajerial yang memadai, siap menghadapi tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

*Bagian 5*  
*Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan*  
*Masyarakat dan Penguatan Ekonomi*

UNDP (*United Nations Development Programm*) dalam model pembangunannya, menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Salah satu alat ukur untuk melihat aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia adalah melalui *Human Development Index* yang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indikator tersebut dapat digunakan oleh UNDP untuk mengamati dampak dari era globalisasi terhadap perkembangan penduduk di setiap negara.

Hasil penghitungan IPM pada tahun 2010, menempatkan Kota Bima sebagai daerah yang mempunyai kriteria menengah atas dalam pembangunan manusia. Hal ini didasarkan pada kriteria pencapaian IPM yang mencapai angka indeks 68,56.

IPM Kota Bima mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dari indeks 64,2 pada tahun 2005 menjadi 68,56 pada tahun 2010. Peningkatan IPM berkaitan erat dengan penguatan ekonomi kemasyarakatan.

Untuk penguatan ekonomi kemasyarakatan, Pemerintah Kota Bima menyusun program-program berikut:

1. Pemberian bantuan dana bergulir bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);

**Foto penyerahan dana bergulir**

2. Bantuan mesin dan peralatan untuk peningkatan teknologi Industri Kecil Menengah (IKM);

**Foto penyerahan alat/mesin**

3. Bantuan sarana pemasaran pedagang kecil dan kaki lima;

**Foto lapak**

4. Gelar even pasar murah dan pasar Ramadhan;

**Foto Pasar Ramadhan**

5. Himbauan penggunaan pakaian dinas berbahan tenun khas daerah;
6. Pembangunan hutan kemasyarakatan dan kebun bibit rakyat; serta

**Foto area hutan**

7. Perlindungan dan pengelolaan mata air, penancangan program kali bersih dan penetapan lokasi lahan abadi.

**Foto penghijauan**

Sementara kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Pemberdayaan lembaga-lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan agar mampu ikut mengawasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan dana kelurahan.
2. Menggalang dan menumbuhkembangkan kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan SDA dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
3. Menumbuhkembangkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengelola SDA.

Berkaitan dengan pengelolaan mata air, Pemerintah Kota Bima giat mengeksplorasi keberadaan mata air dengan debit besar, untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk pertanian, maupun air bersih untuk Mandi Cuci Kakus (MCK).

Baru-baru ini Pemerintah Kota Bima telah berhasil mengangkat air dari mata air Mada Masa di wilayah Kecamatan Rasanae Timur, dari kedalaman 50 meter di bawah permukaan tanah, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga setempat.

### **Penurunan Angka Kemiskinan**

Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 21,55%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yaitu 13,60%. Kota Bima mencatat persentase kemiskinan terkecil di NTB, yaitu 12,80%, bahkan lebih kecil dari rata-rata nasional.

### **Gerakan Bebas Buta Aksara**

Indeks Pembangunan Manusia sangat dipengaruhi oleh Angka Melek Huruf atau Bebas Buta Aksara.

Pada tahun 2010, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk Kota Bima sudah mencapai 93,74 persen, artinya masih terdapat kurang dari 7 persen penduduk yang buta huruf. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB, pada tahun 2010 posisi AMH Kota Bima memiliki prestasi yang tertinggi dan bahkan melampaui Kota Mataram yang merupakan pusat pendidikan. Pencapaian ini tentu cukup membanggakan bagi dunia pendidikan di Kota Bima, karena kabupaten/kota lain ternyata masih ada yang mempunyai AMH di bawah 75 persen.

#### **Foto kegiatan PKBM Nggaro Nangga**

Pemerintah Kota Bima bertekad untuk terus meningkatkan AMH Kota Bima, salah satunya dengan melakukan *Launching* Gerakan Penuntasan Buta Aksara Tingkat Kota Bima oleh Wakil Walikota hari Senin, 1 November 2010 di Taman Kodo Kelurahan Kodo.

### **Peningkatan Kapasitas Petani**

Pertanian masih menjadi salah satu sektor basis Kota Bima. Peningkatan kapasitas petani dilakukan melalui pemberian bantuan kepada

berbagai gabungan kelompok tani (Gapoktan). Dengan dana bantuan tersebut, diharapkan Gapoktan dapat melaksanakan berbagai kegiatan untuk pemberdayaan anggotanya. Pada tahun 2010 hingga 2012, Pemerintah Kota Bima menyerahkan bantuan bagi Gabungan Kelompok Tani yang tersebar di seluruh Wilayah Kota Bima.

#### **Foto area persawahan**

Pada tahun 2010, bantuan diberikan pada Gapoktan di 13 kelurahan. Pada tahun 2011, bantuan diberikan pada Gapoktan di 7 kelurahan. Pada tahun 2012, bantuan diberikan pada Gapoktan di 8 kelurahan, dengan nilai bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk masing-masing Gapoktan.

#### **Foto penyerahan bantuan untuk Gapoktan**

### **Rehabilitasi Rumah Sederhana–Tidak Layak Huni (RS–TLH)**

Peningkatan derajat hidup masyarakat diupayakan melalui pelaksanaan berbagai program sosial kemasyarakatan. Salah satunya adalah dengan melakukan rehabilitasi Rumah Sederhana – Tidak Layak Huni (RS-TLH).

#### **Foto bedah rumah**

Pada tahun 2011, Kota Bima mendapat alokasi anggaran Rehabilitasi RS-TLH dari Kementerian Sosial RI yang mencakup 25 unit rumah di Kelurahan Kolo, 21 unit rumah di Kelurahan Tanjung, 21 unit rumah di Kelurahan Sambinae, dan 23 unit rumah di Kelurahan Nitu. Masing-masing rumah mendapat bantuan Rp. 10.000.000,- yang dapat digunakan untuk merehabilitasi rumah. Peletakan batu pertama Rehabilitasi RS-TLH dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 September 2011 di Kelurahan Kolo.

Tahun 2012 Kota Bima mendapat bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) dari Pemerintah Provinsi NTB dengan peruntukan

sebanyak 219 unit rumah senilai Rp. 1.095.000.000,-. Selain dari dana Pemprov, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni juga dilaksanakan dengan anggaran dari APBD Kota Bima untuk 320 unit rumah dengan nilai anggaran Rp. 1.600.000.000,-. Total rumah tidak layak huni yang telah direhab adalah sebanyak 539 unit rumah, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.695.000.000,-.

Sebelumnya, pada tahun 2011 telah dilakukan rehabilitasi 400 unit rumah, sementara tahun 2012 sebanyak 539 unit rumah, dengan menggunakan dana dari APBD I dan APBD II. Bantuan lain adalah dari program PNPM Mandiri, yaitu sebanyak 100 unit rumah. Jumlah tersebut ditambah dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari Dinas Sosial sebanyak 100 unit rumah dengan dana APBN sebesar Rp. 900.000.000,- untuk 90 rumah, dan dana APBD senilai Rp. 50.000.000,- untuk 10 rumah.

Sehingga untuk Kota Bima, total rumah tidak layak huni yang telah direhab adalah sebanyak 1.139 unit rumah yang tersebar di 5 kecamatan dan 38 kelurahan. Menurut data, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Bima adalah sebanyak 2.818 rumah, berarti masih tersisa 1.679 unit rumah.

### **Program KUM Bidang “Tenun Gedongan” Khas Bima**

Bertempat di SDN 15 Kota Bima di Kelurahan Ntobo, Walikota melakukan pembukaan Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Bidang “Tenun Gedongan” Khas Bima Tahun 2011, pada tanggal 24 Oktober 2011.

Tenunan telah lama menjadi salah satu warisan budaya yang kita banggakan. Hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki tenunan khas masing-masing. Demikian pula halnya dengan daerah Bima. Ada banyak jenis tenunan

yang kita miliki, misalnya mesrai, galendo, dan nggoli. Namun, sayangnya, tenunan khas Bima belum cukup mampu bersaing di pasaran nasional.

Kendala yang kita hadapi bukanlah soal kualitas atau keindahan motif dan sebagainya, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang subjektif dan bersifat khas, tidak bisa dibandingkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Tantangan yang kita hadapi lebih kepada masalah produksi dan harga produk. Sejauh ini, tenunan Bima masih dihasilkan dalam jumlah yang sangat kecil, belum mampu memenuhi permintaan pasar. Harganya pun lumayan mahal, jauh lebih mahal dari kain khas daerah lain, misalnya tenunan Lombok.

### **Foto tenun dan hasil tenun**

Setiap ada *event* nasional, rombongan Pemerintah Kota Bima selalu melakukan promosi dengan membawa dan memamerkan tenunan Bima. Respon yang didapat juga sangat baik, terbukti dengan banyaknya kontingen daerah lain yang tertarik. Namun, lagi-lagi, kendalanya adalah pada masalah kuantitas. Kita selalu kesulitan memenuhi jumlah pesanan. Kini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menemukan upaya terobosan untuk memecahkan tantangan ini. Melalui kegiatan KUM ini, diharapkan mampu memberi pencerahan bagi para pelaku kerajinan tenun khas Bima, serta membawa hasil nyata dalam hal peningkatan produksi.

### **Foto pameran**

### **Pelatihan *Processing* Makanan**

Pembukaan acara Pelatihan *Processing* Makanan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK), dilakukan oleh Walikota pada hari Senin, 6 Juni 2011, bertempat di aula Kantor Kelurahan

Sarae Kecamatan Rasanae Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kota Bima. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan kader-kader wirausaha yang terampil, produktif serta meningkatkan kemampuan keterampilan, keahlian dan kompetensi, produktivitas kerja serta bisa menciptakan lowongan kerja untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Bima. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta dari berbagai kelurahan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bima.

#### **Foto pelatihan *Processing Makanan* dan hasil kerajinan**

“Kita harus mampu memotivasi masyarakat untuk mau mengubah diri, membaca dan memanfaatkan peluang pasar yang ada serta membuka usaha dengan keterampilan yang dimiliki”, ujar Walikota. Selama ini disadari bahwa kita belum mampu memenuhi pangsa pasar dengan produksi yang memiliki daya saing. Oleh karena itu, Dinas Sosnakertrans harus mampu membangun komunikasi dan koordinasi dengan Dinas lain sehingga terjadi sinergi yang dapat membantu masyarakat terutama pelaku dunia usaha.

Saat ini Kota Bima sedang melakukan pemetaan potensi terhadap seluruh wilayah yang ada di Kota Bima. Ini dimaksudkan agar kebijakan dan program kita lebih efektif dan terarah. Misalkan di Dodu, Selain lumbung padi dan hortikultura, juga sebagai penghasil pinang. Peluang ini jika mampu kita kembangkan bukan tidak mungkin bisa menjadikan Dodu sebagai daerah penghasil pinang yang tentunya dapat kita ekspor ke luar daerah atau bahkan luar negeri.

#### **Foto potensi marmar**

Demikian pula potensi di wilayah lainnya: Jatibaru dengan potensi penghasil bata, Ndano Na'e dengan perkebunan kunyit, Nitu dengan potensi

marmar, dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan keberanian kita untuk menangkap peluang yang ada serta menghadirkan investor.

#### **Sosialisasi dan Penyerahan Dana BLM-PUAP**

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima melakukan sosialisasi dan penyerahan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pada hari Selasa, 27 Desember 2011, dan Rabu, 28 Desember 2011, di tiga kecamatan lokasi Gapoktan penerima dana BLM tersebut.

Tujuan dilakukan sosialisasi adalah: (1) untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana BLM-PUAP; serta (2) untuk mengharapkan dukungan dari semua komponen masyarakat agar dana PUAP ini dapat dipergunakan sehingga berkembang menjadi model usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat petani.

#### **Foto penyerahan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)**

Peserta sosialisasi terdiri atas pengurus kelompok tani, kelompok ternak, pengolahan hasil, dan bakulan yang tergabung dalam Gapoktan, para Ketua RT dan RW, Ketua Karang Taruna, tokoh agama dan masyarakat, serta pejabat dari dinas/instansi terkait.

Untuk Kota Bima, penerima dana BLM PUAP tahun 2011 tersebar pada 3 kecamatan dengan nilai masing-masing Rp. 100.000.000,-, yaitu:

- (1) Gapoktan Oi Lanco Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda;
- (2) Gapoktan Doro Lawa Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur; dan
- (3) Gapoktan Keramat Wenggo Kelurahan Penanae Kecamatan Raba.



Untuk Gapoktan Oi Lanco Kelurahan Penatoi, penyerahan bantuan dilakukan oleh Walikota pada hari Selasa (27/12) di masjid Al-Anshor Penatoi. Untuk Gapoktan Doro Lawa Kelurahan Kodo, penyerahan bantuan dilakukan oleh Asisten II Sekda, Ir. Hj. Rini Indriati, pada hari Selasa (27/12) di masjid Baiturrahman Lingk. Kodo I. Untuk Gapoktan Keramat Wenggo Kelurahan Penanae, penyerahan bantuan dilakukan oleh Walikota pada hari Rabu (28/12) di kantor Lurah Penanae.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2211/Kpts/OT.140/4/2011 Tanggal 28 April 2011 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Tahun 2011.

Tujuan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan agribisnis, meningkatkan kapasitas penyuluh, kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan.

Selain itu, melalui program BLM PUAP, diharapkan dapat meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi sebagai mitra lembaga keuangan dalam upaya akses permodalan. Melalui dana itu, petani diharapkan dapat mengakses sumber permodalan dengan mudah dan murah. Manfaat program PUAP selain dapat meningkatkan pendapatan petani, juga dapat memutus mata rantai rentenir yang memberatkan petani dan rumah tangga miskin di perdesaan.

Walikota berharap dana PUAP bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, dan kedepan diharapkan Gapoktan yang sudah dapat mengelolanya sebagai dana simpan pinjam, dapat meningkatkan statusnya menjadi koperasi.

Walikota juga meminta kepada seluruh gabungan kelompok tani (Gapoktan) penerima dana PUAP, agar tidak menyalahgunakan bantuan PUAP karena jika dana PUAP tersebut disalahgunakan, akan menyebabkan pengurus Gapoktan berhadapan dengan hukum. Seiring dengan pengucuran dana PUAP, seluruh petugas penyuluh pertanian pendamping juga diharapkan supaya melakukan pembinaan para petani secara lebih serius.

Beliau berpesan, agar pengurus Gapoktan dapat mengelola dan memanfaatkan bantuan ini dengan baik. Bagi yang belum mendapatkan bantuan agar bersabar. Semoga bisa ditetapkan sebagai penerima dana BLM-PUAP tahun berikutnya.

#### **Pemberian Bantuan bagi IKM dan UMKM**

Rabu, 8 Februari 2012, dilaksanakan kegiatan penyerahan bantuan mesin/peralatan dan sarana perdagangan bagi IKM dan UMKM dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) – APBD Kota Bima Tahun 2011. Bertempat di Kantor Camat Raba, acara turut dihadiri oleh Walikota, beserta jajaran Kepala Dinas dan Badan lingkup Pemerintah Daerah Kota Bima.

Dalam laporannya sebagai *leading sector* kegiatan, Kepala Dinas Koperindag Kota Bima, Drs. M. Farid, M. Si, menyampaikan, dasar kegiatan ini adalah:

1. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 430 Tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Alat Perdagangan Bagi Pedagang Kecil dan Kaki Lima dari Pemerintah Kota Bima Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011; dan
2. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 431 Tentang Nama Penerima Bantuan Mesin/Peralatan, Gerobak, Tenda, dan Etalase dari Pemerintah Kota Bima Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011.

## Foto penyerahan bantuan mesin/peralatan dan sarana perdagangan bagi IKM dan UMKM

Dana kegiatan bersumber dari dana DBHCHT-APBD Kota Bima sebesar Rp. 887.516.200, dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan bagi IKM Perbengkelan sebanyak 3 (tiga) jenis peralatan, yaitu: *compressor, tools kits* (kunci-kunci), dan *snow wash*;
2. Peralatan bagi IKM genteng sebanyak 3 (tiga) jenis peralatan, yaitu: molen berjalan, molen duduk, *press* genteng,
3. Peralatan bagi IKM sandang sebanyak 4 (empat) jenis peralatan, yaitu: mesin jahit industri, mesin jahit klasik, mesin obras, dan mesin bordir;
4. Peralatan bagi IKM pangan sebanyak 7 (tujuh) jenis peralatan, yaitu: *mixer*, *mixer* standar, oven, pemotong roti, *spinner* (peniris minyak), pemotong umbi, dan mesin presto;
5. Peralatan bagi pandai besi sebanyak 4 (empat) jenis peralatan, yaitu: palu, gerinda, bor duduk, dan *blower*;
6. Peralatan IKM kerajinan sebanyak 3 (tiga) jenis peralatan, yaitu: peralatan tenun, peralatan batik, dan printer;
7. Peralatan dan bahan kemasan sebanyak 3 (tiga) jenis peralatan, yaitu: *hand sealer*, *continuous band sealer*, dan *paper bag*;
8. Peralatan bagi *Meubelair* 2 (dua) jenis peralatan, yaitu: peralatan cat dan pahat ukir.

Keseluruhannya adalah 30 jenis peralatan berjumlah 125 unit.

Sementara itu, bantuan alat pemasaran bagi pedagang dari APBD Kota Bima, sebesar Rp. 286.287.000, terdiri atas:

1. Gerobak : 15 unit
2. Tenda kerucut : 14 unit

3. Tenda biasa : 10 unit
4. Etalase : 6 unit

## Foto fisik

Jumlah penerima bantuan pemasaran bagi UKM pemasaran sebanyak 45 orang.

Keseluruhan penerima bantuan IKM dan UMKM DBHCHT – APBD Kota Bima Tahun 2011 adalah 170 orang.

Selain bantuan tersebut, juga ada bantuan dari:

1. Dinas Koperindag Provinsi NTB berupa 1 (satu) unit mesin pemipih jagung; dan
2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB berupa 3 (tiga) unit *sealer* kaki untuk 3 (tiga) orang.

Walikota menyampaikan, bantuan ini diberikan kepada yang berhak, dan kedepan kita juga akan melakukan hal yang sama bagi yang belum kebagian tahun ini. Bantuan ini kiranya dapat dimaksimalkan, sehingga tujuan dari kucuran bantuan ini dapat tercapai yang berimbang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tembakau merupakan hasil dari pulau lain, namun kita kebagian. Kita sendiri belum mampu memberikan hasil yang sama kepada daerah lain. Sejauh ini, produk yang mampu kita pasarkan hanya madu dan kain tenun. Kita juga masih menerima kucuran dana dari Pemerintah pusat. Marmer merupakan salah satu potensi yang dapat memberikan kontribusi.

Walikota juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, atas bantuan yang diserahkan. Walikota berharap Dinas Koperindag Kota Bima dapat terus meng-*update* data pelaku IKM – UMKM Kota Bima, agar dapat

diusulkan kepada Pemerintah Provinsi sehingga ke depannya jumlah penerima bantuan semakin banyak.

Jumlah IKM, UKM, dan PKL Kota Bima yang telah memiliki izin usaha adalah sebagai berikut: (1) IKM sebanyak 354; (2) UKM sebanyak 282; dan (3) PKL sebanyak 232.

#### **Pemerintah Kota Bima Siapkan Anggaran Stimulan Rp. 1,5 Miliar**

Melalui Dana APBD tahun 2012, Pemerintah Kota Bima telah mengalokasikan anggaran stimulan pembangunan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- guna menumbuhkembangkan partisipasi keswadayaan gotong royong masyarakat Kota Bima, demi tercapainya percepatan pembangunan sarana sosial, olahraga dan perbaikan lingkungan.

Tujuan dikurirkannya dana stimulan pembangunan ini adalah untuk mempertahankan dan terus menumbuhkan partisipasi dan nilai gotong royong masyarakat sehingga mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bima. Pelaksanaan anggaran stimulan diarahkan pada pembiayaan pembangunan sarana prasarana umum yang belum dan atau tidak dianggarkan dalam APBD Kota Bima tahun 2012, seperti prasarana jalan, jembatan, tempat ibadah, arena olahraga, sanitasi, serta fasilitas sosial lainnya yang meliputi penataan perumahan, penataan kebersihan, persampahan, serta program pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kota Bima.

**Foto fisik dana stimulan: lapangan volly Panggi, musholla, dll**

Sesuai peraturan Walikota Bima, penyaluran dan bantuan dari anggaran stimulan tidak dapat diberikan dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk barang berupa material yang dibutuhkan.

#### **Dinilai Sukses, Program PUGAR di Kota Bima Berlanjut Hingga 2013**

Berkat keberhasilan pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam menyukseskan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) pada tahun 2011 lalu, kini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memutuskan perpanjangan kontrak tersebut hingga 2013 mendatang. Dalam rangka kelanjutan program PUGAR, Kabid Produksi Pengolahan dan Pemasaran DKP Kota Bima Ir.Juwaid, M.AP, menghadiri acara pembahasan petunjuk pelaksana (*juklak*) dan petunjuk teknis (*juknis*) untuk program pugar yang baru bernama PNPM-KP Pugar, bertempat di Kota Semarang

“Dalam pertemuan tersebut ada perubahan mendasar tentang *hak* dan *sasaran* kelompok PUGAR, dimana kita lebih mengoptimalkan pendekatan kelompok dengan sasaran pada pembelanjaan bahan dan alat untuk pembuatan garam“, ungkapnya. Sesuai petunjuk pengerjaannya, dalam pengelolaan nantinya, dana yang diperoleh kelompok PUGAR masih tetap sama seperti pada tahun sebelumnya yaitu masuk melalui rekening kelompok, sehingga dana tersebut dikelola dan dibelanjakan sesuai dengan arahan dan petunjuk tenaga perbandingan dan tenaga ahli. Jadi, sasaran program PUGAR tahun 2012 ini, tetap mengacu pada masyarakat petani garam, dimana kelompok lama yang sudah terbentuk akan terus dikembangkan dengan dilakukan pembinaan oleh tenaga pendamping dan ahli sehingga hasilnya lebih maksimal. Sedangkan untuk pengembangan kelompok baru, akan dioptimalkan kelompok yang mempunyai areal serta lahan yang potensial untuk menghasilkan garam.

Program PUGAR bertujuan untuk pemberdayaan, terutama meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pesisir yang saat ini masih difokuskan

pada tiga wilayah yaitu Kelurahan Paruga, Dara, dan Kelurahan Melayu. Pada akhir tahun 2011 hasil PUGAR mencapai 2.617 ton.

### **16 Karang Taruna Terima Bantuan Dana dari Pemerintah**

Sebanyak 16 Karang Taruna di 16 Kelurahan di Kota Bima, Rabu, 25 Juli 2012, menerima bantuan dana dari Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dana sebesar Rp. 4.450.000,- itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja Karang Taruna dalam menjalankan program. Pencairan dana tersebut dilakukan sesuai pengajuan proposal Karang Taruna dalam bentuk pembelanjaan barang. Namun karena berbagai pertimbangan, akhirnya dicairkan dalam bentuk dana. Nominalnya sebanyak Rp. 5.000.000,-. Karena harus dipotong pajak, maka Karang Taruna menerima bersih dana tersebut sebanyak Rp. 4.450.000,-.

**Foto sekretariat dan kegiatan karang taruna**

### **Program Pemberdayaan Masyarakat Peserta HKM**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima menggelar kegiatan pemberdayaan masyarakat peserta program Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kota Bima pada hari Kamis, 6 September 2012, bertempat di kawasan Ncai Kapenta. HKM merupakan satu di antara wujud pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Waktu pengelolaannya adalah selama 35 tahun dan dievaluasi setiap lima tahun. Melalui program ini, masyarakat memiliki kewajiban menanam tanaman produktif dan ekonomis, sekaligus menjaga hutan dari kerusakan.

**Foto Ncai Kapenta**

Manfaat HKM bagi masyarakat adalah memberikan kepastian akses untuk pengelolaan hutan, serta sebagai sumber mata pencaharian masyarakat.

Selain itu, terjadi hubungan baik antara pemerintah dengan pihak yang berkaitan lainnya, sehingga tidak terjadi saling mencurigai.

Bagi pemerintah, melalui HKM masyarakat dapat memberikan sumbangan tidak langsung untuk rehabilitasi hutan yang dilakukan secara swadaya dan swadana. Dampaknya nanti pada keamanan hutan, ada sikap saling menjaga.

Menurut laporan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima, Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) HKM diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Untuk Kota Bima, IUP HKM telah ditandatangani Walikota pada hari Kamis, 21 Juni 2012.

Untuk Kota Bima, IUP HKM diberikan pada kawasan hutan produksi seluas 1.050 hektar (ha) pada dua wilayah kelurahan bagian utara Kota Bima, yaitu wilayah Kelurahan Kolo dan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota, masing-masing seluas 300 ha dan 750 ha. Jumlah masyarakat pengelola hutan sebanyak 1.326 Kepala Keluarga (KK).

**Foto Ncai Kapenta**

“Agar program ini dapat berjalan efektif, pemerintah dan masyarakat harus mampu bekerja sama dan memahami tugas dan kewajiban masing-masing. Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhutanan Dan Perkebunan Kota Bima, harus giat melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi, agar jika ada masalah yang terjadi, dapat segera diidentifikasi dan diantisipasi. Masyarakat juga harus mampu memanfaatkan program ini. Harus dipahami betul, masyarakat diberi izin pemanfaatan, bukan izin untuk merusak. Pemanfaatan untuk produksi harus diimbangi dengan sikap menjaga kelestarian. Hutan adalah sumber mata air. Maka kita wajib menjaga kelestariannya demi kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita”, ujar Walikota.

### **Menkop UKM Buka Kegiatan EKSPRO dan Resmikan Sarana Usaha PKL**

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Dr. Syarifuddin Hasan, MM, MBA, meresmikan sejumlah sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) di lapangan Pahlawan Raba Kota Bima, sekaligus membuka kegiatan EKSPRO Produk Unggulan Daerah yang digelar di tempat yang sama, Rabu sore, 14 November 2012.

#### **Foto peresmian lapak**

Jumlah sarana usaha PKL yang diresmikan adalah 50 buah lapak dan 50 buah etalase atau rambung, dengan anggaran pembangunan sebesar 375 juta rupiah dari Pemerintah Kota Bima.

Dalam sambutannya, Menkop UKM menyampaikan penghargaan atas segala upaya Pemerintah Kota Bima dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Ia juga menyampaikan, dalam agenda tahun 2013, Kementerian Koperasi dan UKM RI mengalokasikan dana sebesar Rp. 43.500.000.000,- untuk merealisasi program kerja bagi pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah yang terkait khusus di bidang produksi.

Sementara itu, Walikota Bima menjelaskan, dengan semua potensi alam yang dimiliki Kota Bima, yaitu kelautan dan perikanan, pertanian, kerajinan tenun, serta pertambangan, hal terpenting yang perlu kita perjuangkan bersama adalah ketersediaan berbagai infrastruktur penunjang agar mampu mendorong produksi dan distribusi barang dan jasa secara berkelanjutan.

“Kondisi infrastruktur penunjang seperti jalan, pelabuhan udara dan pelabuhan laut, listrik dan air di wilayah Bima masih perlu terus kita tingkatkan kemampuannya. Pemerintah Kota Bima saat ini terus merampungkan pembangunan infrastruktur jalan khususnya pembangunan jalan 2 jalur hingga

batas kota. Saya berkeyakinan upaya seperti ini menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha produktif khususnya pada kawasan cepat tumbuh”, ujar Walikota.

#### **Foto pelabuhan**

Pada kesempatan tersebut, Walikota juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI, karena pada Tahun Anggaran 2012, salah satu Koperasi Wanita Kota Bima juga memperoleh dana bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, yaitu “Kopwan Srikandi” yang diketuai oleh Hj. Akmal.

#### **Foto Walikota bersama Menkop UKM**

“Pada kesempatan ini pula, saya mohon Pak Menteri berkenan memberikan informasi, jika ada program-program di Kementerian yang bersumber dari pendanaan pemerintah pusat, hendaknya Kota Bima dapat diikutsertakan”, ucap Walikota.

### **Pemerintah Kota Bima Giatkan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat**

Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Bima merupakan dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui program-programnya, seperti Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Keserasian Sosial, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Padat Karya, dan lainnya.

Pada tahun 2012 ada banyak program yang menggunakan anggaran langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Pada tahun 2011, ada 35 KUBE Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BPLS) dengan anggaran Rp. 30.000.000,- juta per KUBE. Anggaran dari Kementerian Sosial untuk 35 KUBE BLPS itu sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Selain KUBE, tahun 2011 juga ada program Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 100 rumah, yang

tersebar di empat kelurahan, di antaranya Kelurahan Kolo, Tanjung, Sambinae, dan Nitu.

Selain itu juga, di tahun 2011 ada program Keserasian Sosial yang tersebar di delapan kelurahan, di mana per kelurahan masing-masing mendapatkan anggaran Rp. 114.000.000,-. Delapan kelurahan tersebut adalah Kelurahan Dara, Paruga, Tanjung, Nae, Rabangodu Utara, Manggemaci, Rabadompu Barat, dan Rabadompu Selatan.

Untuk tahun 2012 ada 25 KUBE Fakir Miskin yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Bima, dengan berbagai macam usaha yang mereka ajukan. Ada macam-macam usaha yang diajukan kelompok, seperti bakulan, tenun dan lainnya. Untuk jenis usaha, yang menentukan adalah KUBE sendiri. Dinas Sosial bertindak sebagai pembina yang mengarahka.

Dari 25 KUBE yang ada, masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang, maka jumlah keseluruhan dari 25 kelompok Kube adalah sebanyak 250 orang. Per orangnya mendapatkan anggaran masing-masing Rp. 2.000.000,-, sehingga total anggaran untuk KUBE tahun 2012 sebesar Rp. 500.000.000,-, yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Untuk tahun 2012, ada program Keserasian Sosial untuk empat kelurahan, yaitu Kelurahan Oi Fo'o, Lelamase, Lampe, dan Dodu. Hanya saja untuk program tersebut, baru nama dan jumlah program saja yang datang dari pusat, sementara untuk anggarannya belum diketahui jumlahnya.

Sementara untuk bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2011 hanya ada program Padat Karya, yaitu pembukaan jalan baru di Nungga sepanjang 2,5 km dari rencana awal 500 meter, dengan dibantu oleh swadaya masyarakat dan bantuan alat berat dari Walikota.

Untuk tahun 2012, pada bidang tenaga kerja ada 4 paket program, yaitu:

1. paket ternak di Panggi, Oi Fo'o, Nitu, dan Lewirato, **Foto ternak Panggi**
2. paket tambak air tawar di Lewirato yang saat ini sedang dikerjakan, **Foto tambak Pak Jaidun Lewirato**
3. paket Batu bata di Jatiwangi dan Jatibaru, dan
4. paket tambak ikan air laut. **Foto tambak air laut**

Dari empat paket tersebut, nilainya masing-masing Rp 150 juta, dan sebagian sedang dikerjakan, sementara paket lainnya, anggarannya belum dikirim dari pusat. Pada prinsipnya, program ini untuk membuka lapangan kerja, karena masyarakat yang dipekerjakan akan digaji Rp. 40 ribu per setengah hari.

## Bagian 6 Peningkatan Pelayanan Publik

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka

mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dan jika non-pemerintah, maka dapat berbentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain. Siapapun bentuk institusi pelayanannya, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Walikota Bima untuk peningkatan pelayanan publik adalah dengan berkantor di kelurahan.

**Foto kegiatan pelayanan publik**

#### **Berkantor di Kelurahan**

Pada bulan November 2011, Walikota melaksanakan program Berkantor di Kelurahan, dengan tujuan untuk melihat dari dekat dan mendengar langsung keluhan dan aspirasi warga di masing-masing wilayah kelurahan yang selama ini belum terserap.

**Foto kegiatan berkantor d kelurahan**

Untuk hari pertama, yaitu Selasa, 22 November 2011, Walikota berkantor di Kelurahan Lelamase. Kelurahan-kelurahan yang pertama

dikunjungi memang diprioritaskan pada kelurahan yang memiliki kawasan pertanian yang luas serta kelurahan yang terletak di pinggir kota. Alasannya, pada kelurahan yang dimaksud, Walikota dapat melihat dan menerima aspirasi mengenai kondisi lahan pertanian dan seperti apa pola irigasi dan lain sebagainya. Keluhan dan masukan dari warga secara langsung sangat berguna untuk dijadikan dasar bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012.

Selain meninjau sejumlah sarana dan prasarana yang ada, pada kesempatan Berkantor di Kelurahan ini pun Walikota menyempatkan diri mengunjungi rumah warga untuk melihat aktifitas harian serta kegiatan ekonomi.

**Foto kunker ke kelurahan**

#### **Sistem Pelayanan Terpadu**

Dalam pelayanan publik, penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan atau Kecamatan. Demikian bunyi Pasal 11 Ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sistem pelayanan terpadu itu dimaksudkan untuk: a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; c. memperpendek proses pelayanan; d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan e. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat, baik secara fisik maupun virtual. Sistem pelayanan terpadu secara fisik itu bisa dalam bentuk sistem pelayanan terpadu satu pintu, dan sistem pelayanan terpadu satu atap.

Dalam melaksanakan sistem pelayanan terpadu itu, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan, yang mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah inilah, maka Pemerintah Kota Bima mulai menyusun Standar Pelayanan, yang juga memuat tentang penentuan biaya/tarif.

#### **Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat**

Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu (*one stop service*) ini diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan rasa bangga terhadap pemerintahnya sendiri dan secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya kantor pelayanan terpadu maka para investor dapat mencari informasi mengenai potensi daerah yang ada di Kota Bima, seperti potensi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan wisata, yang memiliki nilai jual dan potensial untuk dikembangkan.

**Foto kantor pelayanan terpadu**

#### *Bagian 7* *Membangun Kehidupan Beragama*

Masyarakat Bima memiliki akar budaya keislaman yang sangat kuat. Hal inilah yang coba digali dan dihidupkan kembali melalui beberapa program Pemerintah Daerah, antara lain program “Kota Bima Berzakat”, “Maghrib Mengaji”, dan “Membumikan Al-Qur’an”. Program “Kota Bima Berzakat” dan



“Maghrib Mengaji” merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bima pada awal tahun 2011.

**Foto tabligh akbar**

### **Kota Bima Berzakat dan Maghrib Mengaji**

Yang dimaksud dengan “Gerakan Maghrib Mengaji” adalah menghidupkan kembali kebiasaan mengaji atau membaca kitab suci Al-Qur’an sesudah shalat maghrib. Dengan gerakan maghrib mengaji ini diharapkan dapat menangkal pengaruh negatif yang ditayangkan oleh lima ‘layar’. Kelima layar itu adalah layar televisi, telepon seluler (ponsel), internet, komik, dan majalah. Biasanya anak-anak dan orang dewasa masih suka menonton televisi pada waktu maghrib, sehingga kebiasaan mengaji setelah shalat maghrib itu seringkali dikalahkan oleh televisi, salah satu dari lima layar tadi.

Sementara program “Kota Bima Berzakat” diharapkan mampu menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

**Foto pencanangan program**

### **Pembangunan Masjid dan Musholla**

Pengembangan kehidupan keagamaan memang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Bima. Pemberian bantuan pembangunan masjid dan musholla menjadi program rutin setiap tahun.

Awal tahun 2011 dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Lailatul Qadar Kelurahan Rabadompu Timur. Selain itu, Masjid At-Taqwa serta Masjid Raya Al-Muwahiddin yang menjadi ikon Kota Bima, dimasukkan sebagai bagian dari program utama pembangunan tahun 2011 dan 2012.

Pembangunan masjid At-Taqwa Kelurahan Paruga Kota Bima mulai dilakukan. Masjid yang berlokasi di persimpangan kompleks pertokoan Sultan Kaharuddin itu merupakan salah satu ikon Kota Bima, karena berlokasi di pintu masuk kota. Apalagi, letaknya tepat di jantung perekonomian daerah.

Menandai pembangunan itu, Walikota melakukan peletakan batu pertama pada hari Rabu sore, 3 Agustus 2011. Pembangunan masjid At-Taqwa akan dibantu Pemerintah Kota Bima hingga tuntas dengan anggaran senilai Rp. 500 juta yang diprogramkan melalui APBD. “Pemkot Bima sangat mendukung pembangunan masjid. Seiring itu, saya berharap ada dukungan dari anggota DPRD untuk memprogramkan dana bantuan melalui APBD”, ujar Walikota.

Pemkot Bima sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.7,6 miliar untuk penyelesaian Masjid Raya Al-Muwahiddin. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan tempat ibadah. Namun, dalam pelaksanaannya, sedikit terhambat karena tercium ada yang tidak beres mengenai penggunaan dana bantuan sebelum Pemkot Bima mencairkan Rp. 2,5 miliar untuk tahun 2011.

**Foto masjid/musholla**

Jumat, 7 Oktober 2011, Walikota melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid Al-Ikhlas di Lingkungan Lela II. “Pembangunan masjid bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat. Di beberapa tempat, kebersamaan dan solidaritas masyarakat dalam menggalang pembangunan masjid masih rendah. Menyikapi hal ini, kami akan berkomunikasi dengan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bima agar memberikan sumbangan senilai Rp. 50 ribu/tahun. PNS Kota Bima saat ini berjumlah kurang lebih 5.000 orang, maka dalam setahun dana yang terkumpul

sekitar Rp. 2 milyar. Anggaran itu akan dialokasikan semua untuk pembangunan masjid di seluruh Kota Bima”, ujar Walikota.

Peletakan batu pertama pembangunan mushola SDN 43 Kota Bima yang terletak di Kelurahan Melayu, berlangsung pada hari Rabu, 1 Februari 2012. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Wakil Walikota, disaksikan oleh seluruh guru dan karyawan serta pelajar SDN 43 Kota Bima, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

### **Hafiah Tilawatil Qur'an**

Selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2010 hingga 2012, Pemerintah Kota Bima menggelar kegiatan Hafiah Tilawatil Qur'an. Tahun 2010 dan 2011, hafiah dilakukan secara safari pada lima kecamatan, namun pada tahun 2012 kegiatan hafiah dipusatkan di halaman kantor Walikota dengan mengundang qori internasional.

**Foto MTQ**

### **Penataan Zakat Profesi**

Dalam upaya peningkatan kualitas hidup umat, Pemerintah Kota Bima pun menerapkan penataan zakat profesi. Dana ini antara lain ditujukan untuk pembangunan dan perbaikan sarana ibadah, serta menyantuni masyarakat kurang mampu.

**Foto penyerahan bantuan bagi fakir**

### **Pelantikan Badan Waqaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Bima**

Pada Rabu, 13 Juli 2011, di halaman kantor Walikota, bertepatan dengan peringatan Isra' Mi'raj 1432 H tingkat Kota Bima, Walikota melantik Badan Waqaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Bima.

**Foto pelantikan**

Badan Waqaf Indonesia Perwakilan Kota Bima merupakan badan waqaf pertama setingkat kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan badan yang sangat berperan dalam mengembangkan wakaf di Indonesia tentunya keberadaan lembaga ini benar-benar diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Sebab, di antara tugas BWI adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf. Dengan demikian, diharapkan pengelola wakaf yang berbentuk perorangan, organisasi dan badan hukum akan mampu mengelolanya dengan baik dan profesional.

Pengelolaan zakat yang baik akan menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: umatan wahidah (umat yang bersatu), musâwah (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam), dan takâful ijtimâ'i (sama-sama bertanggung jawab).

“Kepada para pengurus BWI Perwakilan Kota Bima yang dilantik hari ini kita ucapkan selamat menjalankan tugas. Semoga mampu mengemban amanah, sehingga perwakafan mampu berkembang lebih baik, terutama dalam melakukan pembinaan, pengawasan serta pengelolaan wakaf itu sendiri. Kepada PNS yang secara ikhlas melaksanakan zakat profesi, saya ucapkan terima kasih. Inshaallah akan kami salurkan dan manfaatkan dengan penuh amanah dan bertanggung jawab”, ucap Walikota.

### **Pemerintah Tetapkan Kelurahan Percontohan Zakat**

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Bima menetapkan beberapa kelurahan percontohan pengumpulan dan pengembangan zakat pada setiap Kecamatan. Masing-masing wilayah memiliki 1 (satu) kelurahan sebagai model percontohan, diantaranya di Wilayah Asakota, Kelurahan Jatiwangi menjadi model percontohan pengumpulan dan pengembangan zakat. Kecamatan Rasanae Barat dipusatkan di Kelurahan Paruga, Kecamatan Mpunda di Kelurahan Monggonao, Kecamatan Raba di Kelurahan Rabangodu Utara, dan Kecamatan Rasanae Timur di Kelurahan Dodu. Metode ini adalah langkah awal dan pemerintah Kecamatan/Kelurahan memiliki peranan sentral dalam menyosialisasikannya.

### **MTQ dan Optimalisasi Peran LPTQ**

Pada tahun 2012, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Bima memasuki tahun pelaksanaan ke-7. MTQ Tingkat Kota Bima tahun 2012 dilaksanakan di Lapangan Samping SDN No. 27 Kota Bima, tanggal 9 – 13 Juli 2012, dengan dibuka oleh Walikota Bima.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada berbagai cabang yang dilombakan dalam MTQ Tingkat Kota Bima ke-7, yaitu sebagai berikut:

- 1) Cabang tartil = usia kanak-kanak 10 orang, remaja 10 orang, dewasa 10 orang, dan canet 3 orang;
- 2) Cabang qiro'at = 17 orang;
- 3) Cabang tilawah 1 juz = 10 orang;
- 4) Cabang tilawah 5 juz = 1 orang;
- 5) Cabang fahmil qur'an = 10 regu;
- 6) Cabang syarhil qur'an = 10 regu;

- 7) Cabang khat naskah = 10 orang;
- 8) Cabang khat hiasan mushaf = 10 orang;
- 9) Cabang khat dekorasi = 1 orang;
- 10) Cabang musabaqah kitabah al-madmum al-qur'an = 6 orang; dan
- 11) Cabang qasidah rebana = 5 regu.

Sesuai laporan ketua panitia yang juga Sekretaris Daerah Kota Bima, Ir. Muhammad Rum, sebelum acara pembukaan yang berlangsung pada hari Senin, 9 Juli 2012 di Kelurahan Rabadompu Timur, MTQ Kota Bima VII telah diawali dengan gelar Safari Haflah Tilawatil Qur'an yang dimulai di Taman Kodo Kecamatan Rasanae Timur, dilanjutkan dengan Kecamatan Mpunda, Rasanae Barat, dan Asakota.

Selama ini kontingen MTQ Kota Bima telah banyak mencatat prestasi pada level regional bahkan nasional. Yang terbaru adalah keberhasilan dua duta Kota Bima meraih juara pada ajang MTQ tingkat nasional yang dilaksanakan di Provinsi Maluku tahun 2012. Keduanya adalah M. Farhan yang mampu meraih juara pertama pada cabang tartil, dan Syamsuri yang berlaga pada golongan tilawah kanak-kanak juga mampu meraih juara pertama.

Ini semua tidak terlepas dari pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bima, serta para pelatih, yang salah satunya merupakan pelatih nasional, yaitu Ustadz Haji Ridwan Umar. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pengurus LPTQ serta para pelatih, semoga segala jerih payahnya tercatat sebagai amal sholeh", demikian ucap Walikota.

## *Bagian 8*

### *Menata Kota Menuju Piala Adipura*

Kelestarian lingkungan hidup amat penting bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang tidak memahami hal ini, dengan melakukan berbagai aktifitas yang merusak lingkungan. Akibat perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab ini, telah banyak akibat buruk kita rasakan seperti banjir, kekeringan, dan longsor. Kondisi ini diakibatkan oleh rusaknya hutan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyimpan air dalam tanah. Rusaknya hutan juga mengakibatkan

produksi oksigen berkurang serta sedikitnya gas beracun yang diserap serta sedikitnya debu yang tertangkap oleh tumbuh-tumbuhan.

#### **Foto longsor dan banjir**

Kondisi ini dapat kita pulihkan dengan memperbaiki dan menjaga kelestarian hutan serta menghijaukan lingkungan sekitar kita baik di pemukiman, jalan-jalan, taman-taman, sehingga RTH dapat dioptimalkan.

Untuk tujuan itulah, pemerintah Republik Indonesia mengadakan suatu kegiatan yang disebut dengan Adipura. Adipura berakhir pada tahun 1997 sejalan dengan berakhirnya pemerintah Orde Baru. Sejak itu, kualitas lingkungan di berbagai daerah menjadi menurun, sehingga pada tahun 2002 atas prakarsa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diadakan kegiatan Bangunpraja. Pendekatan kegiatan ini bersifat sukarela, artinya bagi kota diberi kebebasan untuk berpartisipasi atau tidak. Kemudian sejak tahun 2005/2006, program Bangunpraja diganti menjadi Adipura kembali dengan wajah yang berbeda dari Adipura pada era Orde Baru. Setiap kota yang memenuhi syarat wajib mengikuti kegiatan Adipura. Penilaian Adipura dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dilakukan pada bulan antara September-Oktober, tahap kedua antara bulan Februari-Maret, dan jika lolos dalam tahap kedua, kota tersebut masuk dalam tahap verifikasi yang dilakukan antara bulan April-Mei.

Meraih piala Adipura merupakan impian Walikota Bima. Untuk mewujudkannya, berbagai kebijakan dan program pun dilaksanakan.

#### **Foto Gotong royong**

#### **Pencanangan Program Seribu Taman**

Program Seribu Taman ditujukan untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta menciptakan pemandangan yang indah dipandang.

Keberadaan taman kota ini tentu akan mempercantik tatanan kota. Masyarakat Kota Bima menyambut positif dan sangat senang dengan pembangunan taman kota ini.

Diawal tahun 2012 Pemerintah Kota Bima masih melanjutkan pembangunan taman kota yang masih belum selesai serta membangun taman kota yang baru. Seperti pembangunan taman kota yang dilakukan di sebelah selatan Lapangan Pahlawan Raba Kelurahan Rabadompu Barat. Setelah pada tahun 2011 selesai melakukan pembangunan taman kota disebelah utara, kini di tahun 2012 mulai dilakukan pembangunan taman kota di sebelah selatan Lapangan Pahlawan.

**Foto taman kota**

#### **Penataan Taman Terus Digalakkan**

Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman (DKPP) Kota Bima terus mengintensifkan penataan dan perawatan taman pada semua sudut kota. Senin, 7 Mei 2012, sejumlah petugas kembali dikerahkan pada berbagai titik untuk membersihkan, sekaligus menata semua taman yang telah dibangun selama ini.

Kepala Bidang Pertamanan DKPP Kota Bima, H. Ahmad, SE, menjelaskan, kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk nyata mendukung komitmen Pemerintah Kota Bima merealisasikan program Seribu Taman. Selain itu, hal tersebut memang merupakan tugas rutin yang biasa dilakukan setiap hari untuk menjaga keindahan Kota Bima.

Puluhan petugas taman setiap hari telah diberikan jadwal pada sejumlah titik. Di bagian barat bertugas menata taman dari area taman Kota hingga lingkungan Ni'u. Di bagian tengah, tugasnya membersihkan taman Kelurahan Sadia hingga Sambinae, sedangkan bagian timur dari perempatan

Bulog hingga Kelurahan Lampe. "Pembagian tugas itu untuk memudahkan perawatan dan penataan taman yang telah dibangun, apalagi banyak bunga dan tanaman baru yang kita tanam", jelasnya. Tidak hanya itu, petugas penyiraman juga telah dibagi sesuai area masing-masing. Setiap hari sebanyak enam tangki air tetap dioperasikan untuk menyiram semua taman, tiga tangki pada pagi hari, dan tiga tangki pada sore hari.

**Foto taman kota**

#### **Fungsi Taman Kota**

Taman adalah sebuah tempat yang tertata dengan konsep yang membuat pengunjungnya nyaman serta biasanya ditumbuhi berbagai macam pohon dan bunga. Dengan demikian kita bisa mengetahui fungsi taman secara keseluruhan.

Fungsi taman berkaitan erat dengan fungsi kenyamanan untuk semua orang yang mengunjungnya. Apalagi untuk taman yang berada di tengah perkotaan yang sering kita sebut sebagai taman kota.

Taman yang penuh dengan pohon sebagai paru-paru kota, merupakan produsen oksigen yang belum tergantikan fungsinya. Peran pepohonan yang juga tidak dapat digantikan adalah berkaitan dengan penyediaan oksigen bagi kehidupan manusia. Setiap satu hektar ruang terbuka hijau diperkirakan mampu menghasilkan 0,6 ton oksigen guna dikonsumsi 1.500 penduduk perhari, membuat kita dapat bernafas dengan lega.

Taman kota juga mempunyai fungsi ekologis, yaitu sebagai penjaga kualitas lingkungan kota. Bahkan rindangnya taman dengan banyak buah dan biji-bijian merupakan habitat yang baik bagi burung-burung untuk tinggal, sehingga dapat mengundang burung-burung untuk berkembang. Kicauan

burung pada pagi dan sore akan terdengar lagi. Terkait dengan fungsi ekologis, taman kota dapat berfungsi sebagai filter berbagai gas pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim mikro.

Pepohonan yang rimbun dan rindang, yang terus-menerus menyerap dan mengolah gas karbondioksida (CO<sub>2</sub>), sulfur oksida (SO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), nitrogendioksida (NO<sub>2</sub>), karbon monoksida (CO), dan timbal (Pb) yang merupakan 80 persen pencemar udara kota, menjadi oksigen segar yang siap dihirup warga setiap saat.

Tanaman mampu menyerap CO<sub>2</sub> hasil pernapasan, yang nantinya dari hasil metabolisme oleh tanaman akan mengeluarkan O<sub>2</sub> yang kita gunakan untuk bernafas. Setiap jam, satu hektar daun-daun hijau dapat menyerap delapan kilogram CO<sub>2</sub> yang setara dengan CO<sub>2</sub> yang diembuskan oleh napas manusia sekitar 200 orang dalam waktu yang sama. Dengan tereduksinya polutan di udara, maka masyarakat kota akan terhindar dari risiko kemandulan, infeksi saluran pernapasan atas, stres, mual, muntah, pusing, kematian janin, keterbelakangan mental anak-anak, dan kanker kulit. Kota sehat, warga pun sehat.

Dengan terpeliharanya dan tertatanya taman kota dengan baik akan meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan, sehingga akan memiliki nilai estetika. Taman kota yang indah, dapat juga digunakan warga setempat sebagai sarana rekreasi dan tempat anak-anak bermain dan belajar. Bahkan taman kota indah dapat mempunyai daya tarik dan nilai jual bagi pengunjung. Kita sadari pentingnya tanaman dan taman sebagai paru-paru kota, sehingga program penghijauan dan perawatan taman harus terus digalakkan.

#### **Pengukuhan TKPSDA WS Bima – Dompu**

Untuk pengelolaan wilayah sungai secara terpadu, pada hari Kamis, 13 Oktober 2011, Wakil Walikota mewakili gubernur mengukuhkan susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Bima – Dompu.

#### **Pengukuhan TKPSDA WS Bima – Dompu**

Acara yang diselenggarakan oleh Dinas PU Provinsi NTB ini dihadiri oleh Wakil Kepala Bappeda Provinsi NTB serta Kepala Dinas PU Provinsi NTB. TKPSDA WS Bima – Dompu merupakan tim yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan koordinasi terkait pengelolaan air sebagai sumber daya yang sangat krusial bagi kehidupan. Tim ini juga melaksanakan fungsi pelestarian hutan di Wilayah Sungai Bima-Dompu.

#### **Gerakan Satu Milyar Pohon**

Pada tanggal 21 Desember 2011, Walikota melakukan penanaman Gerakan Menanam 1 Milyar Pohon Tingkat Kota Bima di pantai Lawata. Kegiatan tersebut turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bima, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Bima, unsur Gapoktan, mahasiswa pecinta alam, KNPI, serta Kepala BUMN Cabang Bima. Sasaran lokasi Penanaman 1 Milyar Pohon Tahun 2011 adalah mulai dari batas Kota Bima (kawasan Niu), sampai di Dana Taraha, dengan luas area mencapai 113 hektar.

#### **Foto kegiatan**

#### **Kota Sehat dan Bersih**

Pada tanggal 12 November 2011, Walikota melakukan *Launching* Kampanye Kota Bima Bersih, yang ditandai dengan konvoi motor sampah.

Sebanyak 32 unit motor pengangkut sampah diserahkan secara simbolis oleh Walikota kepada Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman, Ir. Hj. Zaenab. Motor-motor ini didistribusikan ke kelurahan-kelurahan yang mempunyai tingkat kepadatan sampah yang tinggi.

#### **Foto motor sampah**

Kota Bima juga memperoleh penghargaan sebagai salah satu Kota Sehat Nasional pada tahun 2012. Pemerintah Kota Bima pun telah membentuk Forum Kota Sehat yang akan mengoptimalkan kinerja SKPD terkait sekaligus menggerakkan peran serta masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

#### **Pemasangan Lampu Jalan**

Terciptanya Kota Bima yang bersih, indah, nyaman dan terang merupakan bagian dari agenda Walikota Bima. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan misi Kota Bima kota bersih, indah, nyaman dan terang, telah diimplementasikan melalui program pembuatan seribu taman dan pemasangan lampu-lampu jalan di seluruh wilayah Kota Bima.

#### **Foto lampu jalan Ama Hami, dll**

Proses pemeliharaan dan pemasangan lampu-lampu jalan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari jalur utama jalan Soekarno-Hatta, jalan Gajah Mada, hingga jalan-jalan lain di pinggir kota. Yang tidak kalah penting adalah pemasangan lampu pada lokasi-lokasi rekreasi, Ama Hami hingga Lawata.

#### **Bangun Gotong Royong melalui Lomba Kelurahan**

Dalam upaya meraih piala Adipura, Kota Bima terus ditata dan dibenahi, terutama dengan menggiatkan kegiatan gotong royong masyarakat. Salah satu program yang paling efektif membangun sikap gotong royong masyarakat adalah Lomba Kelurahan.

Pada ajang Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi NTB, Kota Bima kerap menuai prestasi meraih predikat juara. Pada tahun 2012 Kelurahan Rabangodu Utara berhasil meraih juara pertama Tingkat Provinsi NTB dan berhak mewakili Provinsi NTB ke tingkat nasional. Pada tingkat nasional, Kelurahan Rabangodu Utara berhasil masuk enam besar nasional.

#### **Foto gotong royong Kelurahan Rabangodu**

#### **Reboisasi Hutan**

Gerakan Reboisasi hutan menjadi agenda penting Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Kegiatan reboisasi hutan bertema “Sukseskan Penanaman 1 Milyar Pohon Indonesia 2011” ini merupakan kegiatan canangan Pemerintah pusat dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Indonesia.

Menindaklanjuti program ini, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan siap melibatkan sedikitnya 88 SKPD, BUMN, BUMD, dan BUMS untuk ikut menyukseskan program penanaman 1 milyar pohon.

#### **Foto penghijauan**

Sebagai langkah awal, Dinas Kehutanan dan Perkebunan sudah mempersiapkan sedikitnya 200 bibit pohon yang siap ditanam untuk wilayah selatan Kota Bima, tepatnya di lokasi Mada Oi Ni'u sampai Dana Taraha (Doro Raja), serta wilayah Sambina'e dan sekitarnya.

Selanjutnya yang akan ditanami adalah seluruh wilayah hutan yang ada di Kota Bima, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama gabungan kelompok tani atau Gapoktan.

200 bibit yang disediakan hanyalah langkah awal dalam mengawali program penanaman 1 milyar pohon. Kesuksesan program ini sangat ditentukan oleh keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam menanam dan memelihara. Khusus untuk petani tanah tegalan, diwajibkan untuk mendapat rekomendasi dari kelurahan setempat kalau ingin meminta bantuan bibit untuk ditanam pada lahan masing-masing.

### **Impian Menjadi *Green City***

Dengan berbagai program penghijauan yang intensif, Walikota mempunyai visi mewujudkan Kota Bima sebagai sebuah kota hijau atau *green city*. “ Saya ingin agar 20 tahun kedepan, Kota Bima sudah hijau dengan pepohonan dan suhunya selalu sejuk sehingga kita tidak perlu menggunakan *air conditioner*”, ujar Walikota.

Hal ini dapat kita wujudkan jika semua masyarakat menyadari pentingnya menjaga kelestarian hutan dan taman kota, serta berperan aktif dalam melakukan gerakan penanaman pohon.

**Foto hutan/taman kota**

### *Bagian 9*

#### *Bidang Pendidikan dan Olahraga, Sarat Prestasi*

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga upaya mencerdaskan bangsa melalui pendidikan merupakan bagian dari usaha meningkatkan kesejahteraan.

Visi Pemerintah Kota Bima dalam pembangunan dunia pendidikan adalah “ *Terwujudnya SDM Berkualitas dan Berdaya Saing*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun kebijakan untuk pembangunan bidang pendidikan berupa:



- 1) Pemerataan Kesempatan, melalui: pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru, peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberian beasiswa miskin;
- 2) Peningkatan Mutu dan Daya Saing, melalui: peningkatan mutu PKBM dan kegiatan *life skill* pada PKBM;
- 3) Perubahan Manajemen dan Pencitraan, melalui: penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, peningkatan peran dewan pendidikan dan komite sekolah, peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah.

#### **foto pembangunan sekolah**

Selama kurun waktu dua tahun terakhir, bidang pendidikan dan olahraga Kota Bima sarat dengan capaian prestasi, baik tingkat regional hingga internasional.

#### **Atlet Kota Bima Raih Lima Besar Nasional**

Atlet asal Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, peserta Kejuaraan Nasional Atletik Yuniior dan Remaja berhasil menduduki urutan kelima dari 33 provinsi. Kejurnas Atletik Yuniior dan Remaja tersebut berlangsung pada bulan April tahun 2012 di stadion Mada Senayan Jakarta.

#### **Foto penyerahan bonus atlet**

Dalam kegiatan itu, duta NTB diwakili 11 orang atlet. Cabang atletik yang diikuti mereka adalah lompat tinggi, lompat jauh, lari 100 dan 200 meter yuniior, lari estafet 4 x 200 meter remaja, tolak peluru putri, lari 400 meter yuniior, lari 100 meter putra remaja dan gawang remaja 400 meter.

Duta NTB pada *event* itu berada pada urutan ke-5 dengan perolehan 5 medali emas, 4 perak dan 1 perunggu. Pada urutan pertama bertengger kontingen atletik Jawa Timur (15 emas, 7 perak dan 10 perunggu); urutan

kedua, DKI Jaya (9 emas, 8 perak dan 6 perunggu); urutan ketiga Jateng (9 emas, 6 perak dan 4 perunggu); urutan keempat Jabar (6 emas, 6 perak, dan 7 perunggu).

Pada urutan keenam Bangka Belitung (5 emas, 3 perak, dan 3 perunggu); disusul urutan ketujuh Riau (4 emas, 8 perak, dan 6 perunggu); urutan kedelapan Sumatra Selatan (3 emas, 2 perak dan 1 perunggu), kesembilan Sumatra Barat (2 emas, 4 perak, dan 6 perunggu); dan kesepuluh Lampung (2 emas dan 1 perak).

Atlet NTB yang berasal dari Kota Bima, Arief Rahman, asal Kelurahan Paruga, mendapatkan medali emas pada cabang lari 400 meter yuniior, dan lari estafet 4 x 200 meter diraih M. Kuraisin asal Kelurahan Penaraga Kota Bima, dengan raihan medali perunggu. Atlet peraih medali mendapatkan beasiswa dari Bank Mandiri, juga piagam dari PB PASI dan Bob Hasan.

#### **Foto KONI**

#### **Pecatur Cilik Asal SDN 11 Kota Bima Raih Juara 1 Tingkat Provinsi NTB**

Prestasi gemilang kembali ditorehkan SDN 11 Kota Bima. Salah satu siswanya, Fahri Rais, telah berhasil mengungguli lawan-lawannya dari 10 Kabupaten dan Kota se-NTB, dalam ajang Lomba Catur Tingkat Pelajar Untuk Kelas Junior Tingkat Provinsi NTB Tahun 2012.

Keberhasilan yang telah dipersembahkan oleh Fahri, tentunya akan membahagiakan kedua orang tuanya, dan mengharumkan nama Kota Bima di Provinsi NTB. Tak ketinggalan Kepala Sekolah beserta guru-guru pembimbing SDN 11 tempat Fahri mengenyam pendidikan, merasa gembira dan bangga.

### **Siswa MTsN 1 Juarai Lomba Pidato Tingkat Provinsi**

Siswa Madrasah Tsanawiah negeri (MTsN) 1 Kota Bima kembali harumkan nama Kota Bima pada Lomba Pidato pada tingkat Provinsi NTB tahun 2012. Kali ini, dua orang siswa setempat yang diutus mengikuti lomba pidato Bahasa Inggris, salah satu diantaranya berhasil keluar sebagai juara pertama.

Dua orang siswa yang diutus itu masing-masing, Ummu Rofika Edi Muhlis, siswa kela II B, dan Hida Maulidiyah. Dari dua orang siswa tersebut, Ummu Rofika Edi Muhlis menyabet juara pertama, sedangkan Hida Maulidiyah menduduki urutan sembilan.

### **Siswa SDN 5 Kota Bima Jadi Duta NTB Dalam Lomba OSK Nasional**

Siswa kelas IV SDN 05 Kota Bima, Rahel Humaerah, menjadi satu-satunya duta Provinsi NTB dalam lomba Olimpiade Sains Kuark (OSK) tingkat nasional yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2012 di Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Rahel menjadi peserta terbaik tingkat Provinsi NTB setelah menyisihkan ratusan pesaingnya dari berbagai daerah di NTB. Para peserta olimpiade bergengsi ini adalah yang terbaik dan lolos seleksi dari bawah.

Prestasi itu diraih berkat kerjasama sekolah, masyarakat, komite, dan pemerintah, yang berkomitmen terus meningkatkan mutu pendidikan. Mengimbangi komitmen tersebut, dalam menghadapi para siswa terbaik utusan berbagai provinsi di Indonesia, tim guru pembina terus mengasah kemampuan Rahel.

### **Juara II Porprov Tahun 2010**

Pada tahun 2010, Kota Bima menjadi *Runner Up* dengan raihan medali sebanyak 40 medali emas, 41 medali perak dan 48 medali perunggu. Bagi para peraih medali, Walikota memberikan bonus dengan nilai total lebih dari 800 juta rupiah.

**Foto Porprov 2010**

### **Atlet Kota Bima Meraih Medali Pada *Sea Games* Tahun 2011**

Pada tahun 2011, atlet cabang atletik Kota Bima turut menyumbangkan medali emas, perak, dan perunggu bagi Indonesia dalam ajang *Sea Games* yang diselenggarakan di Palembang.

### **Kontingen O2SN Kota Bima Raih 4 Emas**

Kontingen Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMP dan sederajat dari Kota Bima, berhasil meraih empat medali emas pada sejumlah cabang yang dipertandingkan pada *event* O2SN Tingkat Provinsi NTB Tahun 2012.

Ketua Kontingen O2SN Kota Bima, H. Muhtar, melaporkan, duta olahraga usia SMP Kota Bima mengungguli Kabupaten lainnya di NTB pada perolehan medali pada sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan.

Empat medali emas yang berhasil digondol atlet Kota Bima, jelasnya, dari cabang atletik, yaitu nomor lari 60 meter putra dan putri, lempar lembing, dan lompat jauh.

Pada nomor lari 60 meter putra, medali emas diraih oleh Kamaruddin dari SMPN I Kota Bima. Pada nomor lari 60 meter itu pula, atlet Kota Bima berhasil meraih medali perak, yaitu atas nama Gufransyah dari SMPN 6 Kota Bima.

Pada nomor lari 60 meter putri, Kota Bima berhasil menjadi yang terbaik, dengan raihan medali emas oleh Nuraini dari SMPN 6 Kota Bima, yang disusul rekannya se-Kota Bima yakni Nesty Yuniarti dari SMPN 1 Kota Bima.

Pada cabang lempar lembing, medali emas diraih oleh Gufransyah dari SMPN 6 Kota Bima dengan jauh lemparan 34,32 meter. Lemparan yang membawanya meraih emas untuk kontingen Kota Bima itu, berhasil melampaui lemparan atlet duta Kabupaten Bima yang sebelumnya mewakili NTB di tingkat nasional yang hanya mampu melakukan lemparan sejauh 32 meter lebih.

Masih di cabang atletik, pada nomor lompat jauh atlet Kota Bima atas nama Nuraini dari SMPN 6 Kota Bima, juga menjadi yang terbaik dan berhasil menyumbangkan emas.

#### **Kejuaraan Taekwondo Dunia, Siswa SMAN 2 Kota Bima Sabet Medali Perak**

Prestasi membanggakan ditorehkan siswa SMAN 2 Kota Bima pada Turnamen Taekwondo Internasional (*The 2nd Esta International Invitation Taekwondo Tournament 2012*) yang diselenggarakan di Denpasar Bali. Dari sekian negara yang ikut berkompetisi, siswa yang bernama J. Joldin Watu berhasil menyabet peringkat kedua dan mendapatkan medali perak.

Joldin mengatakan dirinya kalah pada final saat bertanding dengan peserta dari negara Thailand. Namun sebelumnya, selama empat kali tarung dirinya berhasil menyisihkan peserta lain dari beberapa negara. "Saya berhasil masuk final dengan peserta dari negara Thailand", ujarnya.

Joldin masuk turnamen itu pada kelas *Junior under 55 Male*. Dalam proses yang dilewatinya hingga masuk final, selain melawan dari negara lain dia juga bertarung dengan peserta Indonesia dari Klub *Bali Spin Kick*.

Ia mengaku bangga dengan prestasi tersebut. Kendati belum mampu memperoleh medali emas, namun prestasi itu cukup membuatnya merasa telah mengharumkan nama sekolah dan daerah di kancah internasional.

#### **Atlet Panjat Tebing Kota Bima Raih Medali Emas**

Atlet panjat tebing Kota Bima berhasil meraih sejumlah medali emas, perak, dan perunggu dalam Kejuaraan Daerah FPTI NTB Tahun 2012. Ada empat kategori panjat tebing yang dilombakan, yaitu: *speed record*, *speed classic*, *boulder*, dan *lead*.

Untuk kategori *speed classic* dan *boulder*, ada lima cabang lomba, yaitu perorangan putra, perorangan putri, beregu putra, beregu putri, dan campuran. Untuk kategori *speed record* juga semula direncanakan ada lima cabang, namun ada beberapa cabang yang akhirnya gagal dilombakan karena sesuatu dan lain hal, sehingga akhirnya hanya dilombakan dua cabang, yaitu perorangan putra dan beregu putra. Sementara untuk kategori *lead* ada tiga cabang, yaitu perorangan putra, perorangan putri, dan campuran.

Kontingen Kota Bima total meraih 10 medali emas, 7 medali perak, dan 4 medali perunggu.

Kesepuluh medali emas diraih oleh: (1) Mubasir, cabang perorangan putra kategori *speed record*; (2) Miratunnisa, cabang perorangan putri kategori *speed classic*; (3) Junaidin, Mubasir, dan M. Irfan, cabang beregu putra kategori *speed classic*; (4) Miratunnisa dan Junaidin, cabang campuran kategori *speed classic*; (5) M. Nur Yasin, cabang perorangan putra kategori *boulder*; (6) Miratunnisa, cabang perorangan putri kategori *boulder*; (7) Akbar Rifcky dan Ayu Fatullah, cabang campuran kategori *boulder*; (8) Akbar Rifcky, cabang perorangan putra kategori *lead*; (9) Miratunnisa, cabang perorangan putri

kategori *lead*, dan (10) Ayu Fatullah dan M. Fadli, cabang campuran kategori *lead*.

Ketujuh medali perak diraih oleh: (1) Aris Budrasari, Junaidin, dan M. Irfan, cabang beregu putra kategori *speed record*; (2) M. Irfan, cabang perorangan putra kategori *speed classic*; (3) Nur Afni Fauziah, Anggi Ais Salsabila, dan Gita Mega, cabang beregu putri kategori *speed classic*; (4) M. Fadli dan M. Irfan, cabang beregu putra kategori *boulder*; (5) Gita Mega dan Nurwahidah, cabang beregu putri kategori *boulder*; (6) M. Irfan, cabang perorangan putra kategori *lead*; dan (7) Akbar Rifcky dan Miratunnisa, cabang campuran kategori *lead*.

**Foto panjat tebing**

#### **Walikota Sambut Siswa Peserta Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar**

Sepuluh pelajar SMUN 1 Kota Bima yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Tingkat Nasional Tahun 2012 yang dilangsungkan di Jakarta, tepatnya di gedung DPR/MPR RI, berhasil meraih juara pertama.

Raihan kontingen Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar ini merupakan persembahan manis bagi Kota Bima, yang tentunya sangat membanggakan pemerintah dan masyarakat. Prestasi ini adalah buah dari tekad dan kemauan yang keras dari para pelajar, serta dukungan dan doa dari orang tua siswa dan masyarakat Kota Bima.

**Foto penerimaan peserta lomba 4 Pilar oleh Walikota**

#### **PON XVIII Riau, Atlet Kota Bima Raih Dua Emas dan Satu Perak**

Kota Bima patut berbangga terhadap keberhasilan atletnya yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Pekan Olah Raga Nasional

ke-XVIII di Riau. Pada perhelatan akbar yang dimulai pada 11 September 2012 itu, atlet Kota Bima meraih sejumlah medali pada cabang atletik.

Khusus cabang olahraga yang membutuhkan kecepatan ini, atlet pulau Sumbawa yang mewakili NTB mendominasi perolehan medali pada cabang atletik.

*Official* atlet Kota Bima melaporkan, atlet Kota Bima, Fadlin, pada cabang atletik berhasil menyumbangkan dua emas dan satu perak.

Fadlin meraih medali emas pada nomor lari 200 meter putra dan medali perak pada nomor 100 meter putra. Selain itu, bersama tiga rekannya, Fadlin meraih emas pada nomor estafet 4x400 meter putra. Atlet Kota Bima lainnya, Nurul Imaniar, menyumbangkan medali perak pada nomor 100 meter putri.

Atlet pulau Sumbawa lainnya yang menyumbangkan medali emas bagi NTB adalah Ridwan asal Kabupaten Sumbawa pada nomor 200 meter putra. Selain itu, emas pada nomor 1.500 meter. Atlet putri pada nomor 400 meter gawang atas nama Sumiyati, asal Kabupaten Sumbawa, berhasil meraih emas.

**Foto penyerahan bonus atlet peraih medali PON Riau**

#### **Kelulusan UN Kota Bima, Menggembirakan**

Kelulusan Ujian Nasional (UN) di Kota Bima selama tahun 2010 hingga 2012 mencapai hasil yang cukup menggembirakan. Untuk semua jenjang pendidikan, angka kelulusan selama tiga tahun terakhir selalu mencapai lebih dari 95%. Pencapaian ini tentunya dapat terwujud berkat upaya banyak pihak, mulai dari Pemerintah Kota Bima, para guru, pengawas sekolah, orang tua murid, hingga para pelajar sendiri.

Walikota Bima bertekad akan mempertahankan capaian ini melalui efektifitas perencanaan dan eksekusi program bidang pendidikan.

## Bagian 10 Membangun Infrastruktur Sebagai Investasi Jangka Panjang

Pemerintah Kota Bima menyadari, untuk menjadikan Kota Bima sebagai salah satu destinasi wisata, diperlukan kemapanan infrastruktur dasar, mencakup infrastruktur jalan dan terminal transportasi, ketersediaan energi, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Maka Pemerintah Kota Bima pun menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program utama.

Pembangunan infrastruktur sangat penting dan strategis karena dapat memperkecil kesenjangan pembangunan antara kota dengan daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur memiliki efek berganda yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, meningkatkan keterhubungan, dan aktifitas ekonomi.

### **Pemugaran Paruga Nae**

Paruga Na'e, yang berlokasi di jalan Soekarno-Hatta, merupakan semacam aula yang menjadi tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan, mulai dari acara-acara pemerintahan, kegiatan seni dan budaya, hingga berbagai hajatan masyarakat.

#### **Foto Paruga Nae bagian dalam dan luar**

Pada tahun 2011, Walikota mulai menggagas rencana pemugaran Paruga Nae menjadi sebuah gedung pertemuan tertutup (*convention hall*). Ide ini dilatari oleh kebutuhan yang semakin mendesak akan keberadaan sebuah gedung yang representatif untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan formal, termasuk salah satunya adalah *event* pertemuan APEKSI Komwil IV yang pada tahun 2012 diagendakan berlangsung di Kota Bima.

Untuk tetap mengakomodir kebutuhan masyarakat akan balai pertemuan terbuka, Pemerintah Kota Bima berencana untuk membangun gedung Paruga Nae yang baru di lahan yang sebelumnya merupakan terminal Dara dan terminal Kumbe.

### **Jalan Melayu – Kolo**

Sebagai urat nadi perekonomian, maka infrastruktur jalan menjadi prioritas utama. Terkait upaya menjadikan Kolo sebagai kawasan wisata, maka

perbaikan jalan Melayu – Kolo terus digiatkan. Ruas jalan sepanjang lebih kurang 10 km antara Kelurahan Melayu dan Kolo inipun mulai dilebarkan dan dihotmix.

#### Foto jalan Melayu - Kolo

Pada tahun 2010, proyek ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari PT. Newmont Nusa Tenggara. Pada tahun 2011 mendapat anggaran Rp. 3.000.000.000,- dari Dana Alokasi Khusus dan Rp. 5.000.000.000,- dari APBN. Tahun 2012 kembali mendapat bantuan sebesar Rp. 11.000.000.000,- dari PT. PLN. Pada akhir tahun 2012, pengerjaan jalan ini sudah tuntas.

#### Pembangunan Jalan Dua Arah Niu - Ama Hami

Sebagai pintu masuk Kota Bima, terhadap kawasan Niu hingga Amahami terus dilakukan pembenahan, antara lain dengan membangun jalan raya dua jalur. Selain untuk memperindah wajah kota, pembangunan jalan dua jalur dimaksudkan untuk melancarkan arus lalu lintas keluar masuk Kota Bima yang kini semakin padat.

Proses pembukaan jalur baru pada jalan Niu–Lawata, berikut pembebasan lahan, timbunan tanah, maupun pemasangan trotoarnya, dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dengan anggaran Rp. 9.000.000.000,- yang diambil dari APBD II tahun 2011. Namun kemampuan APBD Kota Bima tidak mencukupi untuk biaya pengaspalannya.

#### Foto jalan 2 arah

Untuk pengerjaan aspal jalur baru tersebut, Pemerintah Kota Bima selanjutnya mengajukan usulan anggaran dari dana APBN ke Kementerian Pekerjaan Umum. Mekanismenya, pihak Pemerintah Kota Bima terlebih dahulu

mengajukan usulan anggaran pengaspalannya kepada Gubernur NTB. Selanjutnya Gubernur akan mengajukannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan terkait pembebasan lahan, timbunan tanah, maupun pemasangan trotoarnya, ditangani oleh Pemerintah Kota Bima dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bima.

#### Hotmix Jalan/Gang Lingkungan

Pada tahun 2011, perbaikan gang dan jalan lingkungan terus dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun 2011.

Pelaksanaan hotmix tersebar di 24 kelurahan, antara lain lingkungan Jatibaru, Jatiwangi, Melayu, Paruga, Sarae, Nae, Monggonao, Sambinae, Panggi, Manggemaci, Rabangodu Selatan, Rabangodu Utara, Rabadompu Barat, Rabadompu Timur, Ntobo, Penatoi, Lewirato, dan Sadia.

Selain dari DPPID, anggaran perbaikan jalan lingkungan dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus, yaitu untuk memperbaiki jalan lingkungan Lelamase sepanjang 1 km pada tahun 2011, serta lingkungan Kolo, Dodu, Nungga, dan Nitu pada tahun 2012. Tahun 2013, Walikota berencana untuk melakukan hotmix jalan lingkungan Ndano Nae – Matakando sebagai antisipasi perluasan wilayah perkotaan.

#### Foto jalan lingkungan dan gang

#### Pembukaan Jalan Dodu – Santangi

Pada tahun 2011, dibuka jalan alternatif yang menghubungkan Kota Bima dengan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Sebelumnya, untuk

mencapai Wawo harus ditempuh jarak lebih kurang 7 km dari Kodo. Sementara dari Nungga, jarak tempuh lebih jauh lagi dan sulit.

Setelah ruas jalan lingkungan antara Kodo dan Nungga dihotmix, berikutnya dibuka jalan alternatif antara Nungga dan Santangi Kecamatan Wawo. Mobilitas masyarakat pun lebih mudah, dengan jarak tempuh yang lebih pendek, yaitu 3 km.

**Foto jalan pintas Dodu - Santangi**

### **Pembangunan Jalan Padolo III**

Keberadaan Pelabuhan Bima berpengaruh langsung terhadap meningkatnya kepadatan arus lalu lintas. Akibatnya banyak kendaraan besar yang menggunakan jalur protokol untuk aktifitas bongkar muat pada kawasan sekitar pelabuhan. Untuk mengurai kemacetan akibat aktifitas tersebut, kemudian dibangun ruas jalan Padolo III. Pembangunan ruas jalan ini sekaligus diproyeksikan sebagai urat nadi pengangkutan hasil pertambangan marmer.

Area jalan Padolo III juga diproyeksikan sebagai kawasan pemusatan pergudangan, sehingga truk-truk yang bermuatan berat tidak perlu melalui jalan protokol dan pemukiman, sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

**Foto jalan Padolo III**

### **Pembangunan 6 Kantor Lurah dan Camat Raba**

Untuk mendukung kelancaran aktifitas pemerintahan pada tingkat Kelurahan serta Kecamatan, Pemerintah Kota Bima giat membangun gedung kantor Lurah maupun Camat.

Pada tahun 2010 hingga 2011, Pemerintah Kota Bima membangun 6 kantor Lurah, yaitu Kelurahan Rabadompu Barat, Nae, Melayu, Penanae, Sambinae, dan Santi, serta satu kantor Camat, yaitu Kecamatan Raba.

Sementara agenda tahun 2012 adalah pembangunan Kantor Lurah Oi Fo'o, Ntobo, Dodu, Nitu, Monggonao, dan Lelamase, serta rehabilitasi kantor Lurah Pane dan Camat Rasanae Barat.

**Foto kantor lurah/camat baru**

Pembangunan kantor Lurah dan Camat ini dibiayai dengan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF – PPD), dan Dana Bantuan Bencana Alam dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

### **Pembangunan Fasilitas Olahraga KONI Manggemaci**

Untuk terus memajukan dunia olahraga, pada tahun 2012 Pemerintah Kota Bima mengalokasikan dana sebesar 5 milyar rupiah dari APBD I untuk membangun fasilitas olahraga KONI di Stadion Manggemaci Kota Bima. Hingga akhir tahun 2012, pembangunan Stadion Manggemaci masih berlangsung.

**Foto KONI/Manggemaci**

### **PLTU Bonto**

Untuk menjamin ketersediaan energi listrik, Pemerintah Kota Bima merintis pembangunan PLTU. Dahlan Iskan, yang pada saat itu menjabat sebagai Dirut PT (Persero) PLN, pada hari Senin, 5 Juli 2010, meninjau langsung aktifitas pelaksanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I NTB Wilayah Bima di Lingkungan Bonto Kelurahan Kolo Kota Bima.

**Foto dgn Dahlan Iskan**

Dalam lawatannya di PLTU berkapasitas 2 x 10 MW tersebut, Dahlan bersama seluruh jajaran Direksi diterima oleh Walikota Bima M. Qurais H. Abidin serta seluruh civitas PLN Cabang Bima. Hadir menemani Dahlan, salah seorang Anggota DPR RI Dapil NTB, Muhammad Syafruddin ST. Keberadaan PLTU ini diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan listrik tidak hanya untuk wilayah Kota Bima, namun juga Kabupaten Bima dan Dompus.

**Foto dgn Rudi Mbojo**

### **Pelabuhan Bima**

Letak Kota Bima yang berada pada segitiga emas yang menghubungkan antara Kawasan Indonesia Bagian Barat, Timur dan Tengah, menjadi sebuah anugerah yang patut disyukuri. Kondisi ini harus diimbangi dengan pembangunan dan pengembangan berbagai sarana perhubungan yang representatif.

Pengembangan fasilitas pelabuhan laut menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kota Bima. Pelabuhan laut Kota Bima memiliki nilai strategis, baik dalam hal distribusi barang maupun transportasi. Terkait rencana pembukaan tambang marmer, pelabuhan Bima pun akan berperan sangat penting dalam pengangkutan hasil tambang.

Dengan total anggaran sebesar Rp. 104.000.000.000,-, rencana pengembangan pelabuhan Bima meliputi beberapa item, yaitu: reklamasi, pambungan trustel, dermaga, dan fasilitas lainnya.

**Foto pelabuhan dari berbagai sisi**

Pada hari Kamis, 28 April 2011, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang Pelabuhan Bima. Untuk pembangunan pelabuhan Bima, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Bima

mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp. 24.000.000.000,- , dan tahun 2012 mendapat alokasi Rp. 46.000.000.000,- .

Gubernur dan Wakil Gubernur pun telah melakukan peninjauan terhadap tahapan pengembangan tersebut.

### **Penyelesaian Sengketa dengan PT. Pelindo**

Pada tahun 2011, Walikota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima pernah melakukan pertemuan terbatas dengan pihak Kadin dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan. Pertemuan tersebut antara lain membahas tentang keberadaan lahan PT. Pelindo yang ditempati masyarakat di Kelurahan Tanjung dan Melayu.

Tanah milik PT. Pelindo di kedua kelurahan tersebut seluas lebih kurang 300 hektar. Dari luas tersebut, 37 hektar telah ditempati oleh warga. Dalam pertemuan tersebut, Menteri BUMN menanyakan kesanggupan Pemerintah Kota Bima untuk membebaskan lahan tersebut dari PT. Pelindo. Pemerintah Kota Bima menyanggupi, namun akan membutuhkan waktu dan dilakukan secara bertahap. Pernyataan ini ditanggapi positif oleh Menteri BUMN, dan beliau akan segera membahasnya dengan Dirut PT. Pelindo agar dapat segera diselesaikan secara administratif, dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam pertemuan dengan Menteri BUMN tersebut, mencuat gagasan untuk membuat jalan dua arah dari Pelabuhan Bima hingga bertemu dengan ruas jalan Ama Hami – Ni'u. Gagasan ini pun direspon oleh Menteri BUMN. Pemerintah Kota Bima akan bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk mereklamasi pantai Lawata serta pengerukan pantai pada area Pelabuhan.



Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dari aspek hukum, karena perlu ada Peraturan Daerah (Perda) menyangkut hal ini.

Pemerintah Kota Bima beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berencana untuk melakukan studi banding ke daerah lain yang telah sukses melakukan reklamasi dan pengerukan pantai, misalnya daerah Kepulauan Riau.

Walikota meminta kepada Lurah dan Camat yang wilayah administrasinya bersinggungan dengan masalah lahan PT. Pelindo, untuk segera melakukan inventarisasi warga yang menempati lahan PT. Pelindo. Pemerintah Kota Bima berencana untuk membebaskan lahan-lahan yang disengketakan itu secepatnya.

**Foto pemukiman warga yang masuk wilayah Pelindo**

#### **Terminal AKAP**

Sementara itu, rencana pengembangan terminal AKAP telah dirintis sejak bertahun-tahun yang lalu, namun masih terkendala masalah ketersediaan lahan. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Bima berencana mereklamasi laut di kawasan Ni'u, yang merupakan pintu masuk Kota Bima.

Kunci utama keberhasilan pembangunan adalah konektivitas jaringan transportasi. Keberadaan jaringan transportasi ini akan mendukung percepatan pembangunan. Pembangunan infrastruktur dalam hal ini adalah jaringan transportasi baik darat, udara dan laut, harus dapat melayani produk jasa pariwisata dan logistik untuk ketahanan pangan.

**Foto pengurukan di Ni'u**

Konektivitas transportasi darat, khususnya pengembangan terminal bus ini merupakan pendukung untuk melancarkan arus penumpang dan barang

yang terintegrasi, yang menghubungkan angkutan dalam provinsi dan antar provinsi. Disamping berfungsi sebagai terminal, didukung juga dengan fasilitas wisata bahari dan pusat kuliner.

#### **Drainase dan Pisanisasi Air Bersih**

Pada tahun 2011, Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.900.000.000,- dari DPPID untuk pembenahan drainase. Melanjutkan program tersebut, pada tahun 2012 Walikota menyusun program pisanisasi air bersih dari sumber air Niu untuk memenuhi kebutuhan warga Niu, sekitar Pertamina, Wadu Mbolo, serta Binabaru yang tidak terjangkau oleh pipa PDAM. Lebih lanjut, untuk memenuhi kebutuhan air dalam kota, Walikota berencana membangun jalur pipa untuk mengalirkan air bersih dari Lelamase.

**Foto drainase/pisanisasi**

Pembenahan drainase diprioritaskan pada area pasar dan pertokoan, khususnya di pasar raya Bima. Tahun 2012, Pemerintah Kota Bima menganggarkan pekerjaan fisik pasar raya Bima senilai Rp.175.000.000,- dari APBD Kota Bima. Pekerjaan fisik tersebut berupa perbaikan drainase dan pemasangan *paving block*. Program tersebut ditangani oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima.

#### **Rumah Potong Hewan**

Dalam kerangka implementasi MP3EI (*Masterplan* Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima memiliki peluang kontribusi cukup besar dalam hal pengembangan peternakan sapi dan kerbau dengan populasi saat ini mencapai hampir 300 ribu ekor (284.850 ekor) atau 31% dari populasi NTB.

Untuk mendukung industri peternakan hilir, di Kota Bima telah dibangun Rumah Potong Hewan (RPH) modern berskala nasional dengan kapasitas produksi sekitar 50-100 ekor/hari, sehingga kedepan ketiga Kabupaten/Kota di wilayah KAPET Bima tidak lagi mengirim ternak hidup melainkan sudah dalam bentuk daging atau karkas. Dengan demikian terjadi efisiensi dan hasil-hasil ikutannya seperti kulit, tulang, darah dan lain lain dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

**Foto RPH**

### **Pentingnya Pembangunan Infrastruktur**

Infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi, untuk jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas sektor-sektor terkait.

Infrastruktur seperti menjadi jawaban dari kebutuhan daerah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa, serta merendahkan biaya aktifitas investor dalam dan luar negeri.

Menyadari pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, para pakar infrastruktur sepakat bahwa dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan, sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pembangunan infrastruktur juga sepatutnya melibatkan pihak swasta

dan masyarakat demi tercapainya pembangunan berkesinambungan. Haruslah ada kombinasi yang tepat antara infrastruktur berskala besar dan kecil untuk mencapai target penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu pendekatan lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan sampai pelayanannya kepada masyarakat, guna menjamin sinergi antar sektor, daerah maupun wilayah.

**Foto jalan dan jembatan**

Pemerintah memang menghadapi tantangan serius dalam pembiayaan infrastruktur dimana keterbatasan dana menyebabkan tidak mungkin pemerintah mengandalkan metode pembiayaan konvensional untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Bahkan untuk infrastruktur dimana kelayakan finansial tidak mungkin dicapai, seperti di daerah terpencil dan pedesaan, dana pemerintah masih belum mencukupi mengingat biaya investasi yang cukup besar.

Kerjasama antar pemerintah daerah berbasis prinsip berbagi dan peduli juga perlu dikedepankan, dan intervensi pemerintah pusat diperlukan bila kepentingan infrastruktur melibatkan dua atau lebih pemerintah daerah sehingga menjadi kepentingan nasional. Yang terpenting, diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten pada pemerintah daerah.

---

## Bagian 11 Kesehatan dan Keluarga Berencana

“Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat”. Ungkapan ini kiranya tidak berlebihan. Tubuh yang sehat akan mempunyai energi untuk berkarya. Masyarakat yang sehat akan mampu melakukan kegiatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun spiritual. Masyarakat yang sehat merupakan cita-cita setiap pemerintah, tidak terkecuali Pemerintah Kota Bima.

Saat ini, jumlah Rumah Sakit dan unit pelayanan kesehatan di Kota Bima mencapai 52 unit, yang terdiri atas 1 unit Rumah Sakit, 5 unit Puskesmas, 17 unit Puskesmas Pembantu, dan 29 unit Polindes, yang tersebar di seluruh kecamatan.

**Foto Puskesmas/Polindes**

Visi Pemerintah Kota Bima dalam pembangunan bidang kesehatan adalah “*Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui Kemitraan dan Pemberdayaan*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Bima menyusun beberapa program, yaitu:

- 1) Menanamkan PHBS (Perilaku Hidup Sehat & Bersih) kepada masyarakat;
- 2) Menurunkan angka kematian bayi dan balita;
- 3) Menurunkan angka kematian ibu melahirkan;
- 4) Meningkatkan gizi bayi dan balita;
- 5) Melaksanakan imunisasi lengkap;
- 6) Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi dan air bersih kepada masyarakat;
- 7) Mengatasi kasus penyakit menular, endemik;
- 8) Meningkatkan peran dan fungsi Posyandu; dan
- 9) Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan (Puskesmas, Poskades).

**Foto kegiatan pelayanan kesehatan**

Sementara peningkatan kualitas program Keluarga Berencana ditekankan pada penguatan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS melalui penguatan kapasitas tenaga dan kelembagaan KB dan KS.

Kebijakan Pemerintah Kota Bima untuk menyukseskan program Keluarga Berencana adalah:

1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB
2. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan keluarga
3. Promosi dan penggerakan masyarakat

4. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsif gender.

#### **Pencanangan Kampanye Campak dan Polio Tambahan**

Pada tahun 2012, Walikota melakukan pencanangan Kampanye Campak dan Polio Tambahan Tingkat Kota Bima. Acara tersebut berlangsung di Kelurahan Nungga, hari Selasa, 18 Oktober 2011, dihadiri oleh masyarakat serta jajaran Pemerintah Kota Bima.

Penyakit campak dan polio adalah penyakit yang cukup berbahaya, dimana komplikasi dari campak ini dapat menyebabkan anak menderita seumur hidup. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan sejak dini sangat perlu dilakukan demi mengurangi sebaran Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan polio yang selama tiga tahun terakhir ini terjadi di provinsi NTB.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkomitmen mencegah untuk keluar dari masalah nasional ini salah satunya dengan melakukan kampanye imunisasi campak dan polio yang saat ini akan kita canangkan.

Mengapa perlu ada kesempatan kedua dari kampanye campak dan polio? Hal ini dimaksudkan untuk manjangkau anak yang belum mendapatkan imunisasi pada pelayanan rutin di Rumah Sakit maupun Puskesmas yang tersebar. Selain itu masih kurangnya *herd immunity* atau imunitas populasi usia dibawah 5 tahun yang tidak mencapai angka 80%.

Kampanye yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) yang selama 3 tahun ini tidak mengalami penurunan.

“Kepada Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* dari kegiatan ini, saya memberikan apresiasi dengan dilaksanakannya kegiatan kampanye ini.

Diharapkan ke depannya kegiatan semacam ini dapat terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu diharapkan dukungan lintas sektor atau lintas program terkait, sehingga kegiatan ini dapat mencapai hasil yang baik”, ujar Walikota.

Walikota mengajak kepada semua pihak yang terlibat dalam kampanye ini, agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi campak dan polio sehingga dapat mengurangi dampak dari komplikasi yang dapat ditimbulkan terhadap anak kita.

#### **Sukseskan Program KB, Kader Dilatih**

Masalah kependudukan, terutama pertumbuhan penduduk menjadi persoalan serius yang dihadapi Indonesia. Semakin banyak penduduk, maka semakin pelik dan kompleks permasalahan yang muncul, karena tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya. Sebagai solusi untuk menghindari ledakan penduduk, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) menuju keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Demikian dikatakan Walikota Bima, M. Qurais, saat pembukaan kegiatan Orientasi (Pelatihan) Kader Pendataan Keluarga Tingkat Kota Bima, yang digelar di aula Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bima, pada hari Rabu, 13 Juni 2012.

Kegiatan yang diikuti ratusan kader yang didominasi kaum ibu itu ditujukan untuk membekali pemahaman mereka mengenai pendataan mutasi data keluarga. Selain itu, agar mereka bisa menyosialisasikan KB pada ibu-ibu pada masing-masing wilayah kerja. “Kita prioritaskan ibu-ibu sebagai motor penggerak program KB,” ujarnya.

Walikota mengharapkan kegiatan orientasi kader dapat berkelanjutan dan para kader dapat menyosialisasikan KB pada masyarakat untuk mewujudkan substansi program “Lingkungan Biru” tersebut. Kader dan kaum ibu adalah pahlawan segala-galanya, termasuk pahlawan melaksanakan KB. “Mudah-mudahan ibu-ibu dapat menyosialisasikan pentingnya KB. Karena dengan keluarga kecil dan bahagia, secara tidak langsung sudah membantu program pemerintah,” katanya.

Kegiatan orientasi diikuti sebanyak 228 kader, yang terbagi dalam dua angkatan yakni kader Kecamatan Raba dan Mpunda sebanyak 104 orang, dan Kecamatan Rasanae Barat, Asakota, dan Rasanae Timur sebanyak 124 orang. Angkatan pertama mengikuti orientasi pada hari Rabu (13/6), sedangkan angkatan dua pada hari Kamis (14/6). Setelah orientasi ini, mereka ke lapangan mulai tanggal 1 Juli sampai 31 September untuk mendata. Tugas kader tidak hanya mendata, tetapi juga menyosialisasikan tentang KB, khususnya pada ibu-ibu. Selain itu, membantu pelayanan KB pada Pustu dan Polindes.

**Foto kegiatan pelayanan KB**

### **Cegah Penyebaran AIDS Melalui PIKARR**

Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kesehatan juga melakukan sosialisasi untuk penanggulangan dampak penyakit sosial yakni HIV dan AIDS. Program tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Juni 2011, dengan peserta berasal dari 10 kelurahan dan 10 sekolah tingkat SMP/MTs dan SMA se-Kota Bima yang dibentuk melalui Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKARR).

PIKARR sebelumnya sudah dibentuk sebanyak 46 kelompok, baik di sekolah, Remaja Masjid (Kelurahan Penaraga) dan kelurahan melalui Karang

Taruna (Kelurahan Lampe). Salah satu kelompok PIKARR juga telah mendapatkan juara satu tingkat NTB pada kategori Tegak.

### **Pelatihan Fasilitator dan Tim Pemicu STBM**

Senin, 17 September 2012, Dinas Kesehatan Kota Bima menggelar pelatihan Fasilitator dan Tim Pemicu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di aula kantor lama Walikota Bima, yang sekarang menjadi kantor BAPPEDA dan Inspektorat Kota Bima.

**Foto kegiatan**

Peserta pelatihan berjumlah 40 orang, yang terdiri atas: 5 orang Kepala Puskesmas; 20 orang Sanitarian; 5 orang perwakilan Kecamatan, serta 10 orang perwakilan lintas sektor, termasuk Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bima.

Latar belakang kegiatan ini adalah kondisi meningkatnya aktifitas pelaksanaan STBM di Indonesia, dan sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, yaitu meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses. Untuk itu dipandang perlu adanya tenaga-tenaga fasilitator yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi setiap kegiatan STBM.

Di Kota Bima, kegiatan STBM yang mulai berjalan sangat membutuhkan tenaga fasilitator pada tingkat kota yang nantinya diharapkan mampu melatih fasilitator pada tingkat kecamatan dan kelurahan, serta tersusunnya rencana tindak lanjut dari masing-masing kecamatan untuk mengadakan berbagai kegiatan STBM.

Tujuan akhir kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah peningkatan derajat kesehatan, kualitas hidup dan produktifitas bagi masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila kegiatan penyediaan air bersih, sanitasi dan perilaku higienis dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Melalui kegiatan tersebut masyarakat akan memperoleh manfaat mempunyai akses penggunaan air bersih, penggunaan sarana sanitasi dan mempunyai perilaku higienis.

Maksud dan tujuan STBM mencakup lima aksi, yaitu:

1. Memperkuat pengetahuan dan pemahaman para pelaksana kegiatan STBM sehingga mampu meningkatkan kegiatan perilaku higienis dan sanitasi melalui kegiatan STBM;
2. Meningkatkan kapasitas para pelaksana STBM tentang paradigma baru dan pendekatan pelaksanaan STBM, sehingga dapat melaksanakan kegiatan STBM secara berkelanjutan;
3. Menciptakan *demand* masyarakat yang luas, berkesinambungan dan efektif terhadap perilaku higienis dan sanitasi yang sehat, terkait dengan lima pilar kegiatan STBM khususnya pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
4. Menciptakan pemasaran yang luas, berkesinambungan, efektif dan tepat guna terhadap penyediaan produk sarana dan layanan sanitasi yang terkait dengan lima pilar kegiatan STBM khususnya pilar Stop BABS dan CTPS; dan
5. Meningkatkan perilaku higienis dan sanitasi untuk mencapai sanitasi total yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan pelayanan air bersih, sehingga dapat dicapai peningkatan derajat kesehatan,

produktivitas dan kualitas hidup terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah pedesaan.

### **Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)**

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan kota dewasa ini masih belum diikuti dengan penyediaan layanan sanitasi dasar yang memadai bagi penduduk, khususnya bagi mereka yang berpendapatan rendah dan bertempat tinggal di kawasan padat dan kumuh.

Buruknya kondisi sanitasi tersebut, serta tertinggalnya pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sanitasi membawa dampak bagi kesehatan dan lingkungan. Menyikapi kondisi tersebut, serta untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi, maka pemerintah pusat dan daerah meluncurkan suatu program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan.

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan program PPSP adalah penyusunan rencana strategis. Kegiatan utama pada tahap ini adalah penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Dokumen BPS dan SSK ini kemudian akan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen *Memorandum* Program Sektor Sanitasi (MPSS) yang jelas dan terinci, yang akan menjadi dasar dalam persiapan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi.

### **Kota Bima Canangkan Gerakan Sehari Pelayanan KB**

Guna menekan angka kelahiran dan angka kematian ibu dan bayi menuju nol (AKINO), Pemerintah Kota Bima melalui badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) didukung penuh PKK setempat, Selasa 21 Februari 2012, mencanangkan program dan gerakan Sehari Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Tingkat Kota Bima.

Pencanangan secara serempak di seluruh PKM, Pustu di seluruh wilayah Kota Bima, diawali pada Pustu Kelurahan Rabadompu Barat yang dihadiri Wakil Walikota Bima dan sejumlah pejabat teras pemerintah setempat serta masyarakat wilayah tersebut.

Salah satu program unggulan BKKBN/BPPKB adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat dan keluarga menuju pelayanan KB dan penyediaan alat kontrasepsi secara gratis, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Masyarakat yang dilayani bukan saja di wilayah perkotaan, melainkan juga masyarakat yang berada di wilayah-wilayah *galcitas* (tertinggal, terpencil dan perbatasan). Faktanya, sejumlah daerah semisal Kabanta, Lelamase, Toloweri, Ndano Nae, Nitu, Oi Fo'o dan Kolo menjadi perhatian untuk hal itu.

#### **Foto kegiatan pelayanan KB**

Di Kota Bima pada tahun 2011, pencapaian program KB mencapai angka 130 persen atau 7.882 orang, dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) atau target sebesar 6.452 orang. Hal itu merupakan prestasi yang cukup membanggakan. Secara nasional pencapaian program KB untuk Provinsi NTB berada pada urutan ketiga.

#### **Pengabdian Bidang Kesehatan Kota Bima Raih Penghargaan**

Bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-48 tahun 2012, sejumlah pengabdian bidang kesehatan di Kota Bima meraih penghargaan. Para peraih penghargaan tersebut dibacakan pada saat upacara peringatan Hari Pahlawan ke-67, yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-48 dan hari KORPRI ke-41, Tingkat Kota Bima, di halaman kantor Walikota pada Sabtu pagi, 10 November 2012.

#### **Foto penyerahan piagam**

Penghargaan bidang kesehatan yang pertama berupa "Pin AKINO" yang diberikan kepada bidan yang mampu mencapai Akino (angka kematian ibu nol). Penghargaan ini diberikan kepada bidan Akino atau bidan yang berprestasi dalam menekan/mencegah kematian ibu melahirkan. Persyaratannya antara lain: bidan itu telah bertugas minimal lima tahun di desa dan dalam 10 tahun tidak ada kematian ibu melahirkan, serta memiliki program inovatif dan kinerja programnya diatas target yang ditetapkan.

Untuk tahun 2012, penghargaan Pin AKINO untuk Kota Bima diraih oleh Bidan Nurhafati, yang bertugas sebagai bidan di Kelurahan Rabadompu Barat. Bagi para Bidan AKINO, Dinas Kesehatan Provinsi NTB memberikan hadiah serta Pin Akino yang terbuat dari emas.

Yang kedua, adalah pemberian penghargaan bagi PNS yang mengabdikan dan berdedikasi dalam hal penanggulangan penyakit TBC di Kota Bima, selama periode penilaian tahun 2011. Penerima penghargaan ini mencakup 3 kategori jabatan, yaitu Dokter, Pengelola Program Penanggulangan TB, serta Kepala/Petugas Laboratorium. Mereka memperoleh penghargaan Ksatria Bhakti Husada Bintang Dua, Tiga, Empat, dan Lima, serta Manggala Karya Bakti Husada, dari Kementerian Kesehatan RI.

Daftar penerima penghargaan tersebut adalah sebagai berikut:

*Kategori Dokter.* (a) Dr. Agus Dwipitono, M. Kes, (Kepala Puskesmas Paruga) meraih Ksatria Bhakti Husada Bintang Lima; (b) Dr. Nurojiyah Azis, (Kepala Puskesmas Asakota) meraih Ksatria Bhakti Husada Bintang Empat; (c) Drg. Budi Prabowo, (Kepala Puskesmas Mpunda) meraih Ksatria Bhakti Husada Bintang Tiga; (d) Dr. Muh. Natsir, (Kepala Puskesmas Rasanae Timur) meraih Ksatria Bhakti Husada Bintang Dua; dan (e) Dr. Iin Zakiah Derajad, (Kepala Puskesmas Penanae) meraih Ksatria Bhakti Husada Bintang Satu.

*Kategori Pengelola Program.* (a) Hj. Sitti Aisiyah, S.KM, (Pengelola Program TB Puskesmas Paruga), meraih Ksatria Bhakti Husada Bintang Lima; (b) St. Juhriah, A.Md.Keb, (Pengelola Program TB Puskesmas Mpunda), meraih Ksatria Bhakti Husada Bintang Empat; (c) Lina Kurniawati, A.M.Kep, (Pengelola Program TB Puskesmas Asakota), meraih Ksatria Bhakti Husada Bintang Dua; (d) M. Indardinata, A.Md.Kep, (Pengelola Program TB Puskesmas Rasanae Timur), meraih Ksatria Bhakti Husada Bintang Dua; dan (e) Nurataya, S.Kep, (Pengelola Program TB Puskesmas Penanae), meraih Ksatria Bhakti Husada Bintang Satu.

*Kategori Kepala/Petugas Laboratorium.* (a) Titik Widiastuti, S.KM, (Laboratorium Puskesmas Paruga) meraih Manggala Karya Bakti Husada Bintang Lima; (b) Sunarti, (Laboratorium Puskesmas Asakota) meraih Manggala Karya Bakti Husada Bintang Empat; (c) Nuraini, SH, (Laboratorium Puskesmas Mpunda) meraih Manggala Karya Bakti Husada Bintang Tiga; (d) Arif Rahman, (Laboratorium Puskesmas Rasanae Timur) meraih Manggala Karya Bakti Husada Bintang Dua; dan (e) Siti Anisa, (Laboratorium Puskesmas Penanae) meraih Manggala Karya Bakti Husada Bintang Satu.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda Kota Bima. Pada kesempatan tersebut Walikota juga menyerahkan nota

kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) program penanggulangan Penyakit TBC dengan 3 instansi, yaitu Dikes Kota Bima, RSUD Bima, dan RS PKU Muhammadiyah Bima.

Menurut Walikota, penghargaan itu dimaksudkan untuk memotivasi peningkatan kinerja pelayanan medis, sekaligus mendorong petugas medis lainnya agar bekerja maksimal. Pemberian penghargaan kepada para "pahlawan" kesehatan itu akan terus berlanjut, sehingga membuka ruang kepada petugas medis lainnya untuk bersikap dan bertingkah laku teladan.

## Bagian 12

### Pengembangan Potensi dan Promosi Daerah

Anggaran Kota Bima masih didominasi oleh dana perimbangan, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Karena PAD masih jauh dibawah 50% dari keseluruhan APBD, maka Kota Bima memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Berbagai kegiatan pembangunan di Kota Bima pembiayaannya masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Kondisi inilah yang kemudian mendesak Pemerintah Kota Bima untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang ada sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satunya yang paling menjanjikan adalah pertambangan marmer.



### Tambang Marmer

Kota Bima memiliki potensi bahan tambang galena dan marmer. Tambang galena sebelumnya pernah beroperasi, namun izin tambang tersebut kemudian dicabut karena tidak memenuhi beberapa persyaratan selama proses pengoperasian berjalan. Pencabutan izin tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima agar tidak merugikan masyarakat.

Identifikasi potensi marmer dilakukan 3,5 tahun yang lalu, dan sejak itu dimulailah perjuangan panjang merintis rencana pembukaan tambang marmer ini. Selama 3,5 tahun Pemerintah mendapat berbagai reaksi dari berbagai elemen masyarakat, ada yang menolak, namun sebagian besar masyarakat umumnya mendukung.

#### Foto marmer

Pada akhir tahun 2011, perjuangan ini berhasil. Warga yang bermukim di lokasi yang akan dijadikan tambang bersedia direlokasi dengan ganti rugi yang disepakati oleh Pemerintah dan masyarakat. Kesediaan warga setempat untuk pindah tidak lepas dari pendekatan persuasif dan sosialisasi yang terus dilakukan oleh semua jajaran Pemerintah serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kamis, 15 Desember 2011, dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan fasilitas perkantoran dan pabrik pengolahan batuan marmer PT. Pacific Union Indonesia (POI) di Lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

Keberadaan tambang marmer diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah serta menyerap ribuan tenaga kerja.

### Pariwisata Kota Bima Berbasis Pesona Alam dan Budaya

Karena posisinya yang terletak di tengah-tengah segitiga emas tujuan pariwisata nasional, yaitu Bali, Pulau Komodo, dan Bunaken, Kota Bima memiliki fungsi strategis sebagai kota transit. Namun lebih dari itu, Kota Bima sendiri memiliki berbagai potensi pariwisata untuk ditawarkan, khususnya wisata alam.

#### Foto potensi pariwisata

Visi pembangunan bidang pariwisata adalah “*Mendorong Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kepariwisata Yang Berwawasan Budaya, Ramah Lingkungan dan Melibatkan Peran Serta Masyarakat Luas*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 3 kebijakan yang diambil, yaitu:

1. Pengembangan pemasaran pariwisata;
2. Pengembangan destinasi pariwisata;
3. Pengembangan kemitraan.

Pengembangan potensi Pariwisata Kota Bima kini mendapat perhatian penuh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bima. Dinas Pariwisata Kota Bima telah merumuskan kebijakan strategis, yaitu Pariwisata Kota Bima berbasis Pesona Alam dan Budaya.

#### Foto potensi pariwisata

Pariwisata Kota Bima berbasis Pesona Alam dan Budaya tersebut bertolak dari tiga alasan penting, yaitu, *pertama*, potensi alamnya yang memiliki kelengkapan berupa laut, pantai, pegunungan dan hutan.

*Kedua*, pada sisi dimensi, dimana Kota Bima sesungguhnya diproyeksikan sebagai sebuah kota transit (persinggahan) laut, darat dan udara.

*Ketiga*, bahwa pada sisi budaya Bima secara keseluruhannya ternyata mempunyai latar belakang sejarah kesultanan yaitu budaya Islami yang berbasis di Istana Asi Mbojo, situs-situs kuburan raja, dan kuburan para wali.

#### Foto Istana dan makam raja

Untuk mendukung strategi pengembangan lokasi pariwisata dalam wilayah Kota Bima seperti kawasan pesisir Ni'u, Lawata, dan Amahami, maka akan ada beberapa program, diantaranya pembangunan ruas jalan dua jalur.

Kita juga harus menonjolkan khasanah budaya melalui fasilitas sanggar-sanggar kesenian, permainan rakyat, Tari Buja Kadanda, Gantau, Sere dan berbagai kesenian tradisional lainnya, budaya dalam siklus hidup masyarakat Bima yang berazaskan nilai Islam sejak kelahiran sampai pada kematian. Seperti Kiri Loko, Saraso, cukur rambut, Sunatan (Khitanan), serta selamatan ketika ada orang yang meninggal.

#### Foto kesenian tradisional

Program-program pendukung lainnya yakni melakukan kegiatan promosi pada tingkat lokal melalui brosur, bulletin, serta dengan beberapa even lokal seperti Hanta U'a Pua, pawai budaya pada saat memperingati HUT Kota Bima, maupun penyelenggaraan pacuan kuda.

Selain dukungan yang telah disebutkan tadi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mewujudkan pariwisata Kota Bima berbasis pesona alam dan budaya.

Pengembangan SDM dapat dilakukan secara internal dengan melibatkan pihak-pihak intern dalam hal teknis untuk mendesain paket-paket yang bernilai tambah ekonomis, dan memberikan kontribusi terhadap lapangan kerja dan usaha.

#### Hanta U'a Pua Menjadi *Event* Tahunan Wisata NTB

Upacara Adat Hanta U'a Pua akan menjadi *event* tahunan kalender wisata Nusa Tenggara Barat. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, saat memberikan sambutan pada acara Hanta U'a Pua di Museum Asi Mbojo pada Rabu, 22 Februari 2012.

“ Kedepan perayaan U'a Pua ini kami rencanakan dirangkaikan dengan Festival Keraton Nusantara dan Festival Maulid Nusantara. Untuk itu, diharapkan *stakeholder* di Bima untuk mengemas acara ini dengan sebaik-baiknya dan melibatkan partisipasi masyarakat yang juga semarak”, ucap Gita Aryadi di hadapan ribuan masyarakat Bima yang memadati halaman Museum Asi Mbojo.

Perayaan Hanta U'a Pua merupakan potensi budaya yang harus terus dikembangkan dan dilestarikan baik dalam rangka promosi wisata maupun pelestarian budaya itu sendiri. Karena dalam Hanta U'a Pua mengandung misi dakwah dan makna yang mendalam bagi peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

#### Foto prosesi Hanta Ua Pua

#### Festival dan Pacuan Kuda

Festival Kuda Bima merupakan kegiatan rutin tahunan dalam upaya memperkenalkan salah satu potensi pariwisata masyarakat Bima. Tujuan dilaksanakan Festival Kuda Bima, selain untuk mengembangkan pariwisata, juga menjadikan kuda sebagai ikon Bima. Sehingga kedepannya akan populer slogan “Ingat Kuda Ingat Bima, Ingat Bima Ingat Kuda”.

Dalam event tersebut juga digelar parade kuda yang diikuti oleh ratusan ekor kuda dan puluhan benhur. Selain itu juga ada pameran kuda, pernak-pernik kuda (aksesoris kuda), kuliner berbahan dari daging kuda dan susu kuda liar. Festival juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan kesenian daerah yang dikolaborasikan dengan kesenian modern.

Pacuan kuda merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap tahun, hanya saja tahun kemarin kegiatan ini tidak dapat terselenggara karena berbagai pertimbangan.

Kuda merupakan bagian dari budaya masyarakat Mbojo. Ketangkasan menunggang kuda merupakan keterampilan yang menjadi bagian cerita-cerita sejarah Bima, yang masih terpelihara hingga kini. Minat masyarakat Bima terhadap kuda masih sangat besar dan menjangkau hampir semua elemen masyarakat.

Selain untuk melestarikan budaya, pacuan kuda dapat dijadikan ajang promosi wisata daerah. Selain itu, dapat memacu aktivitas ekonomi. Dalam ilmu ekonomi wilayah, hal ini disebut *multiplier effect*, yaitu suatu aktivitas dapat menimbulkan aktivitas yang lain.

Misalnya, banyaknya pengunjung pacuan akan menaikkan angka penjualan para pedagang, serta memperbanyak pendapatan pekerja transportasi. Hal inilah yang disebut *multiplier effect*.

Kegiatan ini juga akan menghasilkan efek pemberdayaan bagi pemilik kuda, joki, pelepas dan pelatih, juga nilai tambah bagi penyelenggara dan *stakeholders*. Belum lagi manfaat pelestarian nilai-nilai sosial budaya.

Foto pacuan kuda

### Mahasiswa UGM Lakukan Pemetaan Ekowisata di Kolo

Untuk kali pertamanya, UGM mengirim mahasiswa melakukan KKN di wilayah Kota Bima. Daerah yang dipilih sebagai tempat melaksanakan program bhakti masyarakat tersebut adalah Kelurahan Kolo. Kehadiran mahasiswa UGM di tengah-tengah masyarakat Kolo disambut antusias oleh masyarakat.

Kegiatan KKN UGM kali ini dijadwalkan berlangsung lebih kurang 5 pekan sejak tanggal 12 Juli 2012 dengan jumlah personel 25 orang mahasiswa dengan berbagai latar belakang bidang ilmu yang berbeda. Mereka bahkan berasal dari suku dan etnis yang majemuk.

Menurut Yugo Septo, mahasiswa Ketua KKN, tujuan utama KKN di Kelurahan Kolo ini adalah untuk melakukan pemetaan ekowisata. Berbeda dengan pola KKN sebelumnya yang biasanya menekankan pada aspek pembangunan fisik, maka kegiatannya lebih pada kegiatan pendataan potensi wisata sekaligus pengembangan aset, seperti hasil pertanian agar agar lebih dipoles dan dikelola secara arif dan bijaksana melalui manajemen pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kolo.

Yugo menambahkan, Kolo memiliki banyak potensi wisata yang belum tergali untuk bisa dikembangkan menjadi aset wisata berharga bagi Kota Bima yang selama ini hanya menjadi daerah transit, khususnya bagi wisatawan mancanegara sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Komodo. Santika, salah seorang mahasiswa sekaligus atlet nasional *softball* yang menjadi anggota kelompok KKN mengungkapkan, Kolo sangat bisa diandalkan menjadi titik emas bagi pariwisata Kota Bima.

Bentangan alam yang indah dengan topografi yang menakjubkan, ditambah lagi dengan keindahan pantainya yang putih bersih, air laut biru jernih, karena belum banyak pencemaran industri dengan latar belakang hutan

tropis meskipun terkesan agak kering, membuat sektor pariwisata bahari menjadi potensi besar yang bisa dikembangkan dikemudian hari.

Tokoh masyarakat Kolo, Zainul Arifin, SH, menambahkan, sejauh ini telah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk menunjukkan dharmanya bagi masyarakat Kolo, antara lain memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan hasil pertanian bagi kaum muda dan remaja, khususnya bagi siswa yang duduk dibangku SD dan SMP. Mereka juga telah melakukan pendataan dan analisis potensi wisata bahari, khususnya kondisi terumbu karang (*coral reef*) yang selama ini sebagian besar telah rusak dan hancur akibat ulah nelayan yang menurunkan jangkar ataupun mengambil hasil laut dengan cara-cara yang ilegal.

#### Foto kegiatan KKN mahasiswa UGM di Kolo

Sadar ataupun tidak, kepariwisataan modern diprediksikan akan lebih terorientasi pada daerah pantai dan laut yang airnya seperti di Pantai Kolo. Diharapkan wisatawan yang datang ke Pantai Kolo tidak hanya wisatawan lokal, namun juga bisa menarik perhatian wisatawan mancanegara.

#### Tenun Ikat

Keberpihakan Walikota terhadap industri kecil dan tenunan ikat Bima juga ditunjukkan dengan penetapan tenun ikat Bima sebagai seragam kerja para pegawai negeri maupun honorer daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bima. Kebijakan ini diharapkan dapat menghidupkan industri tenun ikat Kota Bima yang akan berdampak ganda pada banyak elemen masyarakat, mulai dari penenun, pengusaha penjual tenunan ikat, hingga para penjahit.

Saat ini, menurut daftar Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bima, terdapat 1.500 pengrajin tenun di seluruh wilayah

Kota Bima. Mereka tersebar di beberapa kelurahan, meliputi Ntobo, Rabadompu Barat, Rabadompu Timur, Oi Fo'o, Nitu, Lelamase, Kumbe, dan Nungga. Dari 1.500 pengrajin tenun ini, dibentuk 170 kelompok pengrajin, dengan pembagian berdasarkan lokasi. Dinas Koperindag berperan sebagai pembina kelompok pengrajin, yaitu dengan memberikan bantuan dana bergulir, bantuan fasilitas dan bahan baku, serta pembinaan dan pelatihan keterampilan.

#### Foto tenun ikat

#### *Fashion Show* Tenun Ikat Bima Digelar

Sebagai bagian dari *Ladies Programm* Rakor Komwil IV APEKSI ke-8, kegiatan *Fashion Show* Tenun Ikat Bima digelar. Acara dilaksanakan di Rumah Makan BBA – Doro Belo, Kamis 15 November 2012, dibuka oleh Ketua TP PKK Kota Bima, Ny. Hj. Yani Marlina M. Qurais.

Kerajinan tenunan merupakan salah satu produk unggulan Kota Bima. Tenun ikat Bima pernah dikenakan oleh kepala-kepala negara dalam pertemuan APEC di Bali pada tahun 2008. Termasuk dikenakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menyampaikan visi misinya sebagai calon presiden di hadapan anggota Kadin pada Pemilu Pilpres tahun 2009. Hal ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan bahwa daerah kecil di ujung timur NTB ini memiliki segudang potensi alam dan budaya yang dapat dikembangkan.

Baru-baru ini pun, tepatnya pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November 2012, di Jakarta ada pagelaran Lombok–Sumbawa *Ethnic Fashion 2012 Art, Creative, and Tourism*. Pagelaran ini menampilkan rancangan busana karya desainer Linda Hamidi Grander, Epoel Daeng Hasanung, Irna Mutiara, dan Deden Siswanto, dengan menggunakan bahan dasar tenunan dari pulau

Lombok dan pulau Sumbawa, dan tentunya tenunan Kota Bima juga termasuk di dalamnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini bertujuan untuk menyebarkan potensi tenun khas pulau Lombok dan Sumbawa. Diharapkan pagelaran ini dapat mengangkat tekstil khas NTB di dunia *fashion* lebih luas lagi, yakni lebih mengenalkan keindahan kain tenun NTB tanpa merusak karakteristik utama dari kain tenun itu sendiri.

### **Stigma Daerah Penerima Bantuan Harus Diubah**

Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi daerah hingga kini masih sangat bergantung pada kucuran modal dari pusat, baik yang bersumber dari DAU, DAK, dan lainnya. Padahal sesungguhnya daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah pula, salah satunya potensi batuan marmer yang tengah dikelola PT Pasifik Union Indonesia (PUI).

Dengan pengelolaan yang baik terhadap berbagai potensi sumber daya yang ada, diharapkan suatu saat Kota Bima akan berpredikat sama dengan daerah lain di NTB, yaitu sebagai penyumbang devisa yang dapat memberikan porsi royalti bagi negara, lebih-lebih Kabupaten/ Kota lain di NTB, sehingga stigma sebagai daerah yang hanya bergantung pada dana pusat perlahan tapi pasti dapat bergeser menjadi daerah penyumbang.

Untuk melangkah ke titik tersebut, perlu kerjasama dan dukungan serta kesadaran semua pihak, untuk berpikir maju dan memiliki komitmen serta etos kerja menuju kesejahteraan.

### *Bagian 13* *Kerjasama dan Koordinasi*

Dalam usianya yang cukup muda, Kota Bima telah cukup diperhitungkan tidak hanya dalam skala regional. Pemerintah Kota Bima menyadari sepenuhnya bahwa roda pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik jika ditunjang oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak.

### **Kunjungan Perwakilan Kedubes AS**

Rabu sore, 7 Desember 2011, Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, menerima kedatangan perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia. Bertempat di ruang rapat Walikota, Wawali menyambut Hillary Dauer, *Second Secretary*, bidang *Islam and Society*, beserta rombongan. Kedatangan Dauer adalah untuk berdialog dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bima.

### Foto kunjungan perwakilan kedubes AS

Topik dialog menyangkut persoalan politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Diakui Dauer, informasi mengenai berbagai topik tersebut di atas sangat diperlukan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk menjalin kerja sama yang intensif antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kota Bima. Dauer mengatakan, jalinan kerja sama dalam berbagai bidang dimaksud, perlu terus dikembangkan secara harmonis.

#### Imam Besar Baltimore Amerika Kunjungi Kota Bima

Minggu, 15 Juli 2012, Kota Bima kedatangan Imam Besar Baltimore, Maryland, Imam Mohammad Bashir Arafat. Kunjungannya dilakukan dalam rangka menjalin silaturahmi dengan umat muslim di Kota Bima.

Lelaki kelahiran Damaskus, Syiria, itu mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Kota Bima merupakan rangkaian silaturahmi pada sejumlah wilayah Indonesia. Tujuannya untuk menjalin ikatan emosional dengan para imam seluruh dunia, terutama di Indonesia yang memiliki penduduk Islam terbanyak di dunia.

Menurut pendiri *An-Nur Institute for Islamic Studies and Arabic Language in Baltimore*, Maryland, ini, penafsiran tentang Imam Besar di negara Timur Tengah dan AS bukan saja sekedar menjadi pemimpin sholat atau pemimpin doa. Tetapi, menjadi penerus para Nabi dan Rasul dalam mengemban misi dakwah untuk menyiarkan Islam.

“Untuk itu kita perlu menjangkau umat Islam maupun umat agama lain di luar AS, sehingga komunikasi dan hubungan bisa terjalin”, terangnya seperti dikutip Christian Natamado, penerjemah dari Konsulat AS, di penginapan Mutmainah.

Hal utama yang ingin disampaikan dalam lawatannya, jelas alumnus Universitas Damaskus itu, yakni saling bertukar pikiran tentang dakwah Islam yang dikembangkannya di AS. Katanya, umat Islam yang menghuni negeri Paman Sam tersebut, saat ini telah mencapai 8 hingga 10 juta orang dan diperkirakan setiap tahun terus bertambah.

Umat Islam di AS, diakuinya, saat ini telah mendapatkan tempat yang baik untuk berkembang, seperti agama mayoritas pemeluk lainnya. Hal itu karena negara telah memberikan kebebasan penuh pada pemeluknya untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya.

#### Tuan Rumah Rakor Komwil IV APEKSI

Kota Bima pun dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) IV pada tahun 2012. Kepercayaan ini diberikan oleh 13 Walikota Anggota APEKSI Komwil IV pada saat pertemuan APEKSI Tahun 2011 di Mojokerto.

Menghadapi even tersebut Pemerintah Kota Bima melakukan beberapa pembenahan, antara lain memugar Paruga Nae, perbaikan jalan, serta penataan taman kota dan pemasangan lampu jalan.

Kamis pagi, 15 November 2012, bertempat di *Convention Hall* Paruga Nae, Rakor Komwil IV APEKSI ke-8 dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Dr. Syarifuddin Hasan, MM, MBA. Pembukaan Rakor turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir.

Tema yang diusung dalam Rakor Komwil IV APEKSI ke-8 Tahun 2012 adalah “*Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Laut dan Udara untuk Penguatan Ekonomi Domestik*”.

Mekanisme Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah IV APEKSI Ke-8 terdiri atas diskusi panel, sidang pleno, dan sidang komisi, dengan menampilkan Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Deputi Bidang Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI, dan Walikota Blitar sebagai pembicara.

**Foto pembukaan dan Penutupan Rakor APEKSI, Foto pawai budaya, foto peresmian lapak, penanaman pohon**

Rangkaian kegiatan Rakor Komwil IV APEKSI ke-8 berlangsung pada tanggal 14 hingga 16 November, terdiri atas beberapa item kegiatan, antara lain pawai budaya, *Ladies Programm*, EKSP0/pameran produk unggulan, peresmian sarana usaha pedagang kaki lima, rapat koordinasi, festival kuda, serta penanaman pohon persahabatan.

Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, dalam sambutannya memuji prestasi Pemerintah Kota Bima yang mampu menekan angka kemiskinan menjadi yang terendah di NTB, bahkan lebih rendah dari rata-rata nasional.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM meminta Pemerintah Daerah Kota yang tergabung dalam Komwil IV APEKSI untuk memfasilitasi pelaku usaha kecil menengah guna memperoleh akses pembiayaan dari program kredit usaha rakyat. "Kredit usaha rakyat (KUR) adalah program pemerintah untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro guna meningkatkan kinerjanya," ujarnya.

Ia menjelaskan, koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM) dinilai tidak banyak memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sebenarnya bermanfaat untuk mendongkrak

produktivitas serta kinerja koperasi/UKM. Karena itu, koperasi dan UKM didorong untuk bisa mengejar ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi.

"Meskipun manajemennya bagus, SDM (sumber daya manusia) bagus, namun kalau tidak punya teknologi, kita akan selalu di belakang," kata Menteri Koperasi dan UKM. Menurutnya, teknologi bisa meningkatkan daya saing produk/jasa serta kinerja koperasi dan UKM di Indonesia. Melalui penerapan teknologi, produktivitas, manajemen serta TIK untuk jaringan maupun akses distribusi, maka akan bisa dicapai biaya operasional yang lebih rendah.

**Foto bersama Menkop UKM**

#### **Rakor di Kota Bima, Bentuk Penghargaan Pemprov**

Rapat Koordinasi lengkap Gubernur dengan seluruh Bupati Walikota se-NTB bersama dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi serta Kabupaten/Kota di Kota Bima, Rabu, 15 Februari 2012, merupakan kali pertama sepanjang sejarah keberadaan Provinsi NTB. Biasanya Rakor penuh tingkat Provinsi, selalu diadakan di ibukota Provinsi, yaitu Kota Mataram.

Pada tahun 2012, rapat diadakan di Bima. Secara gamblang Gubernur NTB, TGH Zainul Mazdi, MA, menjelaskan, berpindahnya lokasi Rakor dari tempat biasa, semata-mata sebagai wujud penghargaan terhadap masyarakat Bima, serta simpati dan empati terhadap Bupati Bima dan jajarannya atas insiden dan aksi pembakaran Kantor Bupati setempat beberapa waktu lalu oleh massa aksi yang menolak tambang.

Semua Bupati dan Walikota telah menyepakati Bima dijadikan lokasi Rakor dimaksud, dengan penentuan Kota Bima sebagai wilayah yang menjadi tuan rumah. Tujuan Rakor adalah dalam rangka menetapkan langkah-langkah

kedepan menuju NTB yang kondusif, aman dan terciptanya proses pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dari berbagai bidangnya.

#### **Pemkot Bima - Pemprov DKI Jakarta Teken *MoU***

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menjalin studi kemitraan dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan pendidikan. Aktualisasi kemitraan dalam bidang pendidikan itu diekspresikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (*MoU*).

Kesepahaman bersama bidang pendidikan itu ditandatangani di aula pertemuan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DKI Jakarta, pada hari Senin, 4 Juni 2012. Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Drs. Suriadi, M.Pd, dan Kepala Dinas Dikpora DKI Jakarta, Dr. Taufiqudin, M.Pd.

Studi kemitraan adalah bagian kerjasama untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik Kota Bima. Bentuknya, pertukaran informasi dan teknologi pendidikan, teknik mengajar, dan pembukaan akses informasi melalui *website* yang disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Substansinya adalah untuk pengembangan pendidikan.

Studi kemitraan ke DKI Jakarta itu diikuti sebanyak 40 orang, terdiri dari seluruh Kepala Sekolah (Kasek) tingkat SMA, SMP, SD, dan Taman Kanak-Kanak (TK). Mereka didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Ahmad Miftah, S.Sos, dan anggota komisi A yang membidangi pendidikan, Drs. Mukhtar Yasin, MAP. Para Kasek ini akan menjalin studi kemitraan dengan sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta, sehingga terbentuk sekolah kembar.

#### **BPBD Kota Bima Kerjasama Dengan OXFAM, Bangun Ketangguhan Bencana**

Senin, 3 September 2012, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima menggelar kegiatan Sosialisasi Program Membangun dan Memperdalam Ketangguhan Terhadap Bencana di Indonesia Timur Wilayah Kota Bima, yang merupakan Program Kerjasama Pemerintah Kota Bima melalui BPBD dengan Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LP2DER) Bima atas dukungan OXFAM Indonesia.

**Foto pencaangan program ketangguhan bencana di halaman kantor oleh Wakil Walikota (sebelum APEKSI)**

Sosialisasi digelar di aula kantor Walikota, diikuti oleh 52 peserta dari berbagai instansi, media massa, dan organisasi kemasyarakatan, antara lain DPRD Kota Bima, Polres Bima Kota, BAPPEDA Kota Bima, BMKG, Pos SAR Bima – Dompus, MUI Kota Bima, Koran Bima Ekspres dan Suara Mandiri, Mapala Londa, serta GOW Kota Bima.

Direktur Utama LP2DER Bima, Ir. Bambang Yusuf, menyampaikan, tujuan utama kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana cara berpartisipasi dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, sehingga terbentuk sikap ketangguhan terhadap bencana.

Walikota menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada LP2DER Bima dan OXFAM, atas inisiatif melaksanakan program tersebut.

Wilayah Kota Bima memang tidak terlalu luas, hanya 222,25 kilometer persegi. Namun *landscape* atau bentang lahan kita cukup beragam, terdiri atas 40% dataran, 15% perairan, serta 45% daerah perbukitan atau bergelombang. Karakteristik lahan seperti ini menjadikan daerah kita rawan terhadap berbagai



bencana geologi. Kita rentan ditimpa bencana tanah longsor, angin puting beliung, banjir. Wilayah kita juga terletak di atas kawasan cincin api atau *ring of fire* yang membentang mulai dari ujung barat pulau Sumatera hingga ke wilayah Nusa Tenggara Timur, lalu melingkar ke Maluku dan Sulawesi Utara, hingga Filipina. Letak geografis ini menjadikan kita rawan akan bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi. Disamping berbagai potensi bencana alam ini, kita juga rentan terhadap berbagai bencana sosial. Perkelahian antar-kampung, tawuran antar-pelajar, penyakit sosial, dan kemiskinan, karena pada hemat saya, kemiskinan merupakan akar dari sebagian besar bencana sosial yang terjadi. Karena berbagai kondisi geografis tersebut, kita perlu memiliki ketangguhan terhadap bencana.

#### **Kunjungan Staf Ahli Kedubes Kanada**

Hari Senin, 24 September 2012, bertempat di ruang kerjanya, Walikota Bima menerima kunjungan Staf Ahli Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, Mr. Philips Cordier. Walikota Bima dan Mr. Philips Cordier membicarakan beberapa hal terkait kondisi Kota Bima, termasuk keinginan menjadikan Kota Bima menjadi *green city* dengan cara mengangkat mata air di beberapa titik wilayah, seperti Kadole, Lelamase, dan Ni'u.

Keinginan tersebut juga didukung dengan cita-cita lainnya seperti menyediakan sarana dan prasarana jalan di area pegunungan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah lahan persawahan dialihfungsikan menjadi pemukiman. Nantinya pemukiman penduduk akan beralih ke area pegunungan dan juga akan memacu masyarakat untuk menanam pohon sebagai pelindung.

Dalam pembicaraan yang berlangsung akrab tersebut, Walikota Bima menitipkan program kepada Pemerintah Kanada, utamanya untuk sanitasi

lingkungan. Karena saat ini masyarakat Kota Bima masih cenderung membangun rumah di bantaran sungai dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.

#### **Foto kunjungan staf ahli kedubes Kanada**

Dilain pihak, Mr. Philips mengungkapkan kekagumannya ketika pertama kali menginjakkan kaki di Kota Bima. "Di luar bayangan saya, ternyata Kota Bima wilayahnya cukup besar, nyaman dan bersih, ditambah lagi penduduknya sangat ramah", pujiannya. Ungkapan penghargaan dan terima kasih juga diucapkannya atas sambutan Walikota dan Pemerintah Kota Bima.

Mr. Philips menjanjikan akan kembali berkunjung ke Kota Bima. Disampainya pula, terkait film "*Innocence of Muslim*" beliau menyatakan bahwa pemikiran dari film tersebut sungguh sangat bodoh. Satu hal yang sangat menarik adalah Mr. Philips sangat menyenangi kue tradisional Khas Bima yang disuguhkan, yaitu "bingkadolu".

#### **Foto makan kue**

#### **Penanaman Jagung Manis Organik, Kerja Sama dengan LPM Unram**

Kamis, 11 Oktober 2012, Wakil Walikota menghadiri panen perdana demplot jagung manis organik Program Iptek Wilayah (IbW) di Kelompok Tani Diwu Monca Kelurahan Lampe. Program ini merupakan kerjasama LPM Unram, LP3M STKIP Bima, dan BKP2 Kota Bima.

#### **Foto kegiatan**

Ir. Ahmad Sauki yang mewakili LPM Unram menjelaskan, kerjasama IbW ini adalah program dari Dikti. Tujuannya untuk menjadikan Lampe sebagai daerah penyuplai sayuran untuk wilayah Bima, karena kawasan timur Kota Bima ini sangat potensial untuk dijadikan kawasan sentra produksi sayuran.

“Kegiatan ini sudah masuk 4 kelurahan, diawali dengan pelatihan dan dilanjutkan dengan implementasi. Dalam pelaksanaannya, kami menggandeng LP3M STKIP karena memang diwajibkan untuk melibatkan perguruan tinggi setempat”, ujarnya. “Sementara ini kami memprogramkan area penanaman potensial untuk padi organik adalah Kelurahan Dodu. Untuk jagung, buah melon, dan semangka kita kembangkan di Lampe. Sementara di Kelurahan Oi Fo’o kita kembangkan komoditas bengkoang”.

Sekretaris BKP2, Tajudin, SH, memberikan penjelasan tambahan, “jagung jenis ini baru kali ini kita budidayakan. Pada lahan seluas 3 are, dalam 58 hari kita sudah bisa menghasilkan Rp. 2,5 juta, yaitu dari harga jual 2.500 tongkol jagung dengan harga jual per tongkol adalah Rp. 1.000,-. Biaya produksi yang kita keluarkan hanya untuk membeli bibit, yaitu sebanyak Rp. 150.000,-. Sementara pupuk organiknya sudah ada di sekitar kita. Kami menggunakan pupuk organik untuk menghindari efek negatif bahan kimia”.

Sementara itu, Ketua Poktan Diwu Monca, A. Farid, S.Pt, yang menjadi koordinator program, menjelaskan, area demplot yang dipanen adalah lahan seluas 30 are. Rencananya lahan ini akan ditanami 3 macam tanaman, yaitu jagung, melon, dan sayur-sayuran. Penanaman dilakukan dalam 2 tahap, yaitu jagung manis organik dan selanjutnya akan ditanami melon dan sayur-sayuran.

#### **Walikota Terima Bantuan dari Kementerian Kelautan RI**

Bertempat di ruang rapat Walikota, Jumat, 16 Desember 2011, dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Sekretaris Direktorat Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan RI, Ir. Syamsuddin, M.Si. Bantuan yang diberikan berupa 1 unit eskapator.

**Foto kegiatan pertemuan**

Dalam kesempatan yang turut dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Drs. H. Tajuddin, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, Ir. H. Sarafuddin, MM, Syamsuddin menjelaskan, tahun ini NTB mendapat bantuan dari Kementerian Kelautan RI berupa 6 unit eskapator, yang masing-masing diperoleh Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa, Dompu, dan dua kabupaten di pulau Lombok.

Syamsuddin, yang merupakan putra daerah Kota Bima, sempat menjelaskan bahwa ia sangat peduli dengan perkembangan daerah Bima, karena merupakan kampung halamannya. Kedatangan kali ini pun diakuinya bukan hanya menyangkut urusan kedinasan, namun juga untuk bersilaturahmi dan bertemu sanak keluarga.

Walikota mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan oleh Walikota untuk menceritakan berbagai program kerja Pemerintah Daerah Kota Bima, khususnya terkait sektor kelautan dan perikanan.

Disampaikannya bahwa *masterplann* Kota Bima adalah membangun pelabuhan perikanan yang berdampingan dengan pelabuhan laut. Hal ini sudah terwujud, namun pengoperasiannya terkendala dengan kondisi alam dimana pantai teluk Bima sudah mengalami pendangkalan sehingga kapal tidak bisa bersandar kecuali pada saat air sedang pasang.

Untuk pengembangan sektor perikanan, Walikota juga memohon bantuan berupa pembangunan dan pengembangan pabrik es yang besar dan representatif, dalam rangka efektifitas penangkapan dan pengolahan ikan.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Direktorat Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan RI menyarankan agar Pemerintah Daerah Kota Bima mengajukan proposal kepada Kementerian Kelautan RI. Proposal tersebut

harus memuat profil 1 hingga 3 desa/kelurahan yang ingin dikembangkan. Desa yang diajukan harus memenuhi beberapa indikator, antara lain: (1) desa miskin; (2) infrastruktur dasar kurang atau rendah; (3) mempunyai potensi unggulan lokal; (4) masyarakatnya berkomitmen untuk maju; dan (5) termasuk zona rawan bencana. Walikota menyambut baik saran ini, dan segera mengkomunikasikan dengan jajarannya. **Foto potensi perikanan**

#### *Bagian 14*

### *Dukungan dan Peranan Istri*

Segala keberhasilan yang diraih oleh M. Qurais H. Abidin sebagai Walikota Bima tentunya tidak terlepas dari dukungan dan peranan sang istri, Ny. Hj. Yani Marlina M. Qurais. Usai pelantikan H. M. Qurais H. Abidin sebagai Walikota Bima pada tanggal 28 April 2010, digelar pelantikan ketua TP PKK Kota Bima yang kemudian menjadi awal kiprah PKK Kota Bima dibawah kepemimpinan Hj. Yani Marlina H. M. Qurais sampai tahun 2013. Selain meneruskan berbagai program dari TP PKK periode sebelumnya, Hj. Yani Marlina juga telah melaksanakan berbagai program baru.

#### **Foto Umi Wali**

### **Visi dan Misi Gerakan PKK**

Visi PKK adalah: "Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju-mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Misi PKK adalah:

1. Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azasi manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.
2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman asri, teratur, indah dan nyaman (Hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
5. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

### **10 Program Pokok PKK**

#### *1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*

Pancasila adalah landasan ideologi negara Indonesia, dan terdiri dari 5 prinsip yang tidak terpisahkan, meliputi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila digali dari nilai budaya Indonesia, yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan diri sendiri atau keluarga. Mengembangkan rasa kebersamaan, taat pada peraturan dan hukum yang berlaku, berbudi pekerti luhur serta berwatak mulia

## 2. *Gotong Royong*

Ini adalah sikap kebersamaan, saling membantu. Sikap gotong royong sudah ada dalam tradisi dan budaya hidup masyarakat, seperti: Arisan, Tengelan, Selapanan, Sambatan, Patungan, Lebotan, Jimpitan (Jawa Tengah dan Jawa Timur); Resaya, Tabur (Jawa Timur); Rereyongan Sarumpi (Jawa Barat); Subak, Sekaha (Bali); Basuri, Matag, Siru (Nusa Tenggara Barat); Arong, Engko, Gemoking (Nusa Tenggara Timur); Sakai-sembahyangan (Lampung); Marsi-dapara (Sumatera Utara); Pela, Masori (Maluku); Mapalus (Sulawesi Utara); dan Puludow, Pongerih (Kalimantan).

**Foto gotong royong PKK**

## 3. *Pangan*

Dalam hal pangan, PKK menggalakkan penyuluhan untuk pemanfaatan pekarangan, antara lain dengan menanam tanaman yang bermanfaat, seperti sayuran, ubi-ubian, buah-buahan dan bumbu-bumbuan. Bahkan juga dianjurkan memelihara unggas dan ikan di lahan pekarangan mereka sendiri. Hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga, dan selebihnya dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan penganekaragaman pangan lokal. Pembinaan teknis diadakan dalam kerjasama dengan dinas pertanian setempat.

**Foto lomba menu PKK**

## 4. *Sandang*

Sebagai salah satu kebutuhan dasar, pakaian sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian, sikap, perilaku dan kesehatan. Di berbagai daerah, PKK menggalakkan upaya untuk dapat memanfaatkan produk bahan dan corak pakaian setempat, dengan mencintai produksi dalam negeri.

**Foto tenun ikat**

## 5. *Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga*

Rumah bukan sekedar tempat untuk berteduh saja. Rumah adalah tempat di mana keluarga dapat hidup bersama dan meningkatkan kualitas hidupnya, dalam lingkungan yang nyaman, damai, bersih dan apik. Orang perlu mengetahui bagaimana menata rumah sehat, menarik dan nyaman. Selain itu, perlu pula mengetahui bagaimana menjaga kebersihan rumah dan memanfaatkan pekarangan.

**Foto lomba rumah sehat**

## 6. *Pendidikan dan Keterampilan*

Dalam hal ini PKK memanfaatkan jalur pendidikan nonformal. Dengan adanya Program "Wajib Belajar", maka PKK menganjurkan keluarga untuk dapat memberikan pendidikan yang baik bagi putera-puterinya. Anak laki-laki maupun perempuan, perlu mendapat kesempatan belajar yang sama. Sebagai mitra pemerintah, maka dewasa ini PKK juga berperan dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB).

**Foto PAUD**

Dalam rangka Pemberantasan Buta Aksara, PKK melaksanakan “Paket A, B dan C”, yang dapat disejajarkan dengan SD, SMP dan SMU. PKK percaya bahwa pendidikan adalah proses seumur hidup. PKK juga melaksanakan program Keaksaraan Fungsional. Proses belajar program ini berdasarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan peserta kursus.

#### **Foto berbagai pelatihan oleh PKK**

Selesai kursus kelompok belajar diikutkan dalam kursus keterampilan kerja, dan selanjutnya kelompok diberi modal usaha. Selain dari itu, PKK juga menggalakkan pelatihan atau kursus untuk membuat berbagai kerajinan tangan, produk-produk makanan dan minuman yang hasilnya dapat dijual. Ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

#### **7. Kesehatan**

Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia. Orang harus belajar bagaimana cara menjaga, memelihara kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya. Memelihara kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya sangat erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan dan ketidaktahuan, serta pendidikan yang rendah.

#### **Foto pelayanan Posyandu**

Setiap orang mempunyai tugas kewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya. Orang harus tahu dan mewujudkannya dalam sikap hidup sehari-hari untuk hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan yang sehat, baik di dalam, maupun di luar rumah. Perhatian khusus ditujukan pada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuk

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dengan kader Posyandu yang terlatih.

Ada 5 Pelayanan Dasar di Posyandu, yaitu: Imunisasi, Gizi, Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan Penanggulangan Diare. Secara teratur ibu hamil memeriksakan diri di Posyandu, dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan (penimbangan anak dan imunisasi).

Penyuluhan tentang kesehatan, gizi dan Keluarga Berencana diadakan di Posyandu, bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi.

Kader Posyandu mendapat pelatihan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan yang menjadi program Posyandu. Untuk menjaga semangat kerja Kader Posyandu, PKK menyelenggarakan Jambore Nasional Kader Posyandu yang diadakan sekali dalam lima tahun.

Pengalaman menyatakan bahwa hal ini sangat membantu dalam upaya memotivasi semangat kerja kader bahkan juga Tim Penggerak PKK setempat.

Untuk meningkatkan kepedulian kepada para lanjut usia (Lansia), diadakan juga Posyandu Lansia.

#### **8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi**

PKK menganjurkan pembentukan koperasi sebagai upaya pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan pendapatan. Koperasi juga merupakan jalur yang baik dalam melatih mewujudkan prinsip kehidupan demokratis dan kerjasama antar-manusia. Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga (UP2K) di beberapa daerah ditingkatkan menjadi koperasi.

#### **Foto kegiatan Koperasi**

Selain bermanfaat bagi peningkatan ekonomi keluarga, koperasi juga dapat menjadi jalur menciptakan lapangan kerja setempat

#### **9. Kelestarian Lingkungan Hidup**

Program ini sangat membantu dalam menjaga keseimbangan lingkungan secara ekologis. Menjaga kelestarian lingkungan menjadi faktor yang sangat penting dewasa ini. Banyak bencana alam yang disebabkan karena lingkungan yang rusak. PKK memberikan penyuluhan sederhana agar lingkungan tidak dirusak dan mencegah pencemaran sumber air, antara lain tidak membuang sampah di sungai atau selokan, serta melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dan penyuluhan-penyuluhan kesehatan lingkungan.

#### **Foto penanaman pohon oleh PKK**

#### **10. Perencanaan Sehat**

Perencanaan sehat mencakup antara lain upaya meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengelola keuangan keluarga secara efektif, efisien dengan memperhatikan kepentingan masa depan.

Anjuran untuk menyimpan uang di Bank, melaksanakan Keluarga Berencana, adalah anjuran kongkrit yang digalakkan dalam program ini. Dalam hal keuangan dianjurkan agar hidup keluarga tidak “besar pasak dari tiang”.

Mampu untuk membagi waktu dengan baik, yaitu waktu untuk mengelola rumah tangga, untuk bekerja, beristirahat, santai bersama keluarga, membagi pekerjaan di kalangan anggota keluarga yang

didasarkan kemampuan masing-masing. Semua ini dapat membantu dalam upaya membangun kehidupan keluarga yang lebih teratur, terarah, efektif, efisien dan membawa bahagia bagi setiap anggota.

Pada dasarnya 10 Program Pokok PKK sudah mencakup upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisik, mental dan sosial.

#### **Rapat Evaluasi Program dan Pembahasan Rancangan Program**

Mengawali kinerja tahun 2011, tanggal 7 Januari 2011 (yang selanjutnya dijadikan tanggal untuk pertemuan rutin TP PKK Kota Bima setiap bulannya, dan tanggal 12 sebagai pertemuan gabungan TP PKK Kota, Kecamatan, dan Kelurahan), bertempat di Sekretariat PKK Kota Bima dilakukan rapat evaluasi program kegiatan TP PKK Kota Bima selama tahun 2010 dan membahas rancangan program kegiatan untuk tahun 2011.

#### **Foto pertemuan PKK**

#### **Sosialisasi Rakernas VII dan Cipta Menu 3B dan Gemarikan bersama TP PKK Prov. NTB**

Bersama TP PKK Provinsi NTB, TP PKK Kota Bima juga menggelar Sosialisasi Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2012 bertempat di Lesehan Putri yang dibuka oleh Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, dan Sosialisasi Cipta Menu 3B dan Gemarikan yang dihadiri oleh TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bima.

#### **Foto kegiatan**

#### **Berbagai Pembinaan**

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, setiap TP PKK mulai dari tingkat Kota hingga Kelurahan harus memiliki kompetensi. TP PKK Kota Bima giat melakukan berbagai pembinaan kepada PKK Kecamatan maupun Kelurahan dengan tujuan memberikan motivasi dan mampu menciptakan dan menghidupkan keterampilan bagi rumah tangga dan industri rumah tangga guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga.

#### **Lomba Rancang Busana Tenun dan Batik Khas NTB serta Seminar Perempuan**

PKK Kota Bima giat melakukan kegiatan untuk mempromosikan tenunan khas Bima, serta mengupayakan berbagai langkah terobosan agar tenunan Bima dapat bersaing di pasar regional maupun nasional. Dalam rangka menyambut HUT Kota Bima ke-9, pada tanggal 2 April 2011, PKK Kota Bima bekerjasama dengan Dekranasda NTB menggelar Lomba Rancang Busana Tenun dan Batik NTB Tahun 2011, yang diikuti oleh 76 peserta yang berasal dari Pulau Lombok dan Sumbawa, dan didominasi peserta dari Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

Baru pada tahun 2011 kegiatan ini untuk pertama kalinya diadakan di Pulau Sumbawa dan Kota Bima diberi kepercayaan sebagai tuan rumah. Lomba berlangsung meriah, dengan menghadirkan mantan peragawati Ratih Sanggarwati dan pimpinan redaksi majalah NooR sebagai juri sekaligus sebagai pembicara pada Seminar Perempuan kerjasama PKK Kota Bima dan Dharma Wanita Persatuan Kota Bima yang diadakan pada tanggal 3 April 2011.

#### **Lomba rancang busana**

#### **Lomba Masak Serba Ikan, Gizi Berimbang dan Dekranasda Tahun 2010**

Pada tahun 2010, duta Kota Bima meraih juara pertama tingkat Provinsi NTB untuk lomba Bergizi, Berimbang, Sehat dan Aman (B2SA), serta lomba Dewan Kerajinan Daerah Nasional (Dekranasda) untuk mata lomba Desain Busana Batik tingkat NTB. Desain yang meraih juara adalah Sasambo bermotif Garoso yang dirancang oleh Hj. Yani Marlina H. Qurais.

PKK Kota Bima juga meraih juara I Lomba Masak Serba Ikan Tk. Prov. NTB yang diselenggarakan tanggal 22 September 2010.

#### **Lomba masak ikan dan gizi berimbang tahun 2010**

#### **Lomba Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Gizi Keluarga**

Bulan Mei 2012, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh (BKP2) Kota Bima bekerja sama dengan TP PKK Kota Bima, kembali mengadakan Lomba Pemanfaatan Pekarangan bagi kelompok Dasawisma se-Kota Bima.

Tujuan diadakannya Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dan anggota masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan secara optimal.

Lahan pekarangan yang dikelola secara optimal dapat memberikan manfaat bagi rumah tangga dan keluarga yang mengelolanya. Hal ini dapat terlihat dari beragam fungsi dasar pekarangan, yaitu menjadi warung hidup, apotik hidup, serta fungsi keindahan.

#### **Foto apotik hidup**

Lahan pekarangan yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat, antara lain adanya peningkatan gizi keluarga, tambahan pendapatan keluarga, lingkungan rumah asri, teratur, indah, dan nyaman. Semakin beragam tanaman pangan atau tanaman obat keluarga (toga) yang dikembangkan serta semakin banyak ternak/ikan yang dibudidayakan, maka diharapkan rumah

tangga/keluarga yang mengelola, kehidupannya akan menjadi semakin sejahtera.

Lahan pekarangan yang sempit pun dapat ditata dengan baik dengan diciptakan tabulapot (tanaman bumbu dalam pot), kolam ikan dengan ukuran mini, dll sehingga halaman asri, teratur, indah dan nyaman tentunya dengan biaya murah dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam jangka pendek, pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga yang dikelola secara baik diharapkan dapat meningkatkan konsumsi pangan dan gizi bagi rumah tangga/keluarga, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan masyarakat yang mengelola pekarangan dapat hidup lebih sejahtera.

Sebagai bentuk gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga, BKP2 dan TP PKK Kota Bima telah dan sedang dilaksanakan pelatihan pemanfaatan pekarangan guna memperoleh penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi, seimbang, dan aman, di sejumlah kecamatan, dengan sasaran kelompok tani maupun kelompok wanita tani (dasawisma).

Tujuan dari kegiatan ini adalah memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan secara maksimal sebagai sumber gizi dan tambahan pendapatan bagi keluarga. Keberhasilan dan kesinambungan kegiatan ini tentunya sangat memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai elemen instansi yang terkait, antara lain Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, para penyuluh pertanian, kader PKK, LSM, tokoh masyarakat, serta masyarakat secara luas, sehingga nantinya permasalahan kerawanan pangan dan gizi dapat tertanggulangi secara bersama.

Tak kalah pentingnya, dukungan berupa dana dari pemerintah setempat dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan demi kelangsungan kegiatan ini. Pada akhirnya, jika pemenuhan gizi rumah tangga/keluarga terpenuhi secara optimal, dapat menjadikan masyarakat sehat dan sejahtera, dan kondisi ketahanan pangan daerah akan terwujud.

Kegiatan Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada dasarnya merupakan semacam evaluasi bagi berbagai pelatihan pemanfaatan pekarangan yang ditujukan pada berbagai kelompok dasawisma.

#### **Dasawisma dari Kelurahan Mande Raih Juara I**

Bertepatan dengan pencanangan BBGRM Tingkat Kota Bima tahun 2012, juara Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan Tingkat Kota Bima Tahun 2012 diumumkan.

Keluar sebagai juara I adalah kelompok Dasawisma Al-Husna Kelurahan Mande Kec. Mpunda yang diketuai Hj. Rohana; juara II adalah kelompok Dasawisma Mawar Kelurahan Rabadompu Barat Kec. Raba yang diketuai Sunarti M. Saleh; dan juara III adalah kelompok Dasawisma Kemangi Kelurahan Nae Kec. Rasanae Barat yang diketuai Chaerunnisah.

Kepada peraih juara I hingga III, diberikan piala dan berbagai hadiah. Hadiah diserahkan oleh Ketua TP PKK dan GOW Kota Bima kepada ketiga ketua kelompok Dasawisma.

**Foto lomba dasawisma kelurahan Mande juara I**

#### **Lomba-lomba dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK**

Pada tanggal 11 – 13 Juli 2011, TP PKK Kota Bima menggelar lomba tertib administrasi PKK Tingkat Kota Bima yang diikuti 5 kecamatan yang ada di



Kota Bima. Selain tertib administrasi PKK, juga diadakan lomba-lomba sebagai berikut:

1. Simulasi KDRT untuk Pokja I;
2. BKB terintegrasi PAUD dan Posyandu dan Kelompok UP2K PKK untuk Pokja II;
3. Merangkai bunga dari bahan limbah untuk Pokja III; dan
4. Posyandu bersaing untuk Pokja IV.

Pencanangan Bhakti Sosial HKG PKK Tahun 2011 dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Ny. Hj. Rabiatul Adawiah H. Jainul Majdi dan jajarannya. Ketua TP PKK Provinsi NTB didampingi Ketua TP PKK Kota Bima melakukan kunjungan pelayanan KB gratis di Puskesmas Asakota.

**Foto HKG PKK**

#### **Prestasi**

1. Juara I Lomba Rancang Busana Tingkat Provinsi NTB;  
Membawa tenunan khas Bima agar dikenal adalah misi TP PKK Kota Bima, di antaranya dengan mengikuti Lomba Rancang Busana Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Tingkat Provinsi NTB. Pada ajang ini Kota Bima mampu meraih prestasi yang membanggakan, yaitu gelar juara I tingkat Provinsi NTB dengan desain sasambo bermotif Garoso yang dirancang oleh Hj. Yani Marlina H. Qurais. **Foto kegiatan**
2. Juara III lomba Serba I Kan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2011; **Foto kegiatan**
3. Juara III Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB Tahun 2011; **Foto kegiatan**
4. Berpartisipasi dalam Lomba Kota Sehat dan meraih juara I Tahun 2011; **Foto kegiatan**
5. Juara II Lomba PHBS tingkat Provinsi NTB Tahun 2011; **Foto kegiatan**

6. Juara I Lomba P2WKSS Tingkat Provinsi NTB Tahun 2011; **Foto kegiatan**

Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ke-83 yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2011, Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda meraih gelar Juara pertama lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat provinsi NTB. Karena prestasi tersebut, Ibu Lurah Sadia diundang untuk menghadiri peringatan Hari Ibu di istana Presiden di Jakarta.

7. Juara III Lomba Hatinya PKK Tingkat Prov. NTB Tahun 2011; **Foto kegiatan**
8. Juara II Lomba Okulasi Tanaman pada Temu Kader Tingkat Provinsi NTB Tahun 2011; dan **Foto kegiatan**
9. Juara I Lomba Kadarkum tingkat Provinsi NTB Tahun 2011. **Foto kegiatan**

#### **Kendala dan Hambatan**

Kendala dan hambatan yang masih dihadapi adalah: (1) masih kurangnya dukungan SDM yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang sistem perencanaan program pembangunan; (2) masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk memperlancar proses analisis dan penyusunan rencana kerja antara lain dukungan ATK, komputer, buku, referensi, mesin fax, dan sebagainya; (3) fungsi dan program PKK belum dipahami secara merata; dan (4) dukungan biaya yang masih kurang dibandingkan dengan program yang dilaksanakan.

#### **Harapan untuk Masa Mendatang**

Hj. Yani Marlina berharap, semoga PKK akan lebih profesional, maju, berkembang, dan lebih efektif, dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan pengurus serta mensejahterakan keluarga.

“Kami harapkan pemerintah dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin pelaksanaan gerakan PKK, terutama pada bidang penganggaran”, pungkasnya.

Foto lomba voli, jalan sehat, dll

## Bagian 15 Perencanaan Jangka Panjang

Perkembangan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat telah memperkuat posisi Kota Bima sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah regional Nusa Tenggara. Konsekuensinya adalah terlihat secara jelas perubahan wajah kota dengan pesatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun dan meningkatnya volume arus lalu lintas yang terjadi secara signifikan dalam lima tahun terakhir.

### Rencana Strategis Wilayah Pesisir

Jumat, 4 Mei 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima menggelar acara Sosialisasi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), bertempat di aula Hotel La Ila. Acara ini merupakan bagian dari program kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Foto kegiatan

Sasaran sosialisasi adalah anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Bima, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat wilayah pesisir. Acara turut dihadiri oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Bali, serta para Camat dan Lurah wilayah pesisir.

Secara nasional, perhatian pemerintah terhadap pembangunan kelautan dan perikanan menempati prioritas tinggi, Hal ini didasarkan pada potensi kelautan dan perikanan nasional yang sangat besar. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai pulau-pulau lebih dari 17.175 dengan panjang garis pantai lebih kurang 81.290 kilometer. Kekayaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkandung di dalamnya harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lokomotif bagi pembangunan ekonomi bangsa yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K) merupakan perencanaan yang menjadi pondasi bagi dokumen hirarki lainnya. Renstra ini merupakan kebijakan sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat. Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan jangka panjang pemerintah daerah, serta wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah, dengan jangka

waktu selama 20 tahun dan sekurang-kurangnya dapat ditinjau kembali lima tahun sekali.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pembangunan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan terhadap perubahan, dan perlu dilindungi melalui pengelolaan, agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolannya, sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K) perlu memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

1. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
2. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara sektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dengan prinsip-prinsip manajemen;
3. dilakukan sesuai dengan kondisi geobiofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan juga harus
4. melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.

Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengorganisasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga atau instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang telah ditetapkan.

#### **Foto potensi pantai dan perikanan/kegiatan nelayan**

Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan tahap pertama dari ruang lingkup perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya akan diikuti dengan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), selanjutnya penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), serta penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K).

Sebagai sebuah wilayah yang terletak di tepi teluk Bima, Kota Bima memiliki kawasan pesisir yang cukup luas, dan oleh karenanya menyimpan berbagai potensi yang cukup menjanjikan. Potensi kelautan yang ada berupa hasil ikan, rumput laut, dan budidaya mutiara. hasil ikan di perairan teluk bima antara lain bandeng, udang windu, keramba apung, lobster, kerapu, kepiting, serta rumput laut. Pemerintah Kota Bima, dalam hal ini Dinas Perikanan dan

Kelautan, telah merancang dan menjalankan berbagai program untuk mengembangkan potensi kelautan yang ada, antara lain dengan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi di Kelurahan Tanjung, serta pengembangan budidaya mutiara.

Potensi sumberdaya perikanan Kota Bima merupakan salah satu sektor andalan yang mempunyai kontribusi signifikan bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan. Kegiatan penangkapan ikan di laut masih merupakan kegiatan yang dominan di Kota Bima. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap, khususnya di wilayah Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota.

Dengan semua potensi ini, kita dihadapkan pada tantangan, bagaimana mengembangkan segala peluang yang ada, untuk menciptakan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat pesisir yang sebagian di antaranya masih berada dibawah garis kemiskinan. Untuk mengembangkan wilayah pesisir, kita membutuhkan sebuah konsep yang terpadu, terarah, dan tepat sasaran. Acara sosialisasi yang digelar hari ini merupakan sebuah momentum untuk merumuskan konsep tersebut, sehingga mampu menghasilkan sebuah dokumen berupa rencana strategis.

### **Penyusunan Raperpres RTR-KSN KAPET Bima**

Senin, 17 September 2012, Walikota membuka rapat koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima. Acara yang digelar di Hotel Marina tersebut turut dihadiri oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian

Pekerjaan Umum RI, unsur Dinas PU Provinsi NTB, serta Pelaksana Harian dan para Direktur Badan Pengelola KAPET Bima.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kota Bima, saya mengucapkan selamat datang di Kota Bima, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas ditunjuknya Kota Bima sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan rapat penting ini, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, baik secara domestik, regional maupun nasional”, ucap Walikota dalam sambutannya.

Walikota memaparkan, sebagai salah satu kawasan strategis nasional pengembangan ekonomi terpadu di Indonesia, wilayah Kota Bima sudah tentu berpotensi untuk cepat tumbuh dan berkembang, karena memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan wilayah sekitarnya, dan tidak terlalu memerlukan investasi yang besar dalam pengembangannya.

“Saya katakan demikian karena pertumbuhan ekonomi di wilayah ini cukup menggembirakan. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi wilayah ini rata-rata lebih dari 5% per tahun. Bahkan kota bima sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya sektor bisnis, perdagangan dan jasa, dalam 3 tahun terakhir ini mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% per tahun. Dampak penting terhadap hal ini adalah semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan pencapaian angka kemiskinan paling rendah di NTB. Kota Bima memiliki angka kemiskinan 12,8 persen, lebih rendah dari rata-rata NTB, bahkan lebih rendah dari angka rata-rata nasional”, ujar Walikota.

Kegiatan rakor ini diharapkan dapat memberi peluang lebih besar bagi wilayah ini untuk memanfaatkan dan meningkatkan keunggulan komparatif

secara nasional, baik dari segi geografis, potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Keunggulan tersebut kiranya mampu menciptakan peluang usaha ekonomi berbagai sektor unggulan seperti pertanian tanaman pangan, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertambangan energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, perdagangan dan jasa serta industri.

Dalam kerangka implementasi MP3EI (*Masterplan* Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima memiliki peluang kontribusi cukup besar dalam hal pengembangan peternakan sapi dan kerbau dengan populasi saat ini mencapai hampir 300 ribu ekor (284.850 ekor) atau 31% dari populasi NTB.

Untuk mendukung industri peternakan hilir, di Kota Bima telah dibangun Rumah Potong Hewan (RPH) modern berskala nasional dengan kapasitas produksi sekitar 50-100 ekor/hari, sehingga kedepan ketiga Kabupaten/Kota di wilayah KAPET Bima tidak lagi mengirim ternak hidup melainkan sudah dalam bentuk daging atau karkas. Dengan demikian terjadi efisiensi dan hasil-hasil ikutannya seperti kulit, tulang, darah dan lain lain dapat memberikan nilai tambah bagi daerah. RPH tipe A tersebut diharapkan sudah mulai beroperasi dalam bulan depan ini.

“Demikian pula di bidang agribisnis yang lain, memiliki potensi yang tidak kalah pentingnya untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, hal terpenting yang perlu kita perjuangkan bersama adalah ketersediaan berbagai infrastruktur penunjang agar mampu mendorong produksi dan distribusi barang dan jasa secara berkelanjutan”, ujar Walikota.

Walikota juga berharap kedepannya Kota Bima dapat maju seperti Kota Surabaya, karena hal ini sudah terlihat dari kondisi saat ini, dimana perkembangan Kota Bima cukup pesat dan letak Kota Bima yang berada di

tengah segitiga emas Bali, NTT, dan Sulawesi. Untuk mendukung rencana tersebut, saat ini Kota Bima sedang menyiapkan infrastruktur antara lain berupa jalan, pelabuhan Bima yang insyaallah akan menjadi pelabuhan terbesar di NTB, serta PLTU sebagai penyuplai listrik terbesar di Pulau Sumbawa.

Walikota berharap kegiatan ini memiliki arti penting bagi kemajuan pembangunan ekonomi di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima yang meliputi Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima. Untuk itu dalam rangka rapat penyusunan Raperpres ini, Walikota mengajak semua pihak untuk kiranya perlu dicermati isu-isu strategis antara lain:

1. pengembangan agribisnis komoditas unggulan daerah dalam rangka tumbuh kembangnya wirausaha baru di masyarakat maupun komoditas andalan lainnya yang berpotensi dan berpeluang meningkatkan perekonomian,
2. pengembangan ekonomi lokal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah,
3. aspek dukungan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung, pengembangan industri hilir dan unit-unit pengolahan hasil, serta
4. upaya optimalisasi pengembangan pariwisata dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

#### **Yang Hendak Dituntaskan**

Tahun 2012, Kota Bima masuk dalam program *Master Plan* Percepatan Pembangunan Indonesia (*MP3I*), khususnya untuk sektor ekonomi. Masih banyak program yang ingin dituntaskan oleh Pemerintah Kota Bima, antara lain:

- ❖ Pembangunan Terminal di Gasu Lampe,
- ❖ Pembangunan Paruga Nae di bekas terminal Lampe dan Terminal Dara,

- ❖ Penuntasan pembangunan masjid raya Al-Muwahiddin dan Masjid At-Taqwa,
- ❖ Pembangunan pasar di kawasan Ama Hami,
- ❖ Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type D,
- ❖ Membangun Kantor Pelayanan Terpadu dan Kantor Imigrasi di Pane,
- ❖ Mengalirkan air bersih ke semua wilayah pemukiman,
- ❖ Reklamasi pantai Ama hami – Lawata, serta
- ❖ Pemusatan area pergudangan untuk menghindari macet.

Perjalanan kedepan masih akan panjang. Dengan rasa syukur dan semangat juang, masih banyak harapan yang akan dicapai oleh Pemerintah bersama masyarakat Kota Bima.

## *Bagian 16* *Sikap Politik*

Sebagai Walikota, M. Qurais H. Abidin terkenal sangat disiplin dalam hal waktu. Dalam perjalanan karir berpolitiknya, sempat ada beberapa keputusannya yang menimbulkan pertanyaan publik. Salah satunya adalah bergabungnya ia dengan Partai Demokrat dan akhirnya menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Cabang Kota Bima.

### **Bergabung dengan Demokrat**

Ketika maju sebagai calon Wakil Walikota pada Pemilukada Kota Bima tahun 2008, M. Qurais diusung oleh beberapa partai, antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Berbagai gejolak politik nasional turut mempengaruhi dinamisasi politik di daerah, tidak terkecuali Provinsi NTB dan Kota Bima pada khususnya.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, pada tahun 2010 Qurais memutuskan untuk pindah dan bergabung dengan Partai Demokrat. Ada beberapa alasan yang mendasari pilihan politiknya ini, salah satunya adalah

kecocokan dengan visi misi Partai Demokrat. Alasan lain adalah sikap politik yang selaras dengan Gubernur NTB, TGH Zainul Majdi, MA, yang telah terlebih dahulu bergabung dengan Partai Demokrat.

Seiring waktu, terbukti keputusan ini membawa banyak manfaat bagi Kota Bima. Kesamaan kendaraan politik dengan Gubernur turut mempermudah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB, terutama dalam hal alokasi bantuan anggaran dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

### **Pencalonan Kembali**

Keinginan untuk terus menakhodai arah pembangunan Kota Bima membawa Qurais pada keputusan pencalonan kembali sebagai Walikota dan bertarung dalam Pemilu Kota Bima Tahun 2013.

Dalam pencalonannya ini, Qurais kembali menggandeng H. A. Rahman H. Abidin, SE, sebagai Calon Wakil Walikota. Ada beberapa alasan yang menyebabkan ia menjatuhkan pilihan pada H. A. Rahman H. Abidin, SE. Selain karena memiliki kesamaan visi dan misi dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan, kebersamaan selama lebih kurang tiga tahun menakhodai Kota Bima, telah cukup menjadi bukti kekompakan dan baiknya koordinasi yang terjalin.

Hal ini sesungguhnya merupakan sebuah prestasi tersendiri. Ditengah maraknya fenomena perpecahan pasangan pemimpin, pasangan M. Qurais dan H. A. Rahman H. Abidin tetap bersatu dan mengesampingkan perbedaan-perbedaan kecil yang tidak berarti demi mempertahankan kebersamaan membangun Kota Bima.

*Bagian 17*  
*M. Qurais di Mata Para Tokoh*

**Yandi Ferdinandus**  
**(Pengusaha, Pemilik Hotel Marina)**

**Fotonya ada di Buana**

Saya memandang M. Qurais sebagai sosok pekerja keras. Saya mengenal beliau cukup baik, karena sebelum menjadi Walikota beliau adalah seorang pengusaha. Sebagai sesama pengusaha, kami memiliki hubungan yang baik, dan sudah saling mengenal selama lebih kurang sepuluh tahun. Kami kenal pertama kali di Surabaya, karena saya berasal dari Surabaya dan Pak Qurais pernah menetap sebentar di sana.

Menurut saya, Pak Qurais suka menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Kebiasaannya dalam manajemen usaha sejak dulu adalah: temukan masalah, cari penyebab, lalu selesaikan. Praktis saja, tidak neko-neko. Sepertinya sikap demikian pula yang dibawa dalam kedudukannya sebagai Walikota.

Sebagai seorang walikota, beliau sangat mendukung pertumbuhan dunia usaha. Berdasarkan pengalaman saya sendiri dalam merintis keberadaan Hotel Marina ini, prosedur pemberian izin yang diterapkan cukup memudahkan bagi kami para pengusaha. Instansi terkait sangat kooperatif.

Situasi Kota Bima juga sangat kondusif untuk iklim usaha. Sejauh ini Kota Bima selalu dalam keadaan aman dan tenteram. Namun ada satu yang saya sayangkan, yaitu berkaitan dengan citra Kota Bima di mata dunia luar atau daerah lain. Dari berita televisi, seakan-akan Kota Bima sering rusuh dan rawan kekerasan. Padahal kita semua memahami, bahwa berbagai berita kekerasan tersebut merupakan permasalahan di wilayah Kabupaten Bima, namun berakibat buruk bagi pencitraan Kota Bima juga.

Harapan saya ke depan adalah, perlahan-lahan kita dapat mengikis citra buruk mengenai Bima ini, agar wisatawan juga semakin tertarik untuk datang berkunjung ke Bima, sehingga kita dapat mempromosikan berbagai potensi daerah agar Kota Bima semakin maju.

**Drs. H. Mulyadi Sabil**  
**(Ketua LPM se-Kota Bima)**  
**Fotonya ada di Kak Ghozil**

M. Qurais H. Abidin adalah sosok pemimpin yang memihak kepentingan dan aspirasi masyarakat. Ia memiliki tipe kepemimpinan yang demokratis dan sigap menyikapi keinginan masyarakat Kota Bima. Dibawah kepemimpinannya selama lebih kurang tiga tahun, Kota Bima mengalami banyak perubahan, terutama dalam hal pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu programnya yang sangat berdampak pada pengembangan sosial adalah menghidupkan kembali semangat gotong royong serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dampak yang sangat terasa adalah timbul kebersamaan antara aparat pemerintah dan masyarakat. Misalnya pada saat lomba kelurahan, aparat pemerintah bekerja bersama masyarakat membersihkan lingkungan. Demikian pula halnya dalam hal pembangunan sarana umum, misalnya pembangunan tanggul sungai penahan banjir. Tanggul sepanjang 200 meter dengan lebar bentangan 30 cm dan tinggi 120 cm diperhitungkan akan menghabiskan anggaran puluhan juta, namun dengan bergotong royong mampu diselesaikan oleh warga bersama aparat dengan memanfaatkan dana stimulan sebesar Rp. 25.000.000,-.

Untuk pemberdayaan masyarakat, banyak program padat karya yang menyerap tenaga kerja, antara lain pembangunan jalan ekonomi masyarakat tani serta saluran irigasi. Bantuan permodalan juga diberikan kepada para pelaku industri kecil menengah (IKM) serta para pedagang bakulan. Hal ini sangat membantu para pedagang bakulan, dan menghindarkan mereka dari jeratan rentenir yang kini semakin marak prakteknya di Kota Bima. Kerajinan tenun yang menjadi bagian dari kebudayaan khas daerah dan menopang hidup sebagian masyarakat Kota Bima turut mendapat perhatian. Berbagai upaya pengembangan industri tenun dilakukan, mulai dari pemberian bantuan modal, benang tenun, hingga bantuan akses pemasaran. Sebagai penghargaan dan pemacu semangat para pengurus RT dan RW, ada program pemberian insentif.

Berbagai program bantuan ini ditujukan bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan sangat dirasakan manfaatnya. Saya berharap program-program ini dapat terus berjalan dan ditingkatkan. Sebagai masyarakat, saya pun sangat menghargai segala bentuk kebersamaan dn



saling mendukung antara Pemerintah Kota Bima dan masyarakat. Hendaknya semua ini dapat kita pertahankan demi terwujudnya lingkungan dan kehidupan yang sehat, aman, dan sejahtera.

**H. Abdul Gani H. M. Kasim**

**(Tokoh Masyarakat Lampe)**

**Fotonya ada di Kak Ghozil**

Sebagai seseorang yang terlahir dari orang tua yang berprofesi sebagai pengusaha, M. Qurais H. Abidin tumbuh dan berkembang di tengah keluarga yang suka bekerja keras dan memiliki sifat ulet. Ia pun melanjutkan jejak sang ayah sebagai pengusaha yang berhasil, maka dengan sendirinya ia telah matang dalam mengelola manajemen perusahaan serta punya tekad yang kuat dalam berusaha.

Hal ini mempengaruhi karakternya sehingga ia mempunyai pendirian yang keras. Sikap tersebut cocok untuk mengemban amanah kepemimpinan, terutama pada masa reformasi seperti sekarang ini, dimana kebebasan sering kali salah kaprah dan kebablasan. Maka untuk menertibkan gejolak diperlukan pemimpin yang tegas dan berwibawa. Karakter demikian dimiliki oleh M. Qurais H. Abidin.

Sebagai seorang kepala daerah, ia terkenal suka turun ke lapangan melihat langsung kehidupan masyarakat. Jika ada bencana, ia selalu segera ke lokasi kejadian untuk melihat situasi dan memberikan bantuan yang diperlukan. Ia juga kerap mengunjungi masyarakat yang telah lama menderita sakit parah dan memberi bantuan pengobatan. Tentunya hal itu menunjukkan bahwa ia benar-benar memahami fungsinya sebagai pemimpin yang mengayomi

masyarakat. Pada saat masyarakat mengalami kesulitan maka ia sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk meringankan beban mereka.

Saya juga memandang Qurais sebagai sosok yang obyektif dalam mengambil keputusan serta menentukan kebijakan. Ini tidak terlepas dari karakternya yang teguh pendirian sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh siapa pun.

Harapan saya kedepan, semoga M. Qurais H. Abidin dapat terus menjadi pemimpin yang memperhatikan masyarakatnya serta semakin giat melaksanakan pembangunan pada berbagai bidang kehidupan.

**H. Abdul Kadir Tanjung**

**(Tokoh Masyarakat Tanjung, warga yang bermukim di atas lahan sengketa**

**dengan PT. Pelindo III)**

**Fotonya ada di Kak Ghozil**

Sebagai bagian dari masyarakat Kelurahan Tanjung dan Melayu yang bermukim di atas lahan sengketa dengan PT. Pelindo III, maka hal yang paling berkesan bagi saya mengenai kepemimpinan M. Qurais H. Abidin sebagai Walikota Bima adalah upayanya yang sangat intensif dalam menyelesaikan sengketa lahan antara kami dengan PT. Pelindo III.

Sengketa lahan ini telah berlangsung puluhan tahun, sejak Kota Bima masih merupakan bagian dari Kabupaten Bima. M. Qurais H. Abidin sangat memahami apa yang menjadi harapan masyarakat. Ia pun mengambil tindakan langsung dengan mengajak beberapa tokoh masyarakat serta anggota DPRD Kota Bima untuk menemui Direktur PT. Pelindo III di Surabaya, hingga

membahasnya dengan DPR RI. Solusi yang ditawarkan oleh PT. Pelindo III untuk mencari lahan pengganti pun diamini oleh M. Qurais H. Abidin.

Sebagai Walikota, M. Qurais H. Abidin pun mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan lahan sengketa tersebut dengan membelinya dari PT. Pelindo III. Hal ini tentulah sangat berarti bagi kami. Adanya titik terang atas kegundahan yang menyelimuti warga selama ini sungguh dapat memberi ketenangan hidup bagi kami warga Tanjung dan Melayu, demikian pula bagi anak dan cucu kami kelak.

Program lain yang juga kami sambut dengan gembira adalah pembukaan jalan Padolo III serta rencana pemusatan area pergudangan. Saya sendiri bertempat tinggal di wilayah dekat pelabuhan, dimana banyak bangunan yang banyak digunakan sebagai gudang penyimpanan semen. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan kami. Lingkungan juga menjadi terlihat kumuh dan kotor. Oleh karenanya, rencana pemusatan dan menjauhkan area pergudangan dari pemukiman, kami sambut dengan senang hati.

Harapan saya kedepan, semoga kepemimpinan ini dapat dipertahankan, sehingga berbagai program tersebut dapat segera terwujud agar Kota Bima ini semakin tertata dan indah.

**H. Ahmad, S. Ag**  
**(Tokoh Agama)**

Sejauh ini ada beberapa hal yang patut dipuji mengenai kebijakan M. Qurais H. Abidin sebagai Walikota Bima, khususnya mengenai pembangunan bidang keagamaan. *Pertama*, mengenai pemberian dana stimulan untuk pembangunan sarana ibadah. Dari pengamatan saya, ada tiga metode yang digunakan oleh Walikota Bima dalam menyalurkan bantuan, yaitu:

1. merespon permohonan bantuan dana melalui pengajuan proposal;
2. pemberian secara insidental dengan melihat langsung kondisi sarana ibadah pada saat melakukan peninjauan ke lapangan; serta
3. menanggapi permintaan warga pada saat dialog atau silaturahmi dalam kesempatan-kesempatan tertentu, seperti seusai sholat Jumat berjama'ah.

Alhamdulillah, selama tahun 2012 sudah banyak sarana ibadah yang terakomodir. Selanjutnya tergantung penuh kepada masyarakat. Kita semua tentu harus menyadari, sangat tidak mungkin jika Pemerintah diharapkan untuk membangun lalu bertanggung jawab penuh dalam hal pemeliharaan. Untuk memelihara dan menghidupkan sarana ibadah, merupakan tanggung jawab masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar sarana ibadah tersebut. Kesadaran inilah yang masih kurang di kalangan masyarakat Kota Bima. Kami sebagai kalangan yang disebut para ulama atau tokoh agama, memiliki tanggung jawab moril untuk mengajak masyarakat bersama-sama menghidupkan sarana ibadah, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai tempat berbuat amal.

Baru-baru ini saya sempat melakukan diskusi dengan teman-teman pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Pulau Lombok. Saya pribadi sangat tertarik melihat fenomena banyaknya masjid di Pulau Lombok yang semuanya sangat megah dan terawat rapi. Ternyata mereka tidak semata-mata mengandalkan bantuan Pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaannya. Masyarakat secara sukarela berderma atau mengumpulkan sumbangan. Bahkan ibu-ibu pedagang bakulan pun ada yang mengumpulkan Rp. 1000. Walaupun jumlah tersebut kecil, namun jika dilakukan secara rutin dan bersama-sama, maka tentu lama-lama akan terkumpul dalam jumlah besar. Jumlah sumbangan atau posisi kas pun selalu rutin diumumkan setiap

sebelum sholat Jumat berjama'ah. Dalam satu tahun, sebuah mushola kecil dapat mengumpulkan kas hingga Rp. 150.000.000,-. Ini adalah budaya yang sangat luar biasa yang patut ditiru.

Saya ingin mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bima agar bermitra dengan DMI Perwakilan Kota Bima. Kedepannya kita dapat memberdayakan para remaja masjid dengan menjadikan mereka sebagai anggota tim pengumpul derma dari masyarakat untuk membiayai pemeliharaan masjid/musholla atau melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan. Melalui program ini, ada lebih dari satu manfaat yang dapat kita capai. Kas dapat terkumpul, lalu masyarakat dalam hal ini remaja, dapat diberdayakan. Kemudian akan timbul rasa memiliki di kalangan masyarakat karena merasa bahwa sarana ibadah tersebut dibangun dengan hasil keringat bersama. Saya pun mendapat informasi dari Ketua DMI Perwakilan Kota Bima, H. Ramli Ahmad, bahwa ada rencana untuk melantik seluruh remaja masjid yang ada di Kota Bima. Ini merupakan langkah awal, dan selanjutnya tinggal kita koordinasikan bersama antara pemerintah dengan lembaga keagamaan untuk merealisasikan pembentukan tim pengumpul derma masjid dengan memberdayakan para remaja masjid ini.

Kebijakan *kedua* oleh Walikota yang patut dihargai adalah mengenai pembinaan TPA/TPQ. Alhamdulillah, hingga sekarang Pemerintah Kota Bima terus menunjukkan komitmen dan perhatian serius bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan para pembina keagamaan di Kota Bima. Pemkot Bima telah memberikan insentif bagi guru ngaji. Walaupun jumlahnya masih terbatas dan diberikan sekali setahun, namun itu sudah menunjukkan perhatian pemerintah. Kami dari LPTQ juga berencana untuk melakukan pendataan ulang mengenai jumlah guru mengaji, bilal, marbot, serta pendataan warga yang

belum bisa membaca dan menulis Al-Qur'an. Terus terang, untuk masalah data, kita memang masih belum cukup baik. Hal ini menjadi catatan setiap ada peninjauan dari LPTQ pusat. Perwakilan LPTQ pusat menanyakan kepada kami, jumlah warga yang sudah dan belum bisa membaca dan menulis Al-Quran di Kota Bima. Untuk menyusun program memang perlu data, agar dapat dihitung target yang jelas serta tingkat keberhasilan. Ini tentu sangat perlu untuk mengetahui kesuksesan program Magrib Mengaji dan Membumikan Al-Quran. Jika saya boleh menyimpulkan, pembinaan TPA/TPA di Kota Bima sudah berjalan cukup baik, walaupun masih ada beberapa keterbatasan. Yang perlu dibenahi dan ditingkatkan adalah pendataan.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, mungkin dapat disiasati dengan kebijakan *ketiga* yang ditetapkan oleh Walikota, yaitu penataan zakat profesi. Alhamdulillah zakat profesi sudah dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas pembina keagamaan. Menurut data, pada tahun 2012 Pemerintah Kota Bima mengucurkan dana sebesar Rp. 98.662.000 guna pemberian bantuan bagi petugas keagamaan, antara lain imam, bilal, marbot, serta para fakir miskin. Sementara dari BAZDA Kota Bima ada pemberian hak mualaf sebesar Rp. 30.000.000,-. Kemudian ada anggaran sebesar Rp. 91.080.000 yang disalurkan dari zakat profesi Dinas, Badan dan Kantor Lingkungan Pemkot Bima bagi pengembangan sarana dan pembina keagamaan.

Mengenai kebijakan *keempat*, yaitu pembentukan Badan Waqaf Indonesia Perwakilan Kota Bima, untuk hal ini saya berikan apresiasi setinggi-tingginya. Karena Provinsi NTB sendiri belum punya BWI, namun Kota Bima sudah berinisiatif membentuk. Bahkan seingat saya dulu Pemkot Bima mengundang Malik Fajar, Ketua BWI pusat, untuk menyaksikan pembentukan

BWI Perwakilan Kota Bima. Kini kita sudah punya wadah, tinggal mengoptimalkan fungsinya. Salah satu saran saya adalah dengan membuat Peraturan Walikota yang mengatur lebih lanjut mengenai pemberian waqaf.

Harapan saya kedepan, semoga dapat tercipta sinergi antara umara (pemimpin), ulama, dan umat. Umara dan ulama harus mampu saling mendukung dan tidak terpecah sehingga dapat mengayomi dan tidak membingungkan umat. Lembaga keagamaan juga harus dapat bekerja sama dan menciptakan sinergi dengan pemerintah agar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

**Ahmad Usman**

**(Guru SMAN 1 Kota Bima, Dosen, Tokoh Pendidikan)**

Saya melihat kebijakan Pemerintah Kota Bima dalam pengembangan bidang pendidikan dan kepemudaan selama ini sudah berada pada jalur dan arah yang tepat, dengan melanjutkan program dan kebijakan pemerintah sebelumnya. Mengapa saya katakan sudah berada pada jalur yang tepat? Karena ada indikator yang dapat dilihat secara nyata, yaitu tercapainya sejumlah prestasi dalam bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

Kita ketahui bersama, selama dua tahun terakhir Kota Bima tidak putus-putusnya meraih penghargaan dari berbagai mata lomba bidang pendidikan dan olahraga, baik pada tingkat Provinsi NTB hingga nasional. Baru-baru ini adalah keberhasilan pelajar dari SMAN 1 Kota Bima meraih juara pertama dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Nasional Tahun 2012. Saat ini pun para pelajar SMAN 1 Kota Bima tengah mengikuti dua lomba lain pada level nasional, yaitu lomba menulis esai tentang keselamatan di jalan raya

dan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), yang kebetulan saya bertindak sebagai guru pembimbing.

Demikian pula halnya untuk bidang olahraga. Atlet dari Kota Bima telah mengharumkan nama Provinsi NTB dan Indonesia, yaitu pada ajang *Sea Games* dan PON. Pemerintah pun menghargai prestasi ini dengan memberikan berbagai penghargaan dan bantuan.

Selain indikator prestasi, ada indikator lain yaitu terwujudnya pembangunan fisik. Untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA, sarana pendidikan yang sudah terbangun cukup baik dan representatif, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seperti halnya sarana pendidikan, sarana olahraga berupa Gedung Olahraga di Manggemaci juga mulai terwujud.

Semua indikator ini memperlihatkan keberhasilan yang luar biasa. Secara umum, pembangunan bidang pendidikan, olahraga dan kepemudaan Kota Bima dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kepribadian sosok pemimpin yang menakhodai arah pembangunan. M. Qurais H. Abidin merupakan sosok pemimpin yang berkomitmen dan konsisten dengan berbagai tujuan dan visi misi daerah menjadikan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan.

Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Perhatian bagi jenjang pendidikan perguruan tinggi saya rasa masih kurang. Saya berharap Pemerintah menambah infrastruktur untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Kota Bima. Kiranya Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas PTS, baik untuk pembangunan fisik serta peningkatan SDM. Mungkin Pemerintah juga dapat memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi untuk kuliah dalam daerah sehingga pelajar berprestasi tidak terpikir untuk keluar daerah. Demikian pula untuk para dosen

yang sedang mengikuti pendidikan, kiranya dapat diberikan bantuan dana pendidikan.

Secara keseluruhan, pembangunan pendidikan Kota Bima sudah berjalan baik. Masing-masing elemen sudah mulai melaksanakan peranan dengan baik, tinggal ditingkatkan. Para guru harus lebih profesional, para siswa harus lebih disiplin. Harapan saya kedepan agar personil yang duduk sebagai pengambil keputusan di instansi terkait (Dinas Dikpora) adalah orang-orang yang benar-benar memahami bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, agar dapat menyusun berbagai program yang tepat guna dan berhasil guna. Sebagai penutup, kita berdoa semoga berbagai prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

**Dahlan Iskan**  
**(Menteri Negara BUMN)**

..... *Komentar pada saat berkunjung ke Kota Bima untuk melihat pembangunan PLTU Bonto*

Saya akui, sebagai Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin punya pemikiran yang mengesankan. Selain menyediakan energi, pembangunan PLTU punya manfaat lain. Bersinergi dengan rencana besar lain, yaitu pembukaan tambang marmer. Kapal yang datang membawa batu bara untuk bahan bakar PLTU, perginya mengangkut marmer hasil tambang. Ini adalah pemikiran bisnis yang pintar.

Dalam era modern, listrik memang memegang peranan penting dalam seluruh aspek kegiatan masyarakat. Bukan hanya dalam hal memenuhi kebutuhan energi, namun lebih jauh lagi, keberadaan listrik dan stasiun pembangkitnya harus bisa terintegrasi dengan perencanaan pembangunan

yang lain, sehingga lebih efisien, atau istilahnya “sekali jalan”. Contohnya ya PLTU Bonto ini, khususnya efektifitas penggunaan kapal pengangkut.

**Drs. H. Maryono Nasiman, MM**  
**(Tokoh Masyarakat, Mantan Sekretaris Daerah Kota Bima)**

.....*Komentar dalam acara silaturahmi internal Partai Demokrat*

Kota Bima telah memperoleh predikat *disclaimer* dalam hal pengelolaan keuangan daerah selama tujuh tahun berturut-turut. Namun akhirnya pada tahun 2012, dibawah kepemimpinan pasangan H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, Kota Bima mampu menaikkan statusnya menjadi “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Ini adalah sebuah prestasi besar. Saya sendiri yang paham dengan pengelolaan keuangan daerah merasa pesimis untuk bisa keluar dari status *disclaimer*. Namun pasangan ini mampu mewujudkan hal yang sangat sulit tersebut.

Jika kinerja dan sistem manajemen yang sekarang dipertahankan, maka insyaallah Kota Bima kedepan akan mampu meraih status tertinggi dalam

hal pengelolaan keuangan daerah, yaitu Wajar tanpa Pengecualian (WTP).

Kepiawaian pasangan ini dalam membangun Kota Bima memang merupakan sebuah hal yang membanggakan. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika masyarakat tidak memberikan kesempatan kepada keduanya untuk melanjutkan kepemimpinan.

#### REFERENSI

- BAPPEDA KOTA BIMA. 2012. *Kota Bima Dalam Angka Tahun 2011*.
- BAPPEDA KOTA BIMA. 2012. *Profil Daerah Kota Bima Tahun 2011*.
- BAPPEDA KOTA BIMA. 2012. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2011*.
- [HASIL LIPUTAN, NASKAH PIDATO, dan RILIS BERITA SUBBAGIAN HUMAS DAN PEMBERITAAN  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA BIMA]

#### (SAMPUL BELAKANG)

Buku ini mengangkat sekelumit jejak langkah H. M. Qurais H. Abidin sebagai Walikota Bima selama lebih kurang tiga tahun. Selama tiga tahun menakhodai perjalanan pembangunan dan pemerintahan di Kota Bima, H. M. Qurais H. Abidin mencatat berbagai pencapaian. Namun adakalanya sikap-sikap dan pandangannya menimbulkan sedikit pertanyaan di hati masyarakat maupun para pegawai Kota Bima, salah satunya adalah mengenai sikap kepemimpinan yang sering disebut “raja tega”serta dukungannya terhadap partai politik tertentu.

Buku ini mencoba mengangkat sedikit dari berbagai pencapaian, program, maupun kebijakan beliau, dari sudut pandang Humas

Pemerintah yang hampir selalu ikut serta dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukannya sebagai Walikota Bima.

Diawali dengan sedikit ulasan mengenai masa kecil, program dan kebijakan dalam berbagai aspek pembangunan, serta sikap politik hingga pencalonan kembali untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Walikota dan Walikota Bima Tahun 2013. Sebagai penyeimbang, Tim Penyusun pun meminta kesan dan pesan beberapa tokoh mengenai sosok H. M. Qurais H. Abidin.